

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) SEBAGAI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi Pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Perdesaan
Di Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)**

RINGKASAN

Oleh:
HEVI NUR AISYAH



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
MALANG
2011**

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) SEBAGAI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi Pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Perdesaan
Di Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)**

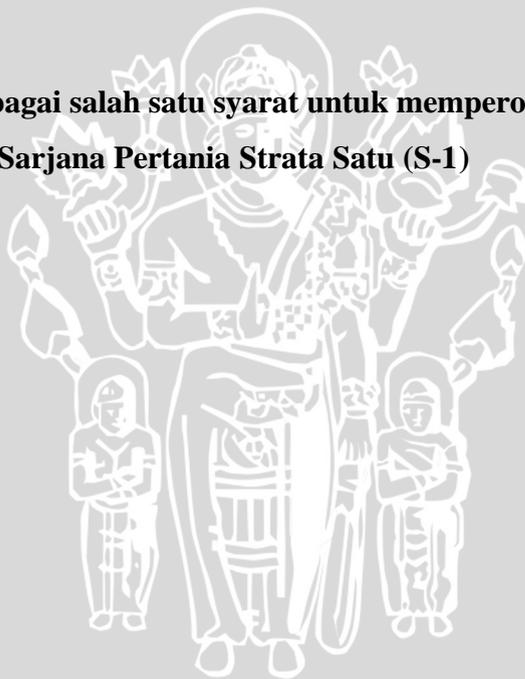
Oleh:

HEVI NUR AISYAH

0710450007-45

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) SEBAGAI PROGRAM PENANNGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Pedesaan Di Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)**

Nama : **Hevi Nur Aisyah**

NIM : **0710450007**

Program studi: **Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian**

Jurusan : **Sosial Ekonomi Pertanian**

Menyetujui : **Dosen Pembimbing**

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesni, MS
NIP. 195670226 198103 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS.
NIP: 19530715 198103 1 006

Tanggal Persetujuan :

LEMBAR PENGESAHAN

MAJELIS PENGUJI

Penguji I

Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS

NIP. 195670226 198103 2 002

Penguji II

Dr. Ir. Yayuk Yulianti, MS

NIP. 19540705 198103 1 006

Penguji III

Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS

NIP. 19550626 198003 1 003

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Alhamdulillahirobil'alamin.....

Terimakasih Ya Robb.....

Karya kecil ini kupersembahkan untuk :
Untuk keluargaku tersayang
Khususnya Bapak, Ibuku tersayang dan Suamiku tercinta.
atas ketulusan doa, kasih sayang, ijin, dukungan semangat
dan pengorbanannya,,, "Terima Kasih....."

Sahabat dan temanku yang selalu mendukung
& mengingatkanku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Khususnya 176 & teman seperjuangan PKP'07.

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Q.S. Ar Ra'du (13) : 11

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; dan merekalah orang-orang yang beruntung.

QS. Ali Imran (3) : 104



RINGKASAN

HEVI NUR AISYAH (0710450007-45). Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Pedesaan Di Desa Supenuh, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan). Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS.

Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Peraturan Presiden RI UU No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menimbang bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan. Program pembangunan ini yang sedang dilaksanakan di sebagian kecamatan yang ada di kabupaten Lamongan, yang lebih dikenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti sampai sejauh mana pencapaian proses pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1) Faktor internal dan eksternal apa yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan RTM pada PNPM-MP?, 2) Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan keluaran atau output PNPM-MP? Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendeskripsikan faktor internal dan eksternal yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan RTM pada PNPM-MP. 2) Menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan dan keluaran atau output PNPM-MP.

Penelitian ini pada dasarnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di desa Supenuh, kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dengan pengambilan responden secara sengaja dengan jumlah 30 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah *survey* dan menggunakan kuisioner yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi sebagai alat pengumpul data. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan *skala likert*.

Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Faktor internal dan eksternal terdiri dari :
 - a. Umur, sangat mendukung seseorang berinteraksi dengan lingkungannya dan perilakunya dalam berpartisipasi pada aktivitas kelompok serta minat untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan usahanya.
 - b. Jenis Kelamin, dalam implementasinya menjadikan keterlibatan perempuan dalam siklus pemberdayaan dan sebagai indikator pencapaian keberhasilan kegiatan.
 - c. Tingkat pendidikan, responden sebagian besar hanya berpendidikan SMP dan rata-rata memiliki cukup kemampuan akademik sehingga memudahkan mereka untuk menerima sebuah informasi serta niat mereka untuk mengikuti perkembangan cukup besar.
 - d. Jumlah anggota keluarga menjadi bahan pertimbangan responden dalam pengambilan keputusan untuk menerima informasi baru dan menerapkannya dan

- rasa takut akan kegagalan akan selalu menjadi keraguan responden dengan jumlah anggota yang lebih besar.
- e. Pengalaman berusaha yang tinggi sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, hal ini dikarenakan jika pengalaman berusaha masih rendah maka dalam pelaksanaan pemberdayaan juga kurang maksimal. Semakin banyaknya pengalaman berusaha responden maka akan semakin mudah bagi responden untuk mengembangkan usahanya.
 - f. Modal dalam kegiatan pemberdayaan dalam bentuk uang (material), non material atau dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, maupun modal dalam bentuk barang dan lain sebagainya.
 - g. Jaminan pemasaran hasil yang cukup banyak dan rata-rata petani menjualnya sendiri maka semakin meningkat keinginan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh PNPM mengingat jalan sebagai sarana transportasi sudah tidak layak digunakan.
2. Proses pelaksanaan PNPM adalah :
- Perencanaan*, kegiataanya meliputi : sosialisasi, klarifikasi, klasifikasi, identifikasi kebutuhan, musyawarah desa, penulisan usaha dan verifikasi usulan. *Pelaksanaan*, kegiatannya meliputi : lokakarya pra pelaksanaan, Musdes Pra pelaksanaan, dan pencairan dana. *Evaluasi* Kegiatan pada ada tahap evauasi PNPM meliputi pelaporan jalur structural dan pelaporan jalur fungsional. *Pelestarian kegiatan*, dapat dilihat dari proses pengembangan dalam kelembagaan BKM kepada orang-orang muda yang belum pernah terlibat sebelumnya serta adanya motivasi untuk mendapatkan pencapaian yang lebih besar yaitu keinginan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah terkait masalah kemiskinan. *Output*, sebagai berikut :1) Anggota PNPM mempunyai kemampuan menyusun rencana, mengetahui peraturan kelompok, mengetahui tempat dan waktu pertemuan, memiliki kemampuan kerjasama kelompok, dapat memanfaatkan sarana prasarana dari PNPM dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan, 2) Terjadi peningkatan kelembagaan di desa, 3) Memfasilitasi pembangunan partisipatif, 4) Terlembaganya pengelolaan dana bergulir , 5) Berkembangnya kerjasama antar desa, 6) Berfungsi dan bermanfaat PNPM ,7) Terjadi peningkatan para pemangku dalam penanggulangan kemiskinan.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perdesaan di desa Supenuh meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian program serta menghasilkan beberapa output yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Kegiatan yang dilakukan adalah pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan usaha yang dapat meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat, masyarakat bisa belajar banyak mengenai kelembagaan, kepemimpinan sehingga menjadikan mereka memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan.

Penelitian ini memberikan saran akademis dan saran praktis, yaitu :

- a. Saran akademis : Kajian evaluasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam sebuah komunitas, sedangkan program pemberdayaan yang dilaksanakan adalah sebuah program dalam skala nasional, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan pada masing-masing tingkatan, baik di tingkat regional, wilayah, maupun nasional.
- b. Saran Praktis : Perlu adanya penambahan kegiatan-kegiatan dan porsi pembelajaran yang lebih banyak bagi kaum perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran dan keterlibatannya dalam pembangunan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya dan untuk PNPM agar dapat terus melanjutkan dan memperbaiki kinerjanya, agar manfaatnya dapat terus dirasakan bagi masyarakat.

SUMMARY

HEVI NUR AISYAH (0710450007-45). Evaluation of the National Program for Community Empowerment or Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) as poverty reduction programs (Studies in National Program (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan in Supenuh village, Sugio district, Lamongan Regency). Under the guidance of : Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesni, MS.

Participatory development is closely related to community empowerment, to enable them to achieve progress, independence, justice and prosperity in an atmosphere of continuing to improve the status and dignity and be able to escape the trap of poverty and underdevelopment. Presidential Regulation Act No. 15 of 2010 concerning the acceleration of poverty reduction given that to accelerate poverty reduction efforts are needed sharpening, including goal setting, planning and program coordination, monitoring and evaluation, and the effectiveness of the budget, necessary institutional strengthening at the national level that deal with prevention poverty. This development program is being implemented in some districts in Lamongan district, better known as the National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri Pedesaan. PNPM Rural is a program to accelerate poverty reduction in an integrated and sustainable. Of the problems mentioned above, the writer is interested to examine the extent to which the achievement of community empowerment process in the activities of PNPM Rural.

Formulation of the problem of this research are: 1) What internal and external factors that are involved in the implementation of empowerment in PNPM-MP?, 2) What is the process of planning, execution, and output or output PNPM-MP? This study aims to: 1) Describe the internal and external factors that are involved in the implementation of empowerment in PNPM-MP. 2) analyze the process of planning, execution and output or output PNPM.

This research is qualitative descriptive research, which was intended to gather information on the status of an existing phenomenon in the time of the study. This research was conducted in the village Supenuh, sub Sugio, Lamongan by taking respondents deliberately by the number of 30 respondents. The research method is using a questionnaire survey and supported with in-depth interviews and observation as data collection tool. Methods of data analysis is descriptive qualitative by using Likert scale.

The results of this study are:

1. Internal and external factors consist of:
 - a. Age, strongly supports a person interacting with their environment and behavior in participating in group activities and interests to enhance productivity and business development.
 - b. Sex, in its implementation makes the involvement of women in the cycle as an indicator of empowerment and achievement of success of the activities.
 - c. The level of education, respondents mostly junior high school educated and on average have enough academic ability enabling them to receive an information and their intent to follow the development is large enough.
 - d. The number of family members into consideration the respondent in making the decision to accept new information and apply it and the fear of failure will always be doubts respondent with a greater number of members.
 - e. The experience of trying a high very much needed in the process of implementation of empowerment, this is because if the experience of trying to still lower then in the implementation of empowerment is also less than the maximum. More and more experience trying respondents will be more easy for respondents to expand its business.

- f. Capital in empowerment activities in the form of money (material), non-material or by utilizing all available resources, and capital in the form of goods and so forth.
 - g. Marketing collateral and the results are pretty much the average farmer will sell his own growing desire in the implementation of development undertaken by the PNPM given the road as a means of transportation is not feasible to use.
2. The process of implementation of the PNPM are: *Planning*, activities include: socialization, clarification, classification, identification of needs, village meetings, writing proposals and verification effort. *Implementation*, activities include: pre-implementation workshops, Musdes Pre implementation and disbursement of funds. *Evaluation* activities at any stage of the reporting lines evaluation PNPM covers structural and functional reporting lines. Preservation activities, can be seen from the process of institutional development in the BKM to the young people who have never been involved before as well as the motivation to get a bigger achievement is the desire to pursue grants from the government on the issue of poverty. Output, as follows: 1) Members of the PNPM has the ability to plan, knowing the rules, know the place and time of meetings, have the ability to group cooperation, to take advantage of infrastructure from PNPM properly and in accordance with the needs, 2) There was an increase in village institutions, 3) Facilitating participatory development, 4) Terlembaganya revolving fund management, 5) development of cooperation between villages, 6) Functioning and beneficial PNPM, 7) There was an increase of the stakeholders in poverty reduction.

The conclusion from this study that the implementation of empowerment in PNPM Mandiri Supenuh Rural in the village include the planning, implementation, evaluation and preservation programs and produces several outputs that benefit is felt by local communities. Activities undertaken is empowerment and empowerment business environment that can enhance community capacity building, communities can learn a lot about the institution, leadership that makes them have a greater responsibility in the implementation of development.

This study provides academic advice and practical suggestions, namely:

- a. Academic advice: Review community empowerment evaluation conducted in this research is in a community, while the empowerment program is a program implemented on a national scale, it is necessary to conduct further research on empowerment at the individual level, both at the regional level, regional, and nationally.
- b. Practical advice: It is necessary to increase the activities and learning more servings for women in community empowerment program to enhance the role and involvement in development in particular and poverty reduction in general and to PNPM order to continue to continue and improve its performance, so that benefits can be continue to be felt for the community.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul ‘Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Perdesaan di Desa Supenuh).’, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan sampai penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Keppi Sukei, MS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS dan Ibu Yayuk Yuliati selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan banyak pegarahan demi perbaikan skripsi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang telah memberikan materi-materi kuliah sebagai dasar penulisan laporan ini.
4. Ayah, Ibu, Mas Aminudin beserta keluarga tercinta atas ketulusan doa, kasih sayang, ijin, dukungan semangat dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis dapat menjalankan studi dengan baik.
5. PjOK kecamatan Sugio, Bpk. Udjiono. Terima kasih atas bantuan dan ijinnya sehingga penulis akan dapat melaksanakan skripsi di BKAD dengan baik.
6. Seluruh pengurus UPK, Kepala Desa, dan aparat desa lainnya yang telah memberikan bantuan selama kegiatan penelitian di lapang berlangsung.
7. Teman-teman seperjuanganku “ PKP 07” yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, referensi dan pengalaman, maka penulis sangat mengharapkan saran dan masukan demi lebih baiknya penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, Mei 2011

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lamongan pada tanggal 23 Maret 1989. Penulis adalah anak tunggal dari seorang ayah yang bernama Kasuwan dan ibu bernama Siti Umaiyah. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN Supenuh tahun 1996-2001, dan melanjutkan ke SMP Negeri 3 Sugio (2001-2004), kemudian menempuh pendidikan SMA di MAN Lamongan (2004-2007). Pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di S1 di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang melalui jalur PMDK.



DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	6
2.1.1. Definisi Pemberdayaan	6
2.1.2. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	7
2.1.3. Tujuan pemberdayaan Masyarakat	10
2.1.4. Strategi Pemberdayaan masyarakat	12
2.1.5. Tahap-tahap Pemberdayaan	16
2.1.6. Evaluasi dan Monitoring pemberdayaan Masyarakat	16
2.1.7. Indikator keberdayaan	17
2.2. Tinjauan Teoritis tentang Evaluasi Program	18
2.2.1. Konsep Dasar Evaluasi Program	18
2.2.2. Evaluasi Pemberdayaan	20
2.2.3. Tujuan Evaluasi	21
2.2.4. Teknik Evaluasi	21
2.2.5. Pendekatan dalam Pelaksanaan Evaluasi	23
2.3. Konsep Kemiskinan	24
2.3.1. Pengertian Kemiskinan	24
2.3.2. Penggolongan Kemiskinan	32
2.3.3. Garis Kemiskinan	33
2.3.4. Kriteria Kemiskinan	36
2.3.5. Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan	38
2.4. Tinjauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	40
2.4.1. Pengertian PNPM	40
2.4.2. Visi, Misi, Tujuan PNPM MP	41

2.4.3. Sasaran PNPM MP	42
2.4.4 Prinsip Dasar PNPM Mandiri Pedesaan	42
III. KERANGKA TEORITIS	
3.1. Kerangka Pemikiran.....	44
3.2. Batasan Masalah	48
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	48
3.3.1. Definisi Operasional.....	48
3.3.2 Pengukuran Variabel	50
IV. METODOLOGI	
4.1. Jenis Penelitian.....	59
4.2. Lokasi Penelitian.....	59
4.3. Metode Penentuan Responden.....	60
4.4. Metode Pengumpulan Data	60
4.5. Metode Analisis Data	61
4.5.1 Analisis Data Deskriptif Kualitatif	61
V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
5.1 Keadaan Geografis Desa	65
5.1.1 Keadaan Geografis dan Batas Administratif	65
5.2 Keadaan Penduduk	65
5.2.1 Menurut Jenis Kelamin	65
5.2.2 Menurut Umur	66
5.2.3 Menurut Tingkat Pendidikan	67
5.2.4 Menurut Mata Pencaharian	67
5.3 Keadaan Lahan Pertanian.....	68
5.3.1 Distribusi lahan.....	68
5.3.2 Jenis Komoditi dan Produksi	69
5.4 Keadaan Kelembagaan.....	70
5.4.1 Keadaan Kelembagaan Sosial.....	70
5.5 Pelayanan Umum	75
5.5.1 Fasilitas Pendidikan	75
5.5.2 Fasilitas Kesehatan.....	75
5.6 Gambaran Umum PNPM di Lokasi Penelitian.....	75
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN	
6.1 Karakteristik Responden.....	79
6.1.1 Berdasarkan Umur	79
6.1.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	80
6.1.3 Berdasarkan Jenis Kelamin	81
6.2 Faktor yang Terkait Kegiatan Pemberdayaan.....	81
6.2.1 Faktor Internal yang Terkait Kegiatan Pemberdayaan	81
6.2.2 Faktor Eksternal yang Terkait Kegiatan Pemberdayaan.....	87
6.3 Evaluasi PNPM	90
6.3.1 Pelaksanaan Kegiatan	90
6.3.2 Output Kegiatan.....	106

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

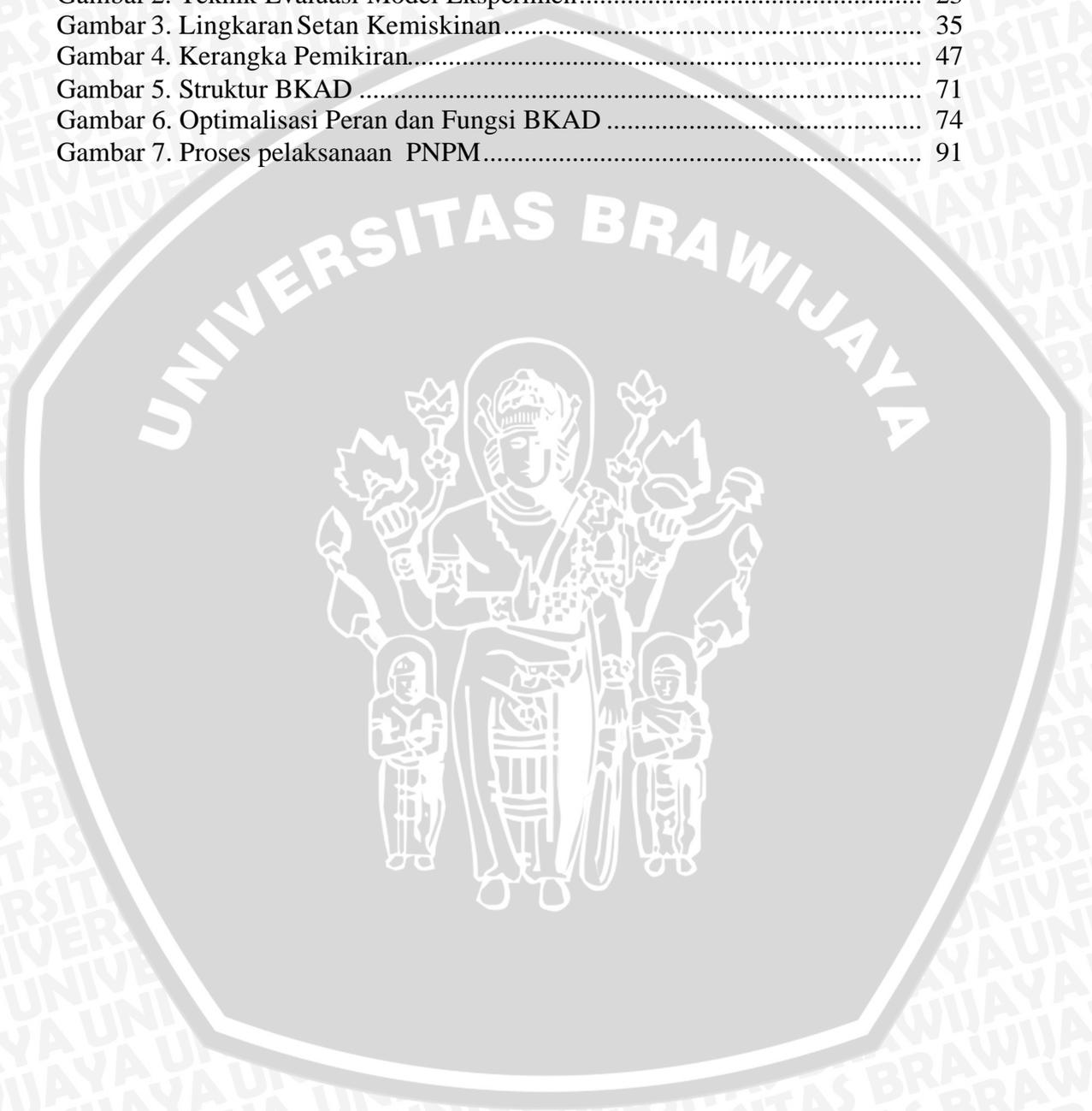
7.1 Kesimpulan.....	117
7.2 Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Skema Evaluasi Tujuan.....	22
Gambar 2. Teknik Evaluasi Model Eksperimen.....	23
Gambar 3. Lingkaran Setan Kemiskinan.....	35
Gambar 4. Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 5. Struktur BKAD	71
Gambar 6. Optimalisasi Peran dan Fungsi BKAD	74
Gambar 7. Proses pelaksanaan PNPM.....	91



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Variabel Faktor faktor yang terkait dalam Kegiatan Pemberdayaan RTM di Desa Supenuh.....	51
Tabel 2. Variabel Pelaksanaan Program di Desa Supenuh.....	52
Tabel 3. Variabel Output Pelaksanaan Program di Desa Supenuh.....	56
Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	65
Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Umur	66
Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	67
Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	68
Tabel 8. Distribusi Penggunaan Lahan Pertanian di Desa Supenuh.....	69
Tabel 9. Jenis Komoditi dan Produksi Pertanian di Desa Supenuh Th 2010	69
Tabel 10. Fasilitas Pendidikan di Desa Supenuh.	75
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	79
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	80
Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	81
Tabel 14. Faktor Internal yang Mempengaruhi Kegiatan Pemberdayaan	82
Tabel 15. Umur Responden di Desa Supenuh	84
Tabel 16. Tingkat pendidikan Responden di Desa Supenuh	86
Tabel 17. Jumlah Anggota Keluarga Responden di Desa Supenuh.....	86
Tabel 18. Pengalaman Berusaha Responden di Desa Supenuh.....	87
Tabel 19. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kegiatan Pemberdayaan.....	88
Tabel 20. Modal Responden di Desa Supenuh.....	88
Tabel 21. Jaminan Pemasaran Hasil	90
Tabel 22. Mekanisme dalam Tahap Pelaksanaan PNPM Tahun 2010	92
Tabel 23 Output Palaksanaan kegiatan PNPM di Desa Supenuh.....	108



DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKM	: Badan Kswadayaan Masyarakat
BKAD	: Badan Koordinasi Antar Desa
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitator	: Tenaga Pengembangan Masyarakat dalam PNPM
FK	: Fasilitator Kecamatan
FT	: Fasilitator Teknik
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
LPD	: Laporan Penggunaan Dana
MAD	: Musyawarah Antar Desa
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
P3PK	: Pusat Penelitian pembangunan Pedasaan dan Kawasan
PjOK	: Penanggungjawab Operasional Kegiatan
PL	: Pendamping Lapang
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
PS	: Pemetaan Swadaya
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RPD	: Rencana Penggunaan Dana
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RTM	: Rumah Tangga Miskin
RW	: Rukun Warga
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPP	: Simpan Pinjam
SPPB	: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
TPK	: Tim Pelaksana Kegiatan
TPU	: Tim Penulis Usulan
UPK	: Unit Pelaksana Kegiatan

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Kuisisioner	122
Lampiran 2. Kuisisioner	129
Lampiran 3. Data Responden.....	135
Lampiran 4. Data Pengurus UPK.....	136
Lampiran 5. Analisis skala Likert Perencanaan PNPM.....	137
Lampiran 6. Analisis skala Likert Pelaksanaan PNPM	149
Lampiran 7. Analisis skala Likert Output PNPM	141
Lampiran 8. Rencana Kelompok ke UPK.....	143
Lampiran 9. Rencana Angsuran Kredit ke Kelompok	145
Lampiran 10. Rencana Anggaran Biaya SPP	146
Lampiran 11. Cash Flow Kegiatan SPP.....	147
Lampiran 12. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan.....	149
Lampiran 13. Rekapitulasi Anggaran Biaya	150
Lampiran 14. Sketsa Jalan	151



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005: 87). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani (Mubarok, 2010). Pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Jumlah penduduk miskin lebih banyak terkonsentrasi di daerah pedesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama periode Maret 2009-Maret 2010,

penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta, dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010, sementara di daerah pedesaan berkurang 0,69 juta orang, dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010. Populasi masyarakat pedesaan biasanya juga cenderung rendah tingkat kesehatan maupun tingkat pendidikannya. Daerah pedesaan memiliki ciri yang unik dimana para pengambil keputusan harus berhati – hati dalam memahaminya, seperti misalnya populasi relative rendah, memiliki akses yang terbatas, infrastruktur umum dan juga layanan publik.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung terlihat pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa perlu ada upaya-upaya strategis untuk mengatasinya. Upaya strategis yang dilakukan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menggunakan pendekatan partisipatif dari masyarakat itu sendiri.

Pengalaman dari PPK menunjukkan bahwa masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin, namun belum dapat dijangkau secara optimal. Karena itu untuk lebih menajamkan kedua masalah tersebut PPK telah diganti dengan format program baru yaitu PNPM.

Maka dari itu Negara Indonesia melakukan pembangunan yang pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan kemampuan dan kekuatan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan cara kerjanya, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan dan berkepribadian bangsa Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia UU No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menimbang bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang

meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Program pembangunan ini yang sedang dilaksanakan di sebagian kecamatan yang ada di kabupaten Lamongan, yang lebih dikenal sebagai Program Nasional Pembudayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Program Nasional Pembudayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai dirancang pemerintah Indonesia tahun 2007 yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai beberapa keluaran program, antara lain :

1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian.
2. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa.
3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif.
4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat.
5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM.
6. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan.
7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Desa Supenuh, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Desa Supenuh adalah salah satu desa yang menerima program pemberdayaan masyarakat yaitu PNPM Mandiri Perdesaan yang pelaksanaannya telah dimulai pada tahun 2009 dan masih berjalan sampai penelitian ini dilaksanakan. Desa Supenuh merupakan salah satu lokasi yang dianggap cukup berhasil dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan karena memiliki progress yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai agenda-agenda yang telah direncanakan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya maupun dalam kegiatan pembangunan fisik lingkungannya.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti sampai sejauh mana pencapaian proses pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang perkembangan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Keluaran dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan PNPM dalam kerangka pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Faktor internal dan eksternal apa sajakah yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan?
2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan keluaran atau output Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan faktor internal dan eksternal yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan.

2. Menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan dan keluaran atau output Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Pedesaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi instansi, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki proses pelaksanaan pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Bagi peneliti, memberi wawasan secara lebih mendalam tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sehingga dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut.
3. Badan pemberdayaan masyarakat, sebagai bahan evaluasi khususnya tentang pemberdayaan masyarakat miskin dalam PNPM Mandiri Perdesaan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Definisi Pemberdayaan

Suatu pemberdayaan pada dasarnya menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Suharto (2005) pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya memberi daya atau kekuatan kepada rakyat (*empowerment*). Bentuk jenis dan cara pemberdayaan rakyat atau penguatan rakyat tertentu sangat beraneka ragam. Salah satu upaya adalah terwujudnya kemauan untuk mengubah struktur masyarakat yang selama ini berlaku. secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan).

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1996), menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dan tenaga yang dimiliki masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk dapat mengembangkan dalam kehidupannya.

Berdasarkan pengertian pemberdayaan yang ada maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung atau pemberdayaan yang menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan

sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

2.1.2 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Hingga saat ini terdapat banyak macam perspektif yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dipahami, karena sebenarnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak perspektif mengenai pembangunan masyarakat. Perspektif ini menawarkan sebuah pendekatan yang menyeluruh, meliputi kerangka konseptual, logika berpikir dan panduan umum untuk meningkatkan kapasitas dan *performance* dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak menyediakan keharusan-keharusan yang terperinci yang tepat atau cocok untuk setiap sistem kemasyarakatan. Meskipun demikian, ada beberapa hal penting dalam memahami dan membuat sebuah definisi yang operasional dari pemberdayaan masyarakat.

Pertama, pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tapi juga kolektif (Harry Hikmat, 2001: 46-48). Menurut Payne, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Rukminto Adi, 2002: 162-163).

Kedua, menurut Pranarka dan Vindhyandika, terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat. Pertama, kecenderungan primer. Pada kecenderungan ini proses pemberdayaan masyarakat ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan

dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder. Kecenderungan ini menekankan pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog (Adimiharja, 2001: 10). Kedua kecenderungan ini juga dirumuskan oleh Payne. Ia menyatakan bahwa pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari ligkungannya.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang terwujud dalam berbagai medan kehidupan: politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya (Pranaka dan Vidhyandika, 1996: 56). Gagasan lain mengenai pemberdayaan adalah memberikan kekuatan (*power*) pada yang tidak berpunya (*powerless*). Hanya dengan *power*, proses aktualiasasi diri dapat dijalankan.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi (Rukminto Adi, 2002: 163-165).

Keempat, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan sebagai proses, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Dalam

pengertian yang terakhir, pemberdayaan tidak berfungsi untuk meniadakan masalah, tetapi mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat agar proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat (Rukminto Adi, 2002: 171-177). Mengingat pemberdayaan merupakan suatu proses, strategi yang digunakan pun lebih mengutamakan proses dari pada hasil.

Kelima, pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat menjadi pilihan yang paling menguntungkan di masa yang akan datang. Hal ini setidaknya didasari berbagai potensi yang dimilikinya, seperti dinyatakan oleh David Osborne dan Ted Gabler, antara lain (*Osborne and Gabler, 1993*); warga masyarakat akan memberikan komitmen yang lebih besar; masyarakat mengetahui permasalahan yang dihadapi warganya secara lebih mendalam; masyarakat lebih mampu memberikan penyelesaian setiap masalah yang lebih mendasar; peran aktif Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa, sedangkan pemerintah lebih berperan memberikan perhatian dan dorongan; pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lebih efisien, efektif dan partisipatif; Masyarakat lebih mampu melihat potensi yang dimiliki oleh setiap warganya.

Keenam, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (*community based development*). Kartasastima (1996) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik kuat, dan inovatif tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan.

Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pada dasarnya

pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan yang menempatkan kreativitas dan prakarsa masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa elemen penting dari pemberdayaan adalah partisipasi.

Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Dalam konteks pembangunan dan demokratisasi di Indonesia, pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik menjadi penting. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*). Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa warga negara memahami kehidupan politik. Pada sisi yang lain, rendahnya partisipasi dapat dianggap sebagai rendahnya kepedulian dan pengetahuan warga negara dalam kehidupan politik atau bisa jadi terdapat batasan serta tidak adanya kesempatan dalam kehidupan politik.

2.1.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Mangantas Tampubolon, 2001 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri atau “membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Tujuan dari proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui Karakteristik Masyarakat Setempat

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2) Mengetahui Pengetahuan Dari Masyarakat Setempat

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3) Menentukan Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Masyarakat

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4) Memecahkan Masalah Dari Masyarakat

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5) Membantu Masyarakat Untuk Berdiskusi Tentang Suatu Masalah

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6) Membantu Masyarakat Dalam Mengidentifikasi Masalah

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

- 7) **Membangun Kepercayaan Diri Masyarakat**
Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- 8) **Menentukan Program Pemberdayaan**
Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- 9) **Pengakuan Kekuatan Dan Sumber Dari Masyarakat**
Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- 10) **Membantu Memecahkan Masalah Secara Kontinyu**
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- 11) **Menumbuhkan Kemandirian Dalam Masyarakat**
Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

2.1.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan (*movement*) untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya.

Untuk itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD atau APBN. Program dan kegiatan tersebut harus memiliki cara kerja (metode) yang efisien dan efektif untuk memobilisasi potensi dan mengurangi

dispotensi yang ada di dalam masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut, Pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga yang memiliki otoritas. Untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan identifikasi hal-hal terkait seperti: (1) Kerjasama kelompok pelaku dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan, (2) Klasifikasi lapisan kelompok pemanfaat/sasaran baik secara ekonomi, sosial budaya, dan politik. Demikian pula kegiatan pemberdayaan, harus meliputi seluruh bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Terdapat empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan, yaitu: *Pertama*; Memberdayakan masyarakat dengan “mensosialisasikan” peran masyarakat sebagai subyek, baik sebagai pemeran utama dan atau ambil bagian/membantu ataupun sebagai sasaran/pemanfaat (obyek) secara tepat, benar dan dipahami serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang Poleksosbudhankam (fisik-nonfisik). *Kedua*; Mendayagunakan “mekanisme” penyelenggaraan pembangunan /pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratis, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketatanegaraan/ pemerintahan dan kemasyarakatan yang baku. *Ketiga*; Mobilisasi “sumber daya” manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya, termasuk mobilisasi uang dan barang dan lain-lain baik secara lokal kelurahan ataupun dari luar kelurahan dan pihak lainnya seoptimal mungkin, tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. *Keempat*; Memaksimalkan peran pemerintah, khususnya “Pemerintahan Kelurahan” dalam memfasilitasi, mengatur/legalisasi (regulasi) dan memberi bantuan dana/teknis (donasi), guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

Menurut Jim Ife (1995: 63-63) bahwa terdapat tiga strategi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber daya atau pelayanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi sosial menitikberatkan pada pentingnya perjuangan politik dan perubahan dalam mengembangkan kekuatan efektif. Sedangkan pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran mengembangkan pentingnya proses pendidikan yang dapat melengkapi warga masyarakat untuk meningkatkan kekuasaannya. Untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran tentang pemahaman masyarakat dalam arti luas dan struktur penindasan, mengajarkan pada masyarakat tentang pengertian dan ketrampilan untuk perubahan yang efektif. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui perubahan perilaku masyarakat, yakni dengan pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat.

Parsons, et al., (1994: 112-113) menyatakan bahwa pelaksanaan proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam hubungan satu lawan satu.

Namun demikian, tidak semua intervensi dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa kondisi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual. Walaupun demikian strategi tersebut tetap berkaitan dengan kolektivitas dalam arti sasaran pemberdayaan dikaitkan dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya karenanya pemberdayaan dilakukan melalui tiga pendekatan : pendekatan mikro, pendekatan mezzo dan pendekatan makro.

a) Pendekatan mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, *conseling, stress management, crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Mode ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b) Pendekatan mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c) Pendekatan makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Hal ini sesuai dengan pengertian pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri, sebagai upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraanya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. (Tim Pengendali, 2007:11)

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan dan penguatan aset dan potensi masyarakat miskin agar mampu berpartisipasi dalam mengendalikan dan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan dan kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga jalur: (1) menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), (2)

penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), serta (3) upaya melindungi (*protecting*) (Sumodiningrat, 1999 : 133 - 134).

2.1.5 Tahap – Tahap Pemberdayaan

Ditinjau dari segi tingkat pendampingan tahapan-tahapan pemberdayaan meliputi :

1. Tahapan animasi, yaitu tahap menumbuhkan atau membangkitkan jiwa dan semangat pada diri masyarakat bahwa mereka mampu.
2. Tahap fasilitasi, yaitu tahap membantu masyarakat menembus serta mengatasi rintangan teknis melalui pelatihan, penyuluhan dan sebagainya.
3. Tahap penghapusan, yaitu tahap dimana pendamping menarik diri dari kelompok dampungannya.

Jika ditinjau dari tingkatan hasil yang akan dicapai, pemberdayaan bisa dibedakan dalam tahapan-tahapan :

1. Tahap kesejahteraan, dimana pemberdayaan masih berpusat pada peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.
2. Tahap kesadaran kritis, yaitu tahapan dimana pemberdayaan telah mencapai tingkatan untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis terhadap segala hal disekitarnya.
3. Tahap pengorganisasian, dimana pemberdayaan telah meningkat pada peningkatan kualitas organisasinya dan terus diupayakan untuk mampu mengambil keputusan-keputusan sekitar dirinya sendiri.
4. Tahap kontrol, dimana masyarakat memiliki kemampuan mengontrol terhadap segala bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan yang terkait dengan kehidupan mereka.

2.1.6 Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dievaluasi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjamin agar pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat untuk untuk menjamin tidak adanya pelanggaran baik dari aspek substantif dan administratif. Paling tidak terdapat dua

sasaran evaluasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan yaitu: Kepatuhan terhadap Peraturan-perundangan dan Tingkat pencapaian output. Evauasi aspek kepatuhan meliputi konsistensi penerapan hukum dan kesesuaian dengan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan. Sedangkan evaluasi pencapaian target meliputi aspek kuantitatif, kualitatif dan daya guna program pemberdayaan masyarakat.

2.1.7 Indikator Keberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto, 2005).

Indikator Pemberdayaan :

1. Kebebasan mobilitas : kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau tempat tinggalnya, seperti kepasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhna dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak shampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang – barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu untuk membeli barang-barang skunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indicator di atas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa

meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang – barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga : mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga : responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpajinnya; yang melaang punya anak atau melarang bekerja diluar rumah
6. Kesadaran hukum dan politik : mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang naggota DPR setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum – hecum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes – protes : seseorang dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes. Misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

2.2. Tinjauan Teoritis Tentang Evaluasi Program

2.2.1. Konsep Dasar Evaluasi Program

Menurut Sutisna (2000 :250) bahwa : “Evaluasi program adalah unsur lain yang sangat penting dari keseluruhan proses pengelolaan kegiatan. Evaluasi program, pada umumnya berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Evaluasi program adalah proses yang menentukan betapa baiknya organisasi, program-program atau kegiatan-kegiatan sedang atau telah mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, evaluasi program adalah membandingkan hasil-hasil yang sebenarnya dengan yang dikehendaki dan merumuskan pendapat tentang

perbuatan (*performance*) organisasi dan anggotanya didasarkan pada perbandingan itu.”

Aktivitas mengevaluasi program sangat diperlukan pertimbangan yang sistematis, rencana, analisis sebab akibat, penyusunan instrumen evaluasi, penyusunan kriteria, serta, deskripsi program dengan jelas. Pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan, terutama untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program itu.

Menurut Sutisna (2000:252) bahwa : “Fungsi utama evaluasi adalah memberikan data informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu program, sehingga pembinaan program tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat, apakah program itu akan diteruskan, ditunda ataukah digagalkan sama sekali. Maka dengan demikian, evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pelaksanaan suatu program. Di samping itu, evaluasi berfungsi pula sebagai suatu usaha untuk: (a) menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program, (b) menemukan faktor penghambat pelaksanaan program, (c) menemukan penyimpangan atau kekeliruan pelaksanaan program dan (d) memperoleh bahan untuk penyusunan saran perbaikan, perubahan, penghentian dan penyempurnaan program”

Jadi, dengan menggunakan proses evaluasi program itu efektivitas seluruh organisasi dan tiap-tiap bagiannya bisa ditentukan. Tidak saja efektivitas program dan jasa organisasi yang hendaknya ditentukan itu; juga proses-proses yang digunakan oleh pengelolaan kegiatan hendaknya dinilai. Proses-proses ini dimaksudkan untuk memperbaiki efektivitas organisasi pada umumnya dan sering mempengaruhi langsung kualitas program-program yang disediakan. Setidaknya hendaknya dilakukan evaluasi program periodik tentang efektivitas dari pengambilan keputusan, perencanaan, komunikasi, dan proses-proses lain yang digunakan oleh pengelolaan kegiatan.

Semua kegiatan yang didesain untuk membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya hendaknya dinilai. Evaluasi program yang dilakukan dengan terus – menerus sangat penting oleh karena harus menjadi landasan setiap usaha perbaikan dan penyesuaian kembali di semua bidang pengelolaan kegiatan.

2.2.2 Evaluasi Pemberdayaan

UNDP (2002) dalam Mubarak (2010) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan selektif yang mencoba mengkaji perkembangan dan pencapaian suatu hasil secara sistematis dan objektif. Dalam sebuah program, evaluasi tidak hanya dilakukan satu kali namun penilaian dilakukan berulang dan dilaksanakan berdasarkan lingkup dan kedalaman yang berbeda pada beberapa tahapan waktu untuk menilai pencapaian pengetahuan dan pembelajaran dalam upaya pencapaian hasil (*outcome*).

Evaluasi pemberdayaan didefinisikan sebagai pendekatan evaluasi yang mengarah pada upaya meningkatkan kemungkinan pencapaian keberhasilan program pemberdayaan yang lebih baik (Wandersman dalam Fetterman, 2007). Fetterman (2007) juga menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan adalah merupakan proses untuk mendapatkan gambaran diri melalui evaluasi dan refleksi diri dalam tataran individu ataupun grup guna meningkatkan kualitas dirinya melalui inisiatifnya sendiri. Terdapat beberapa pendekatan-pendekatan dan model-model evaluasi pemberdayaan. Guijt (2000) dan Rietbergen-McCracken (1998) menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui rangkaian kegiatan partisipatif (*participatory monitoring & evaluation/PM&E*). Prinsip dalam PM&E adalah bahwa masyarakat lokal berperan sebagai partisipan aktif, semua *stakeholder* ikut mengevaluasi sedangkan pihak luar hanya memfasilitasi, fokus pada pengembangan kapasitas *stakeholder* dan proses yang ada ditujukan untuk membangun komitmen guna kemajuan dan tindakan korektif.

Evaluasi partisipatif berbeda dengan pendekatan evaluasi konvensional (Riebergen-McCracken, 1998), dimana pendekatan evaluasi tradisional cenderung bersifat linear dan lebih berfungsi untuk menilai akuntabilitas manajemen dan keuangan sedangkan evaluasi partisipatif lebih bersifat *open-ended* dan *iterative* (berulang) dan lebih berfungsi untuk menjawab kebutuhan terhadap perubahan dalam kegiatan. Kritik Cousins (2005) terhadap teori evaluasi pemberdayaan Fetterman menyatakan bahwa tindakan evaluasi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh praktisi evaluasi atau bersifat praktis dan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti/*teorist*.

2.2.3. Tujuan Evaluasi

Menurut Stufflebeam dalam Mardikanto (2009), pada dasarnya tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya, dapat segera diambil langkah-langkah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

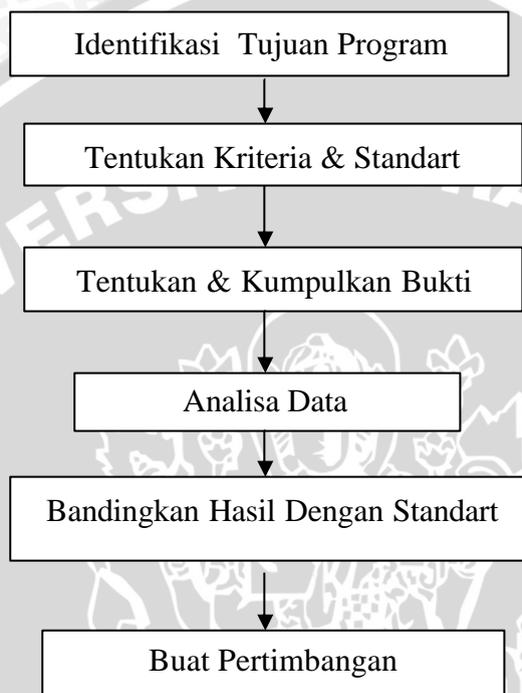
Untuk dapat dikatakan “berhasil” suatu program haruslah mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang dirancang sebagai sasaran dan kegiatan-kegiatan tersebut haruslah menghasilkan hasil-hasil yang semestinya dihasilkan olehnya. Ada beberapa tempat rangkaian ini dapat terpecah, pertama adalah bila implementasi sebenarnya dari program tersebut berbeda dari yang ada dalam rancangan. Kedua, sekalipun suatu program dilaksanakan dengan benar sesuai dengan rancangan, kemungkinan bisa saja program ini tidak mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi sasarannya. Ketiga, sekalipun kegiatannya sesuai dengan rencana, mungkin saja kegiatn tersebut mendatangkan hasil yang lain dari yang diharapkan. Hal tersebut melahirkan dua jenis penelitian evaluasi yakni evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Tujuan utama lain dari setiap kegiatan evaluasi adalah sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan dan membuat keputusan. Bila diaplikasikan dalam kegiatan, maka evaluasi bermanfaat untuk beberapa tujuan.

2.2.4 Teknik Evaluasi

Pada dasarnya teknik evaluasi menurut Soedarmanto (2000) dibagi menjadi dua jenis yakni evaluasi berdasarkan tujuan sebuah program dan evaluasi yang tidak terkait dengan tujuan program. Teknik kedua ini dibagi lagi menjadi dua model *eksperimental* dan model evaluasi *responsif*.

1. Evaluasi Berdasar pada Tujuan

Evaluasi berdasar pada tujuan merupakan teknik evaluasi yang paling populer dibanding dengan jenis evaluasi yang lain. Evaluasi ini dipelopori oleh Tyler pada tahun lima puluhan. Menurut evaluasi ini sebuah evaluasi tidak mungkin terpisah dari perencanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah bagan evaluasi yang didasarkan atas tujuan program.

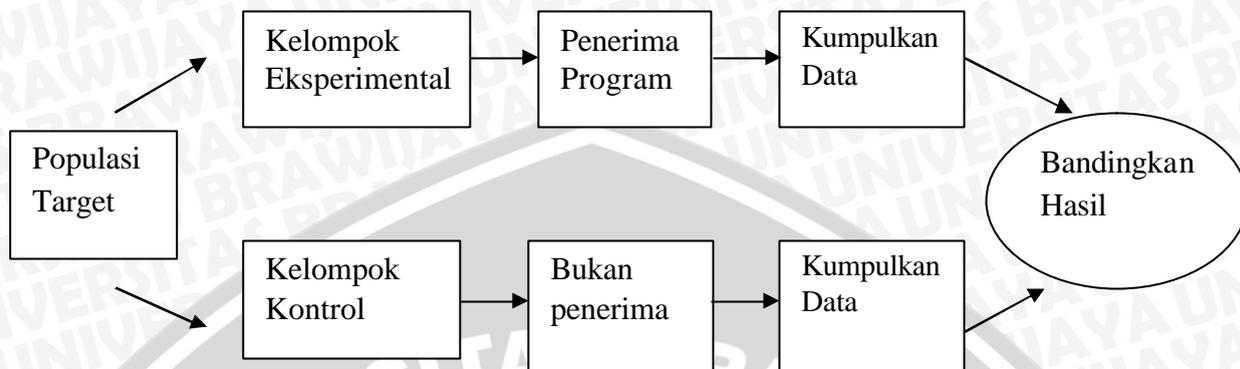


Gambar 1. Skema Evaluasi Tujuan

2. Teknik Evaluasi Eksperimental

Teknik Evaluasi Eksperimental mencoba membuat teknik evaluasi lain yang sama sekali tidak bergantung pada tujuan. Teknik ini mengandalkan pada pengukuran hasil yang dicapai oleh sebuah program. Pada dasarnya teknik evaluasi eksperimental ini mencari pola kaitan antara sebab dan akibat yaitu apakah program “X” menghasilkan hasil “Y”. untuk mengetahui itu maka dibuat dua kelompok yaitu kelompok perlakuan (penerima program) dan kelompok kontrol (bukan penerima program atau placebo). Pada akhir program hasil yang diperoleh akan dibandingkan. Jika perbedaan pada variabel yang dipelajari secara statistic berbeda, maka program tersebut dinilai mempunyai pengaruh yang nyata

terhadap kelompok masyarakat tertentu. Berikut adalah prinsip teknik evaluasi eksperimen.



Gambar 2. Teknik Evaluasi Model Eksperimen

3. Teknik Evaluasi Tanggapan

Dalam teknik ini, orang-orang yang berkaitan atau berhubungan dengan proyek dimintakan reaksinya dengan program tersebut. Tanggapan yang diberikan disajikan umpan balik sehingga rancangan evaluasi akan berubah-ubah mengikuti umpan balik yang masuk. Salah satu tipe evaluasi ini adalah *Reflective Apraisal of Program* (RAP) yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan penyuluhan di AS.

Menurut ahli lain teknik evaluasi ditinjau dari sejauhmana tingkat evaluasi yang dilakukan. Secara sederhana, evaluasi bisa dilakukan dengan teknik evaluasi sepiantas (*Casual Everyday Evaluation*) sedangkan pada tingkatan yang lebih serius, evaluasi dilakukan dengan menggunakan penelitian ilmiah (*Scientific Research*).

2.2.5 Pendekatan Dalam Pelaksanaan Evaluasi Program

Menurut Mardikanto (2009), ada beberapa pendekatan dalam pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ragam kegiatan evaluasi yang dilakukan, yaitu :

1. Pendekatan kebutuhan

Salah satu prinsip terpenting dalam penyusunan program adalah harus mencerminkan kebutuhan masyarakat sarasannya. Karena itu, di dalam pelaksanaan evaluasi terhadap program yang telah disusun, harus sebanyak

mungkin diperoleh data yang baik dari kelompok sasaran program yaitu masyarakat yang akan menjadi sasaran program itu sendiri.

2. Pendekatan informan kunci

Pengumpulan data yang dilakukan terhadap para informan kunci (key informan) yang biasanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat setempat yang menguasai informasi tentang keadaan masyarakat sasaran yang bersangkutan. Melalui model pendekatan ini, dinilai merupakan cara pendekatan yang paling murah, karena sasaran evaluasi benar-benar “pemimpin atau tokoh” masyarakat yang cukup memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam masyarakat.

3. Pendekatan forum masyarakat

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan warga masyarakat pada suatu forum pertemuan tertentu, dan di dalam pertemuan tersebut diajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan program yang direncanakan. Melalui pertemuan tersebut, semua petugas evaluasi dapat disebar di antara warga masyarakat yang dikumpulkan itu, sehingga tanpa diketahui oleh sasarannya.

4. Pendekatan indikator

Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan dengan hanya melakukan pengumpulan data dan fakta yang disesuaikan dengan tolak ukur tertentu (yang telah dilengkapi dengan alat analisis tertentu) yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan evaluasi. Dengan cara ini, hanya diperlukan sedikit data dan sasaran (melalui sampling), tetapi dengan penerapan analisis-analisis tertentu dapat dengan mudah diketahui gambaran umum tentang pendapat masyarakat tentang program yang direncanakan itu.

5. Survey dan sensus

Pendekatan seperti ini, dilakukan jika memang diperlukan data yang sangat rinci tentang keadaan nyata. Misalnya, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, dll.

2.3. Konsep Kemiskinan

2.3.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). BPS mengartikan bahwa kemiskinan

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi dari kebutuhan makanan dan non makanan.

Menurut Kuncoro (1996), menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena makin memburuknya perbandingan antara luas tanah dan jumlah individu serta memburuknya pola pemikiran atas tanah serta adanya dualisme sosial, ekonomi dan teknologi. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan dan kekuatan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan cara kerjanya, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada kebribadian bangsa dan nilai luhur universal dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan sosial, dan berkepribadian bangsa Indonesia.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomena sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah mengurus kemiskinan, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga. Menguatnya arus urbanisasi ke kota dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup (Scoott, 1981)

Suparlan (1984), menyatakan kemiskinan adalah suatu yang nyata dan dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan juga sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat bagi mereka yang tertolong tidak miskin, yaitu dari hasil pengamatan yang mereka lakukan baik secara sadar, mengenai berbagai gejala sosial yang terwujud dalam masyarakat. Kesadaran akan adanya kemiskinan bagi mereka yang tidak miskin biasanya terwujud pada waktu mereka membandingkan gejala-gejala sosial dengan tingkat kehidupan yang mereka punyai.

Mubyarto (2005), menyatakan bahwa sebagai penyebab kemiskinan dan ketinggalan desa dalam proses pembangunan adalah karena daerah perdesaan sebagian besar didiami oleh petani yang tetap miskin akibat teknologi primitif, tidak tersedianya irigasi, prasarana desa, kekurangan input pelengkap seperti pupuk dan karena warga desa tidak memiliki atau kekurangan modal. Maka tugas negara dalam proses pembangunan desa pada dasarnya adalah sebagaimana menyediakan input dan memberikan bantuan di bidang permodalan, memberikan subsidi, dan sebagainya.

Kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-faktor kemiskinan adalah gabungan dari faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk faktor eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya alokasi dana dan anggaran suatu kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal (Daniel Sulekale, 2003).

Menurut Dillon (2003), penyebab kemiskinan di Indonesia bukanlah kurangnya sumber daya alam, melainkan karena faktor non alamiah, yaitu kesalahan dalam kebijakan ekonomi. Khususnya kelompok-kelompok usaha yang sudah cukup baik dapat memanfaatkan situasi yang tercapai dengan lebih baik karena telah lebih siap secara teknis. Dalam perkembangannya, pertumbuhan untuk pemerataan tidak terjadi dengan mulus, bahkan kesenjangan sosial ekonomi makin dirasakan melebar dan akhirnya terjadi kerusuhan sosial yang memuncak dan mengakibatkan kemiskinan.

Suhandan (2005), kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen masalah dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Lukman (1995), menyatakan dalam pandangan *agrarian populisi* Negara menjadi penyebab utama kemiskinan, sedangkan berdasarkan pandangan masalah budaya dimana-mana orang menjadi miskin karena merasa tidak memiliki etos kerjayang tinggi, jiwa wiraswasta dan rendahnya pendidikan.

Secara umum masyarakat miskin ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan :

1. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, pendidikan dan kesehatan.
2. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha produktif.
3. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi.
4. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perilaku deskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan.
5. Tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk membebaskan diri dari dan mental dari bahaya kemiskinan serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Menurut Suparlan (1984), sebab utama yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, tetapi kemiskinan itu sendiri bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi tersebut dalam kenyataannya kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek-aspek yang dipunyai manusia dalam kehidupannya. Kerena itu kemiskinan dapat dilihat atau dikaji dari aspek-aspeknya atau permukaannya yang nampak menonjol sesuai dengan bidang ilmu atau tujuan pengkajian serta dalam luasnya jangkauan pengetahuan yang dipunyai oleh orang awam atau khalayak ramai. Aspek-aspek yang dilihat sebagai peranan yang menonjol dalam masalah kemiskinan adalah :

1. Kebudayaan dan sosialnya

Dalam pengertian ini, setiap manusia hidup dalam satuan-satuan sosial yang ada dalam masyarakatnya. Diantara satuan-satuan sosial yang nampak

batas-batasnya antara yang satu dengan yang lainnya adalah satuan-satuan sosial yang terwujud berdasarkan atas perbedaan kesanggupan untuk memperoleh dan memiliki kekayaan dan harta benda yang berharga.

2. Lingkungan

Menginterfensi lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dalam pengertian ini kebudayaan adalah suatu kumpulan pedoman atau pegangan yang operasional dalam menghadapi kehidupan yang nyata sebagaimana yang dihadapi oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

3. Pranata sosial

Pranata sosial adalah sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terwujud sebagai tradisi untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial utama yang tertentu, yang dirasakan diperlukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Dalam pranata-pranata sosial inilah aspek ekonomi yang nampak seolah-olah berdiri sendiri dan mewujudkan masalah-masalah lainnya, melibatkan berbagai aspek-aspek dan mewujudkan masalah-masalah lainnya.

Menurut BAPPENAS (2004), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, air bersih, pendidikan, pertahanan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa anam dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan atau laki-laki.

Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain :

1. *Basic Need Approach*, Pendekatan kebutuhan dasar.
2. *Income Approach*, Pendekatan melalui pendapatan.
3. *Humas Capability Approach*, Pendekatan kemampuan dasar.
4. Pendekatan obyek dan subyek.

Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan (*lack of oppoicantiy*) apabila seorang keluarga dan masyarakat tidak mampu memenuhi kabutuhan hidup minimum antara lain sandang, pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi. Ketidakmampuan ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan fisik dan mental seseorang, keluarga dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kemiskinan dari segi pendapatan adalah suatu tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang keluarga dan masyarakat yang berada dibawah ukuran tertentu atau garis kemiskinan, terutama disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset seperti lahan, modal dan kesempatan usaha.

Keterbatasan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk mnejalankan fungsi minimal masyarakat. Keterbatasan kemampunan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapatan atau pandangan orang miskin sendiri.

Menurut Webster (2005), sesungguhnya kemiskinan bikan di ukur dari pendapatan atau tingginya angka pengangguran atau tidak bekerja sama sekali. Sebab orang yang bekerja bukan berarti dia tidak miskin. Orang yang berpendapatan Rp. 750.000/bulan bisa saja memenuhi kebutuhannya minimal berupa pembelian beras, makanan berprotein dan bergizi, membayar biaya sekolah, sanitasi dan air bersih, membeli obat-obatan, sampai kepada kepemilikan rumah dengan estándar sehat. Tetapi belum tentu mereka sejahtera.

Menurut BAPPENAS (2004), indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari :

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya pasokan kalori penduduk miskin dan buruknya gizi bayi, balita dan ibu.
2. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mmutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesetana reproduksi, jarak fasilitas layanan kesehatan yang

relative jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedangkan masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas.

3. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas.
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan usaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh perempuan dan pembantu rumah tangga perempuan.
5. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering yang kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah sering kali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai.
6. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air bersih.
7. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidak pastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian.
8. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan.
9. Lemahnya jaminan rasa aman terhadap masyarakat, terutama yang dirasakan oleh masyarakat miskin.

10. Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran pertokoan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.
11. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar dari rumah tangga tidak miskin.

Menurut Bank Dunia kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan menghasilkan per hari. Ada 3 dimensi dalam permasalahan kemiskinan ini, yaitu :

1. Kemiskinan multidimensional, artinya suatu kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek yang meliputi aspek primer dan sekunder.
2. Aspek-aspek kemiskinan tersebut saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lain.
3. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individu maupun kolektif.

Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar dari kemiskinan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kegagalan kepemilikan tanah dan modal
2. Keterbatasan ketersediaan vahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana
3. Kebijakan pembangunan yang bisa perkotaan dan sektor
4. Adanya perbrdaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung
5. Adanya perbedaan sumber daya manusia.
6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan mental dalam masyarakat
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.

8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Pengelolaan SDA yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.3.2. Penggolongan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di golongan berdasarkan tingkat kesejahteraan hidupnya yang berdasarkan atas :

1. Model Tingkat Konsumsi

Sayogyo menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras perkapita sebagai indikator kemiskinan. Hampir sejalan dengan Sayogyo, BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaanya adalah bahwa BPS tidak menyertakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan "Garis Kemiskinan" (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan.

2. Model Kesejahteraan Keluarga

Metode ini dilakukan oleh BKKBN, dengan lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Bila BPS menggunakan rumah tangga, BKKBN melakukan program pendataan keluarga, yang dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengantasan kemiskinan.

3. Model Pembangunan Manusia

Pendekatan pembangunan manusia dipromosikan oleh lembaga PBB untuk memprogram pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah lewat BPS turut mengembangkan model pembangunan manusia, yang telah menjadikan model ini sebagai model pembangunan nasional yang disebut sebagai "Pembangunan Manusia Seutuhnya". Satu konsep yang melibatkan pembangunan secara komprehensif, dimana pembangunan harus menjadikan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Di dalam konsep ini juga dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal yang paling penting diantara pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah

hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi. Pendekatan sumber daya manusia sebagai faktor input dalam proses produksi, sehingga manusia lebih dilihat sebagai alat daripada sebagai tujuan. Pembangunan kesejahteraan masyarakat sering kali melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat daripada sebagai agen perubahan dari proses pembangunan. Dalam proses pembangunan. Dalam konsep pembangunan manusia, pertumbuhan tidak dilihat sebagai tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas tingkat kemiskinan dapat digolongkan berdasarkan kepemilikan dan kelayakan hidup yang dijalani oleh masyarakat.

2.3.3. Garis Kemiskinan

Menurut Sahdan (2005), kemiskinan telah membatasi hak-hak rakyat yang seharusnya di dapatkan untuk kelangsungan hidupnya, antara lain :

1. Memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan
2. Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum
3. Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman
4. Hak rakyat untuk mendapatkan akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau
5. Hak rakyat untuk mendapatkan akses dalam pendidikan
6. Hak rakyat untuk mendapatkan akses dalam kesehatan
7. Hak rakyat untuk memperoleh keadilan
8. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan public dan pemerintah
9. Hak rakyat untuk berinovasi
10. Hak rakyat untuk menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan
11. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintah dengan baik.

Bahwa inti masalah dari kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya terletak pada apa yang disebut dengan *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci perangkap kemiskinan terdiri dari lima unsure, yaitu :

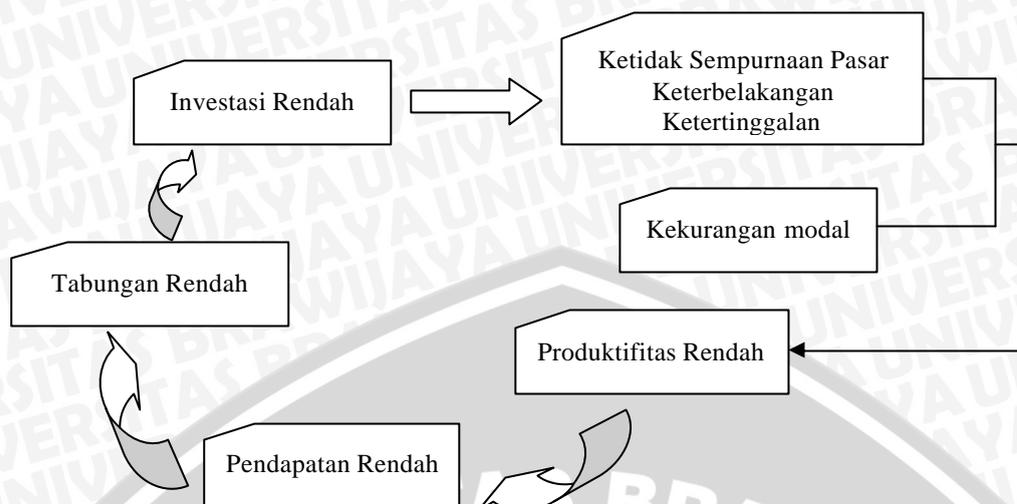
1. Kemiskinan itu sendiri
2. Kelemahan fisik
3. Keterasingan atau kadar isolasi
4. Kerentanan
5. Ketidak berdayaan

Dari kelima unsur di atas bahwa ketidak berdayaan mendapat perhatian utama. Kerentanan akan menimbulkan roda *poverty rackets* atau “penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin terpuruk di lembah kemiskinan.

Mengidentifikasi penyebab kemiskinan dilihat dari sudut pandang dari sisi ekonomi :

1. Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upah yang diperoleh rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.

Kemiskinan bisa dituntaskan apabila kita bisa memutuskan rantai lingkaran setan seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 3. Lingkaran Setan Kemiskinan

(Kuncoro, 1997)

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai upaya komprehensif. Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan sistem santunan sosial, yaitu :

1. Pusat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (puskesmas)
2. Pos pelayanan terpadu (posyandu)
3. Penempatan bidan desa
4. Program keluarga berencana (KB)

Melalui program transmigrasi, penduduk miskin dari daerah padat diberikan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomisnya. Pembukaan dan pengembangan tanah baru diharapkan dapat meningkatkan kerja para transmigran.

Menurut BPPN (1997), Program penanggulangan kemiskinan dapat menjadi gerakan masyarakat miskin menaggulangi kemiskinannya sejauh terciptanya kondisi berikut :

1. Aparat pemerintah harus mengembagkan pendekatan terhadap masyarakat bukannya pendekatan “serba perintah” atau “serba harus”.
2. Rakyat miskin diberdayakan menurut potensi dan nilai-nilai yang dimilikinya dengan pemberian informasi selengkap-lengkapmya tentang apa saja yang relevan.

3. Pengembangan ekonomi rakyat diutamakan, bukan saja dari segi dana tetapi juga dari segi kepedulian semua pihak yang mengarah kepada pengembangan ekonomi rakyat.
4. Aparat pemerintah semakin mantap keberdayaannya, baik keberdayaan segi teknis, ekonomi, maupun dalam sikap kepeduliannya terhadap penduduk miskin.

2.3.4. Kriteria Kemiskinan

Menurut Awang, dkk (1995), menjelaskan tentang kriteria kemiskinan menurut pamong desa dan tokoh masyarakat, antara lain :

1. Pemilikan lahan yang sangat sempit dan bahkan sebagian besar tidak memiliki lahan sama sekali.
2. Kelompok ini tinggal dirumah *gedeg* denganlantai tanah dan tanpa dilengkapi sarana MCK.
3. Penerangan listrik belum ada dan kalaupun ada didapatkan dari bantuan tetangga yang mampu.
4. Pendapatan tidak menentu
5. Tingkat pendidikan kelompok miskin sangat rendah karena rata-rata hanya sampai tingkat Sekolah Dasar atau huruf buta

Menurut Sahdan (2005), criteria kemiskinan dapat dilihat dari sekedar ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga penegrtian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan dalam suatu masyarakat.

Penyebab utama kemiskinan desa adalah :

1. Pengaruh faktor pendidikan yang rendah
2. Ketimpangan pemilikh lahan dan modal pertanian
3. Ketidak merataan investasi di sektor pertanian
4. Alokasi anggaran kredit yang rendah
5. Kebijakan pembangunan perkotaan
6. Pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional
7. Rendahnya produktifitas dan pembentukakn modal

8. Budaya menanbung yang belum berkembang dikalangan masyarakat desa
9. Tata pemerintah yang buruk umumnya masih berkembang di daerah pedesaan
10. Tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa
11. Rendahnya jaminan kesehatan.

Menurut BPS, kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang hanya memenuhi makananya kurang dari 2100 kalori perkapita perhari. Sedangkan indikatornya adalah :

1. Kemampuan membeli pakaian dalam setahun
2. Kepemilikan fasilitas air bersih
3. Prosentase pengeluaran terhadap penghasilan perbulan
4. Kepemilikan rumah
5. Fasilitas penerangan
6. Fasilitas sanitasi
7. Anak usia sekolah yang bersekolah
8. Sumber penghasilan
9. Kemampuan sarana kesehatan

Ciri-ciri penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ada lima, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya mereka tidak mempunyai faktor produksi seperti tanah, modal, atau keterampilan. Sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan asset produksi dengan kekuatan mereka sendiri.
3. Tingkat pendidikan rendah, waktu mereka tersisa untuk mencari nafkah untuk mnedapatkan tambahan penghasilan.
4. Kebanyakan mereka tinggal di daeah terpencil atau pedesaan
5. Mereka yang hidup di kota berusia mudadan tidak didukung atau memiliki bekal yang memadai.

2.3.5. Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan

Menurut Tim Pusat Penelitian pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) (1994), berbagai intervensi kebijaksanaan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini yang mencakup pengalihan sumber-sumber pembangunan dari pusat ke berbagai jenjang pemerintahan dalam bentuk inpres yang dimaksudkan untuk merangsang kegiatan ekonomi dan membuka kesempatan kerja di daerah, khususnya di daerah pedesaan, pengadaan berbagai macam pelayanan sosial dan peningkatan akses kaum miskin kepada pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan dan perluasan jangkauan perkreditan, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi pada umumnya dan prasarana pertanian pada khususnya, pengembangan kelembagaan yang secara langsung diarahkan untuk menaggulangi rakyat miskin. Kinerja pembangunan ini telah mengakibatkan makin sulitnya mencermati kaum miskin sehingga pemerintah berupaya untuk mengungkap keberadaan mereka melalui pengenalan kantong-kantong kemiskinan dikenal dengan Desa Tertinggal.

Lubis (1983), merumuskan siasat pembangunan yang berkiblat pada kebutuhan setidaknya ada tiga langkah penting yang harus diikuti, antara lain:

1. Kelompok-kelompok sasaran harus ditentukan secermat-cermatnya (golongan orang miskin di desa dan dikota atau petani kecil, buruh tani tidak bertanah dan sebagainya).
2. Penelitiann kuantitatif harus dilakukan untuk memperkirakan besar golongan penduduk yang berada dibawah garis kebutuhan pokok minimum dan perkiraan mengenai berapa besar produksi dan besar modal yang harus ditanam untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum ini dalam jangka waktu tertentu.
3. Alat-alat pelaksana harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana kebutuhan pokok minimum dapat dipenuhi melalui pasar yang syarat-syarat permintaannya mungkin menuju kearah lain. Ini menuntut perubahan harga, kendali pemerintah dalam beberapa bidang produksi dan penanaman modal dan sistem pelayanan baru untuk menjangkau

penduduk mesin dan untuk menarik produktivitas mereka dalam jangka panjang.

Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

1. Program penanggulangan kemiskinan akan berdampak baik apabila ada suasana tenang dan stabil
2. Program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan hidup
3. Program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan
4. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, yaitu program yang terus menerus berjalan dan dapat mandiri
5. Pendelegasian wewenang disentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan diupayakan pada tingkatan pemerintah serendah mungkin
6. Tekanan yang paling utama seyogyanya diserikan pada perbaikan pelakunya, terutama manusianya menyangkut aspek pendidikan dan kesehatan
7. Pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu, dan kelompok masyarakat lain yang memerlukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan upaya menanggulangi kemiskinan

Kebijakan dasar penanggulangan kemiskinan itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu, kebijakan yang tidak langsung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan kebijakan langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan.

1. Kebijakan Tidak Langsung

Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksud antara lain :

1. Suasana sosial politik yang tenang
2. Ekonomi yang stabil
3. Budaya yang berkembang

Selain di atas juga terdapat upaya penggolongan ekonomi makro yang berhati-hati melalui kebijaksanaan keuanagn dan perpajakan pengendalian tingkat inflasi diarahkan pada penciptaan situasi yang konduktif bagi upaya penyediaan kabutuhan dasar dengan harga yang terjamin oleh masyarakat miskin. Semua itu merupakan bagian dari upaya penaggulangna kemiskinan yng tidak langsung mengenai masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan atau tunjangan sosial.

2. Kebijakan Langsung

Kebijakan langsung diarahkan kepada peningkatan peran serta produktifitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar, serta pengembangan kegiatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian golongan masyarakat berpendapatan rendah.

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap terus-menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu peningkatan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Hal ini berarti pemberian kemandirian kesempatan yang luas bagi penduduk miskin untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah.

Dalam hubungan ini, Pemerintah Daerah harus mengambil peranan yang lebih besar lagi karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi dan kebituhan penduduk di kantong kemiskinan di daerahnya. Semakin dekat dengan kelompok sasaran pelaksana program yang ditujukan kepada masyarakat miskin akan semakin efektif.

2.4. Tinjauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

2.4.1. Pengertian PNPM

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong

prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2.4.2. Visi, Misi, Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

A. Visi, Misi, PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaanya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

B. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khusus meliputi :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan oleh masyarakat

- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
- g. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan

2.4.3. Sasaran PNPM Mandiri Pedesaan

A. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- a. Masyarakat miskin di perdesaan
- b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan
- c. Kelembagaan pemerintah local

2.4.4 Prinsip Dasar PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

- a. **Bertumpu pada pembangunan manusia.** Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berbampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.
- b. **Otonomi.** Pengertian prinsip ekonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensi negative dari luar.
- c. **Desentralisasi.** Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewajiban yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

- d. **Berorientasi pada masyarakat miskin.** Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- e. **Partisipasi.** Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
- f. **Kesetaraan dan keadilan gender.** Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam peranannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati .
- g. **Demokratis.** Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musrawarah dan mufakat.
- h. **Transparansi dan Akuntabel.** Pengertian prinsip adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara morak, teknis, legal maupun administratif.
- i. **Prioritas.** Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengantasan kemiskinan.
- j. **Keberlanjutan.** Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

III. KERANGKA TEORITIS

3.1. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dimana berbagai faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, jumlah anggota keluarga yang besar, sumber penghasilan utama yang tidak tetap merupakan ciri dan penyebab kemiskinan. Penduduk miskin semuanya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai kesempatan lebih baik. Penduduk miskin tidak mempunyai pendapatan yang memadai untuk kebutuhan hidup minimum, seperti : kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang digunakan untuk hidup dan bekerja dengan layak. Sehingga kecenderungan besar untuk menabung dan menanam modal adalah sangat tidak mungkin dalam tingkat pendapatan yang rendah. Kendala dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin adalah dalam pengembangan ekonomi rumah tangga, pemupukan modal dan pengembangan usaha.

Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa, pemerintah mengeluarkan Program Nasional Pembudayaan Masyarakat. Program ini difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi rumah tangga miskin (RTM), melembagakan pengelolaan dana bergulir, dan mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dengan menerapkan strategi – strategi pemberdayaan.

PNPM memiliki beberapa bentuk pemberdayaan, berhasil tidaknya suatu kegiatan pemberdayaan tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik intern maupun ekstern. Faktor internal diantaranya adalah umur, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan pengalaman berusaha. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah modal serta jaminan pemasaran yang meliputi distribusi pemasaran hasil baik pertanian maupun non pertanian.

Umur RTM akan mempengaruhi RTM dalam menerima, memanfaatkan informasi atau program baru, memanfaatkan media komunikasi baru, dimana RTM cenderung lebih memilih media elektronik seperti TV dalam menerima informasi baru dari pada memanfaatkan papan informasi dan selebaran. Selain itu

umur juga menentukan potensi bekerja dan kemampuan untuk pengembangan usaha yang meraka laksanakan selama ini.

Pendidikan umumnya mempengaruhi cara-cara berpikir RTM. Pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan RTM lebih dinamis dan responsif terhadap hal-hal baru, serta relatif cepat dalam megadopsi inovasi. Pendidikan juga menentukan bagaimana RTM menganalisa suatu hal yang baru dilihat dan didengarkannya melalui pertemuan kelompok dan kegiatan sosilaisasi program yang dilaksanakan diawal pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan jumlah anggota keluarga menunjukkan besarnya jumlah anggota keluarga yang harus di tangguang menunjukkan bahwa RTM harus mampu meningkatkan usaha yang dijalannya secara baik sehingga menghasilkan pendapatan tinggi yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.

Pangalaman RTM dalam berusaha akan melatar belakngi RTM dalam merespon informasi baru dalam kegiatan pemberdayaan. Dimana semakin lama RTM berusaha, maka RTM tersebut akan belajar dari penalamannya untuk mengadopsi teknologi baru yang didapat sehingga semakin banyak pengalaman mereka akan semakin mudah dalam menerima dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan adalah modal usaha RTM berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman serta tabungan. Kredit adalah pinjaman modal yang dikembalikan secara bergulir. Sedangkan tagungan adalah kegiatan menyisihkan sebagian hasil usaha untuk ditabung untuk keperluan tak terduga.

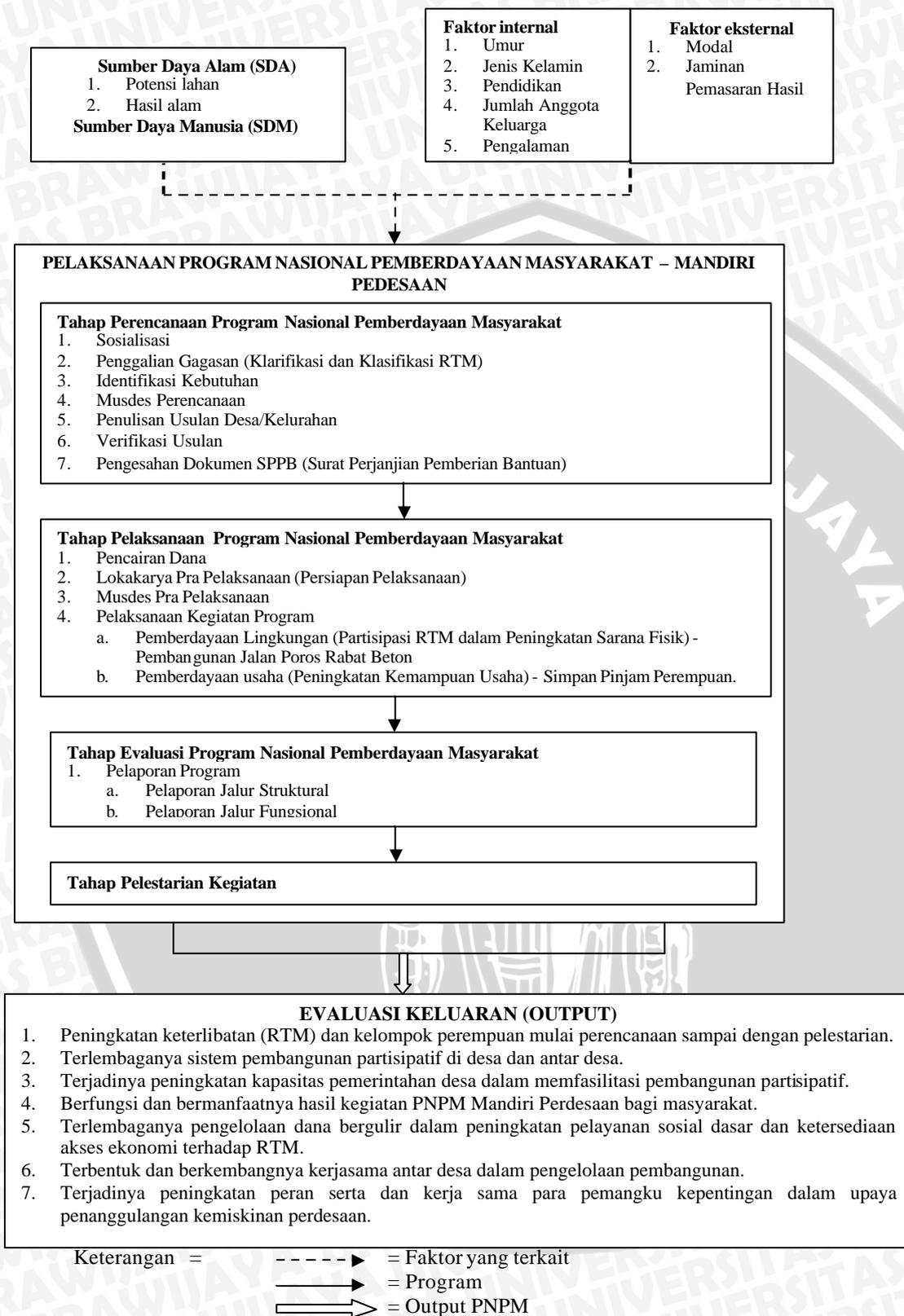
Sedangkan jaminan pemasaran hasil adalah bagaimana petani memasarkan produksi usahanya, apakah mealui kelompok, KUD, melalui perantara atatu tidak menentu yang terkadang dikonsumsi sendiri.

Dalam PNPM terdapat dua bentuk pemberdayaan yaitu (a) peningkatan sarana fisik, dan (b) peningkatan kemampuan usaha.

Berdasarkan pengamatan awal, bentuk pemberdayaan PNPM di kecamatan Sugio mendapatkan respon positif dari masyarakat dan RTM karena sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian sebagian besar masyarakat masih ada yang belum berpartisipasi terhadap adanya pelaksanaan program.

Penelitian ini dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang perkembangan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Keluaran dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pelaksanaan PNPM dalam kerangka pemberdayaan masyarakat selanjutnya. Sehubungan dengan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang **‘Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Pedesaan di Desa Supenuh)’**.





Gambar 5. Kerangka pemikiran Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan. (Studi pada Pelaksanaan Program PNPM– Mandiri Pedesaan di Desa Supenuh-Sugio-Lamongan).

3.2. Batasan Masalah

Evaluasi yang diteliti adalah evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdapat di desa Supenuh yang merupakan daerah sasaran pelaksanaan dan pembinaan program pada tahun 2009.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penegasan terhadap konsep pengertian yang operasional dari setiap istilah/konsep yang terdapat dalam pengertian.

1. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
2. Evaluasi adalah kegiatan sistematis yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu objek berdasarkan pedoman yang telah ada.
3. Tahap perancangan adalah tahap dalam penyusunan usulah kegiatan, dimana rangkaian kegiatannya meliputi : sosialisasi, klarifikasi dan klasifikasi RTM, identikasi kebutuhan, Musdes Perencanaan, Penulisan Usulan Desa/Kelurahan, Verifikasi Usulan, dan Pengesahan Dokumen SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan).
4. Tahap pelaksanaan adalah proses atau tahapan kegiatan program yang akan dilaksanakan, tahap – tahapannya meliputi : pencairann dana, lokakarya pelaksanaan, musdes pra pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan (bentuk kegiatan) yang meliputi : Partisipasi RTM dalam Peningkatan Sarana Fisik - Pembangunan Jalan Poros Rabat Beton dan Peningkatan Kemampuan Usaha - Simpan Pinjam Perempuan.
5. Tahap pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat.
6. Tahap evaluasi program adalah penentu hasil yang dicapai melalui beberapa kegiatan yang dirancang dalam PNPM untuk mencapai tujuan.

7. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan meliputi :

1) Faktor internal, meliputi :

- a. Umur, merupakan lamanya hidup responden yang terhitung sejak lahirnya sampai dilakukannya penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Indikator ini dipilih karena diduga umur mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Semakin muda umur biasanya mempunyai semangat dan keingin tahun yang besar dan semakin tua umur maka semangat dan keingin tahunnya menurun.
- b. Jenis Kelamin adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu. Jenis kelamin dikaitkan pula dengan aspek gender, karena terjadi diferensiasi peran sosial yang dilekatkan pada masing-masing jenis kelamin. Pada masyarakat yang mengenal "machoisme", umpamanya, seorang laki-laki diharuskan berperan secara maskulin dan perempuan berperan secara feminin.
- c. Pendidikan, adalah jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh RTM responden melalui bangku sekolah. Pendidikan disini adalah pendidikan terakhir yang ditempuh pada saat wawancara. Indikator ini dipilih diduga pendidikan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Dengan semakin tinggi pendidikan maka lebih termotivasi untu menerima suatu inovasi dan semakin rendah tingkat pendidikan maka menjadi kurang termotivasi dalam menerima suatu inovasi, dengan pendidikan yang tinggi akan membuat wawasan dan pengetahuan RTM semakin luas sehingga akan menjadikan RTM mempunyai sikap yang terbuka akan hal baru.
- d. Jumlah anggota rumah tangga adalah jumlah individu yang tinggal satu rumah dengan biaya hidup ditanggung oleh kepala keluarga. Indikator ini dipilih jumlah tanggungan keluarga diduga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Karena semakin banyak jumlah tanggungan keluarga berarti tingkat ketergantungan

semakin tinggi pula, sehingga akumulasi modal akan banyak diserap dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga keluarga tidak untuk berusaha.

- e. Pengalaman berusaha adalah peristiwa masa lampau dalam kehidupan mengelola usaha yang diukur dengan jumlah tahun RTM menggeluti usahanya. Indikator ini dipilih karena diduga pengalaman mempengaruhi motivasi seseorang. Pengalaman yang bersifat menguntungkan akan mendorong individu telah termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang optimal.
- 2) Faktor internal, meliputi :
- a. Modal berusaha adalah besarnya dana yang dimiliki oleh RTM untuk membuka usaha. Semakin banyak modal yang tersedia maka akan semakin besar usaha yang dirintis.
 - b. Jaminan pemasaran hasil adalah jaminan untuk mendistribusikan hasil produksi usaha RTM. Dengan adanya jaminan pemasaran atau distribusi hasil produksi maka semakin tinggi motivasi RTM untuk memproduksi barang secara optimal.
8. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

3.3.2 Variabel Penilaian

Untuk menjawab tujuan penelitian yaitu pelaksanaan program PNPM-MP dan faktor-faktor yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada Program PMPM-MP akan dijawab secara kualitatif dengan menggunakan alat bantu analisis menggunakan skala likert.

Variabel penilaian tersebut dilakukan melalui wawancara dengan responden menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Kuisioner dibuat dengan memberi beberapa alternatif jawaban yang mempunyai skor.

Adapun variabel penilaian adalah sebagai berikut :

1. Variabel faktor-faktor yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa Supenuh.

Tabel 1. Variabel faktor-faktor yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa Supenuh.

No.	Keterangan	Skor
I.	Faktor Internal	
1.	Umur Responden	
a.	< 30 tahun	3
b.	30 – 50 tahun	2
c.	> 50 tahun	1
2.	Jenis Kelamin	
•	Laki-laki	
•	Perempuan	
3.	Pendidikan	
a.	SLTA	3
b.	SLTP	2
c.	SD	1
4.	Jumlah Anggota Keluarga	
a.	> 3 orang	3
b.	3 – 5 orang	2
c.	> 5 orang	1
5.	Pengalaman Berusaha	
a.	> 2 tahun	3
b.	1 – 2 tahun	2
c.	< 1 tahun	1
II	Faktor Eksternal	
1.	Modal	
a.	Kredit	3
b.	Tabungan	2
c.	Tidak ada modal	1
2.	Jaminan Pemasaran Hasil	
a.	Dijual sendiri	3
b.	Dijual ke tengkulak	2
c.	Dikosumsi sendiri	1
Skor Maksimal		18
Skor Minimal		6

2. Variabel Proses Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. Variabel pelaksanaan Program di desa Supenuh.

No.	Keterangan	Skor
I.	Tahap Perencanaan	
	1) Sosialisasi di desa/kelurahan dilaksanakan dalam bentuk musdes dan diikuti unsure RT/RW, unsur perempuan, unsure LKMD, wakil RTM, pemerintah dan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Agenda musdes sosialisasi meliputi : 1. Penjelasan program oleh kepala desa. 2. Kegiatan sosialisasi melalui papan informasi, media hiburan, pamphlet, dan pameran 3. TPK bersama-sama UPK melakukan sosialisasi kepada RTM sasaran program a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	3 2 1
	2) Klarifikasi RTM Kegiatan mengecek kesesuaian data RTM secara obyektif di lapangan. 1. Kegiatan diskusi kelompok terfokus 2. Musyawarah ditingkat RT/RW/Dusun 3. Melakukan pengamatan secara langsung dan menayakan kepada RTM. a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	3 2 1
	3) Klasifikasi RTM Klasifikasi RTM adalah mengelompokkan RTM hasil klarifikasi kedalam kategori RTM Berpotensi dan RTM Rentan. Kejadiannya meliputi : 1. Kegiatan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif 2. Kegiatan membukak usaha baru 3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana. a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	3 2 1
	4) Identifikasi kebutuhan Identifikasi kebutuhan adalah aktivitas menggali usulan kegiatan B. Pemberdayaan usaha (simpan pinjam perempuan) 1. Penjelasan tata cara pinjaman melalui forum perwakilan RTM 2. Pembentukan pokmas secara sukarela dari kalangan RTM 3. Pembahasan pengelolaan usaha a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas	3 2

<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	1
<p>C. Kegiatan pemberdayaan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan rumah tangga RTM dan penyediaan sarana air bersih 2. Pengembangan fasilitas umum 3. Pembangunan fasilitas fisik yang menunjang ekonomi desa. 	3
<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	2
<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	1
<p>5) Musdes perencanaan</p> <p>Musdes dihadiri oleh perwakilan RTM, wakil dan tokoh masyarakat lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemaparan hasil identifikasi kebutuhan masing – masing Dusun/kelompok 2. Kegiatan musyawarah dalam penetapan usulan kegiatan 3. Kegiatan pembentukan TPK 	3
<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	2
<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	1
<p>6) Penulisan usulan desa/kelurahan</p> <p>Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penulisan usulan pemberdayaan usaha 2. Kegiatan penulisan usulan pemberdayaan manusia 3. Kegiatan penulisan usulan pemberdayaan lingkungan 	3
<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	2
<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	1
<p>7) Verifikasi usulan</p> <p>Materi verifikasi membahas usulan kegiatan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis kegiatan 2. Kesesuaian anggaran 3. Jadwal pelaksanaan 	3
<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	2
<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	1
<p>8) Pengesahan Dokumen SPPB.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah sebelum melakukan pengesahan dokumen. 2. Pengesahan SPPB dilakukan oleh ketua TPK, PjOK, Ketua UPK, kades, dan camat. 3. Melampirkan dokumen SPPB 	3
<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	2
<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas 	1

II	Tahap Pelaksanaan	
	1) Pencairan dana	
	Dana bantuan PNPM dilakukan oleh UPK dalam Bentuk :	
	1. Pinjaman modal kepada Pokmas	
	2. Kegiatan pemberdayaan manusia	
	3. Kegiatan pemberdayaan lingkungan	
	a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas	3
	b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	2
	c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	1
	2) Lokakarya pra pelaksanaan	
	Lokakarya pra pelaksanaan dilaksanakan dikabupaten dengan agenda :	
	1. Penjelasan persiapan pelaksanaan	
	2. Tukar pendapat, pemberian saran pada desa	
	3. Koordinsai dan konsultasi dengan berbagai dinas.	
	a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas	3
	b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	2
	c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	1
	3) Musdes pra pelaksanaan	
	Agenda Musdes pra pelaksanaan antara lain :	
	1. Penjelasan alokasi penggunaan dana yang diterima Desa oleh pemerintah desa	
	2. Penjelasan mekanisme pelayanan pinjaman modal usaha kepada pokmas	
	3. Pembentukan TPK dan rencana realisasi masyarakat.	
	a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas	3
	b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	2
	c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	1
	4) Pelaksanaan kegiatan	
	A. Kegiatan pemberdayaan usaha (simpan pinjam perempuan)	
	1. Pelayanan permohonan pinjaman	
	2. Analisis kelayakan usaha dan peminjaman	
	3. Penetapan pinjaman pokmas yang layak didanai dan penandatanganan pinjaman.	
	a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas	3
	b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	2
	c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	1
	B. Kegiatan Pemberdayaan lingkungan (perbaikan sarana prasarana – jalan poros rabat beton)	
	1. Mengoptimalkan partisipasi dan pendayagunaan potensi swadaya masyarakat.	
	2. kegiatan diharapkan mampu menyerap pengangguran yang ada di desa/kelurahan	
	3. kegiatan dilakukan secara swakelola oleh TPK	
	a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas	3
	b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	2
	c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	1

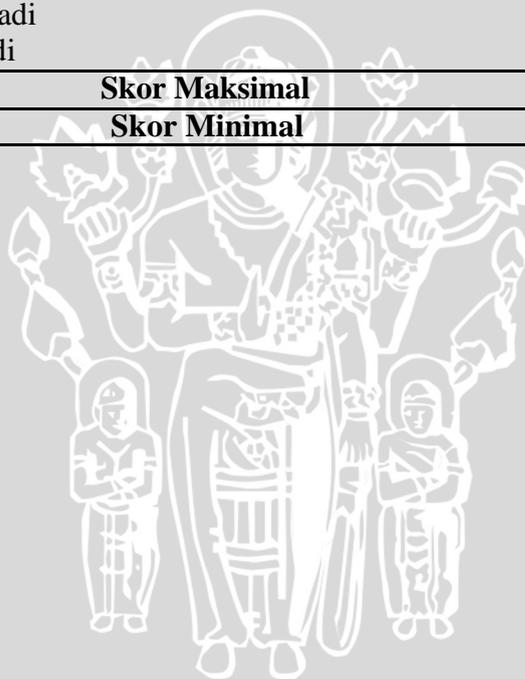
III	Tahap Pelestarian Kegiatan	
	Pelestarian program dilaksanakan dengan kegiatan :	
	1. Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan	
	2. Mewujudkan profesionalisme kinerja organisasi dan manajemen UPK	
	3. Penguatan UPK pasca program diarahkan untuk terwujudnya Badan Usaha Milik Desa (BUMD)	
	a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas	3
	b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	2
	c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	1
IV	Tahap Evaluasi	
	Pertanggungjawaban Program	
	1) Pelaporan jalur structural (pertanggungjawaban administratif)	
	1. Membuat laporan proses pelaksanaan program	
	2. Membuat laporan hasil kegiatan program	
	3. Realisasi penggunaan dana program	3
	a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas	2
	b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	1
	c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	
	2) Pelaporan jalur fungsional (pertanggungjawaban publik)	
	1. Penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program dalam musdes pertanggungjawaban.	
	2. Hasil musdes pertanggungjawaban dituangkan dalam berita acara	
	3. Hasil musdes pertanggungjawaban dilaporkan UPK kepada kabupaten/kota.	3
	a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas	2
	b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	1
	c. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas	
Skor Maksimal		51
Skor Minimal		17

Tabel 3. Variabel Output pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

No	Keterangan	Skor
1.	Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai dari perencanaan sampai dengan pelestarian.	
	1) Bagaimana tingkat kemampuan bapak/ibu menyusun perencanaan kerja PNPM ?	
	a. Rencana disusun dan diketahui dengan baik	3
	b. Rencana disusun dengan baik tetapi tidak diketahui.	2
	c. Rencana kelompok tidak tersusun dengan baik.	1
	2) Apakah bapak/ibu ikut menyusun dan mengetahui peraturan kelompok yang telah disepakati ?	
	a. Peraturan disusun dan diketahui	3
	b. Peraturan disusun tetapi belum diketahui	2
	c. peraturan belum disusun dan tidak diketahui	1
	3) Apakah bapak/ibu mengetahui waktu dan tempat pertemuan kelompok?	
	a. Waktu dan tempat pertemuan diketahui	3
	b. Waktu dan tempat pertemuan belum diketahui	2
	c. Waktu dan tempat pertemuan tidak diketahui	1
	4) Bagaimana tingkat kemampuan kerjasama kelompok bapak/ibu dalam PNPM ?	
	a. Adanya kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata	3
	b. Kurang adanya kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata	2
	c. Belum adanya kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata	1
	5) Apakah bapak/ibu memanfaatkan sarana prasarana yang telah dibangun dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dengan baik ?	
	a. Memanfaatkan sarana prasarana dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan	3
	b. Kurang memanfaatkan sarana prasarana dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan	2
	c. Tidak memanfaatkan sarana prasarana dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan	1
2	Terlembaganya system pembangunan partisipatif di desa dan antar desa.	
	a. Ya	3
	b. Kurang merasak	2
	c. Tidak merasakan	1
3.	Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif	
	1) Dengan adanya PNPM apakah bapak/ibu ikut serta dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif di desa?	

	a. Ya	3
	b. Kurang memfasilitasi	2
	c. Tidak memfasilitasi	1
	2) Jika “IYA” sebagai apa bapak/ibu dalam pelaksanaan PNPM ?	
	Kepala Desa	
	a. Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa	3
	b. Pembina dan pengendali kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.	2
	c. Pengendali kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.	1
	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
	a. Pengawas proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program di desa	3
	b. Pengawas proses dari tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan.	2
	c. Pengawas proses dari tahapan PNPM Mandiri Perdesaan dari perencanaan dan pelaksanaan.	1
	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	
	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan.	3
	b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi.	2
	c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM di desa	1
	Tim Penulis Usulan (TPU)	
	a. Menyiapkan dan menyusun gagasan – gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan.	3
	b. Menyiapkan gagasan – gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.	2
	c. Menyiapkan gagasan – gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah khusus perempuan saja.	1
4.	Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat Menurut bapak/ibu apakah hasil kegiatan PNPM dapat berfungsi dan dirasakan manfaatnya ?	
	a. Ya	3
	b. Kurang berfungsi dan dirasakan manfaatnya	2
	c. Tidak berfungsi dan dirasakan manfaatnya	1
5.	Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM. Menurut bapak/ibu apakah pengelolaan dana bergulir dapat berjalan dengan baik dan tersedianya akses ekonomi ?	
	a. Ya	3
	b. Kurang dapat berjalan dengan lancar	2

6.	<p>c. Tidak berjalan dengan lancar</p> <p>Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan</p> <p>Dengan adanya PNPM menurut bapak/ibu apakah terjadi hubungan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan di desa dan antar desa?</p> <p>a. Terjadi hubungan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan di desa dan antar desa</p> <p>b. Kurang terjadi kerjasama dalam pengelolaan pembangunan di desa dan antar desa.</p> <p>c. Tidak kerjasama dalam pengelolaan pembangunan di desa dan antar desa</p>	<p>1</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>
7.	<p>Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.</p> <p>Dengan adanya PNPM menurut bapak/ibu apakah terjadi peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan?</p> <p>a. Iya</p> <p>b. Kurang terjadi</p> <p>c. Tidak terjadi</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>
Skor Maksimal		45
Skor Minimal		15



IV. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Faisal (2001) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 1990). Sedangkan analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2008) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Supenuh, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan bahwa Desa Supenuh ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan program PNPM-MP. Selain itu diketahui bahwa desa ini mampu mengangkat pendapatan kelompok masyarakat dari yang terendah menjadi desa yang tingkat pendapatan masyarakatnya menjadi lebih tinggi dibanding desa sasaran lainnya. Desa Supenuh juga dalam pelaksanaannya selalu aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PNPM sehingga dalam hal ini penulis tertarik menjadikan Desa tersebut sebagai lokasi penelitian.

4.3 Metode Penentuan Responden

Penentuan responden pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *survey*, dimana data yang dipergunakan diambil dari sebagian anggota populasi yang *representative* mewakili seluruh anggota populasi. Responden dalam penelitian ini adalah sebagian dari anggota PNPM di desa Supenuh, kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan yang aktif dalam kegiatan yang dilakukan PNPM-MP dan yang mengikuti program penguliran dana dalam kegiatan SPP yang tergabung dalam kelompok masyarakat “Ganesha” yang berjumlah 20 orang. Penelitian ini juga mengambil 10 orang *key informan* sebagai informasi lebih jelas mengenai topik penelitian.

4.4 Metode Pengumpulan Data

4.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data Primer dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu :

1. Wawancara secara mendalam

Wawancara secara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan langsung bertatap muka dengan informan atau responden.

2. Wawancara dengan menggunakan kuesioner

Kuesioner ini berfungsi untuk memperoleh data primer yang berasal dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan dibuat dalam bentuk daftar yang disesuaikan dengan variabel yang akan diteliti dan tujuan yang ingin dicapai.

3. Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung tentang fenomena yang ada pada obyek penelitian untuk mengetahui secara langsung aktivitas pelaksanaan program dan berhubungan dengan variabel yang diteliti.

4.4.2 Data Skunder

Pengumpulan data skunder dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan berdasarkan dokumen yang ada, yaitu dokumen resmi dari dinas atau instansi serta lembaga atau organisasi terkait yang berkaitan dengan penelitian. Pencatatan dokumen dan sumber data yang didapat berupa catatan dokumen.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data skunder menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan pada dokumen resmi yang terdapat di kantor kecamatan di bawah naungan Badan Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Lamongan. Badan Pusat Statistik dan kantor Desa Supenuh.

5.6 Metode Analisa Data

5.6.1 Analisis Data Deskriptif Kualitatif

Dalam menjawab tujuan penelitian ini maka analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dengan kata – kata yang sistematis dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat hubungan antara fenomena yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman (1992) tahapan peneliti dalam menganalisa data secara kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dilapang langsung disusun rapi, terperinci dan sistematis. Setiap selesai mengumpulkan data, data tersebut perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

2. Penyajian data

Data yang telah diperoleh dipilih kemudian dikelompokkan dan disusun menurut kategori yang sejenis untuk ditampilkan sesuai dengan focus permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data direduksi. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk bagan, tabel maupun deskripsi.

3. Penarikan kesimpulan

Data yang didapat kemudian diambil kesimpulan. Verifikasi dilakukan untuk menggali data ulang yang pernah dikumpulkan atau mencari data lain untuk menguji kebenaran fenomena yang terjadi dilapang. Berdasarkan hasil editing, data melalui alur di atas kemudian data ditampilkan faktanya dari beberapa kutipan pertanyaan responden yang diperoleh dilapang (situasi).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

1. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat kecamatan Sugio dengan cara deskriptif dengan pemberian skoring yaitu skala likert. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut :

a. Menentukan Kelas (K)

Kelas yang ditetapkan adalah 3 kelas ($k=3$), yaitu : a) tinggi; b) sedang; c) rendah

b. Menentukan Kisaran (R)

Kisaran adalah selisih antara nilai pengamatan (skor) tertinggi dan nilai pengamatan (skor) terendah kisaran di dapatkan dari persamaan berikut :

$$R = X_t - X_r \dots\dots\dots(1)$$

Dengan : R = Kisaran

X_t = Nilai Tertinggi

X_r = Nilai Terendah

c. Menentukan Selang Kelas (I)

Selang kelas adalah jarak atau besarnya nilai antar kelas yang telah ditentukan. Besarnya selang kelas di dapatkan berdasarkan persamaan :

$$I = R/K \dots\dots\dots(2)$$

Dengan : I = Selang Kelas

R = Kisaran

K = banyaknya kelas (skor tertinggi – skor terendah)

Nilai pengamatan tertinggi = 18

Nilai pengamatan terendah = 6

$$I = 18 - 6 / 3 = 4$$

Berdasarkan indikator-indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan meliputi faktor internal (umur responden, jumlah anggota keluarga, pengalaman) dan faktor eksternal (modal dan jaminan pemasaran hasil) dapat dikategorikan dengan skor sebagai berikut :

Tinggi apabila dengan skor = 14,1 – 18 atau 78,33% - 100%

Sedang apabila dengan skor = 10,1 – 14 atau 56,11% - 77,78%

Rendah apabila dengan skor = 6 – 10 atau 33,33% – 55,56 %

2. Untuk menganalisis proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan sugio dilakukan secara deskriptif dengan pemberian skoring yaitu skala likert. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan Kelas (K)

Kelas yang ditetapkan adalah 3 kelas (k=3), yaitu : a) tinggi; b) sedang; c) rendah

- b. Menentukan Kisaran (R)

Kisaran adalah selisih antara nilai pengamatan (skor) tertinggi dan nilai pengamatan (skor) terendah kisaran di dapatkan dari persamaan berikut :

$$R = X_t - X_r \dots\dots\dots(3)$$

Dengan: R = Kisaran
 X_t = Nilai Tertinggi
 X_r = Nilai Terendah

- c. Menentukan Selang Kelas (I)

Selang kelas adalah jarak atau besarnya nilai antar kelas yang telah ditentukan. Besarnya selang kelas di dapatkan berdasarkan persamaan :

$$I = R/K \dots\dots\dots(4)$$

Dengan: I = Selang Kelas
 R = Kisaran
 K = banyaknya kelas (skor tertinggi – skor terendah)

Nilai pengamatan tertinggi = 57
 Nilai pengamatan terendah = 21
 $I = 57 - 21 / 3 = 12$

Berdasarkan indikator-indikator dari bentuk kegiatan pemberdayaan dapat dikategorikan dengan skor sebagai berikut :

Tinggi apabila dengan skor = 39,7 – 51 atau 77,84% - 100%

Sedang apabila dengan skor = 28,3 – 39,6 atau 55,50% - 77,64%

Rendah apabila dengan skor = 17 – 28,3 atau 33,33% – 55,49 %

3. Untuk menganalisis output pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan sugio dilakukan secara deskriptif dengan pemberian skoring yaitu skala likert. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut :

a. Menentukan Kelas (K)

Kelas yang ditetapkan adalah 3 kelas ($k=3$), yaitu : a) tinggi; b) sedang; c) rendah

b. Menentukan Kisaran (R)

Kisaran adalah selisih antara nilai pengamatan (skor) tertinggi dan nilai pengamatan (skor) terendah kisaran di dapatkan dari persamaan berikut :

$$R = X_t - X_r \dots\dots\dots(3)$$

Dengan: R = Kisaran
 X_t = Nilai Tertinggi
 X_r = Nilai Terendah

c. Menentukan Selang Kelas (I)

Selang kelas adalah jarak atau besarnya nilai antar kelas yang telah ditentukan. Besarnya selang kelas di dapatkan berdasarkan persamaan :

$$I = R/K \dots\dots\dots(4)$$

Dengan: I = Selang Kelas
 R = Kisaran
 K = banyaknya kelas (skor tertinggi – skor terendah)

Nilai pengamatan tertinggi = 45

Nilai pengamatan terendah = 15

$$I = 45 - 15 / 3 = 10$$

Berdasarkan indikator-indikator dari bentuk kegiatan pemberdayaan dapat dikategorikan dengan skor sebagai berikut :

Tinggi apabila dengan skor = 36 – 45 atau 80% - 100%

Sedang apabila dengan skor = 26 – 35 atau 57,78% - 77,78%

Rendah apabila dengan skor = 10 – 25 atau 33,33% – 55,55%

V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

5.1 Letak Geografis Desa

5.1.1 Keadaan Geografis dan Batas Administratif

Desa Supenuh merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan sugio, kabupaten Lamongan dengan luas wilayah 168,8 Ha yang terdiri dari perkampungan seluas 26,3 Ha dan persawahan seluas 142,5 Ha. Desa ini terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Sumampir, dusun Randu Tawang, dusun Supenuh dan dusun Sumambung.

Batas-batas wilayah desa Supenuh dengan desa-desa sekitarnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Desa Bakalrejo
Sebelah Timur	: Desa Kalipang
Sebelah Utara	: Desa Lebakadi
Sebelah Selatan	: Desa Karang Sambigalih

5.2 Keadaan Penduduk

5.2.1 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Supenuh merupakan wilayah yang mempunyai potensi sumber daya manusia cukup besar, dimana menurut data yang diperoleh jumlah penduduk Desa Supenuh tahun 2010 tercatat berjumlah 1912 jiwa. perincian jumlah penduduk Desa Supenuh berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Supenuh

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	929	48,59
2.	Perempuan	983	51,51
Total		1912	100,00

Sumber : Data Monografi Desa 2010

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa komposisi penduduk desa Desa Supenuh didominasi oleh perempuan sebanyak 983 jiwa atau 51,51 % dan total penduduk perempuan sebanyak 929 jiwa atau 48,59% dari total jumlah penduduk Desa Supenuh.

Jumlah penduduk yang cukup besar di Desa Supenuh sangat perlu ditingkatkan peran sertanya optimal agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang, namun peran serta tersebut harus didukung oleh daya kreatifitas serta motivasi dan keinginan untuk maju yang tinggi dari penduduk itu sendiri.

5.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur

Umur mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan perilakunya dalam berpartisipasi pada aktivitas kelompok serta minat untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan usahanya. Berdasarkan umur, distribusi penduduk Desa Supenuh dibedakan berdasarkan kelompok umur dan kelamin. Untuk lebih jelasnya distribusi umur dan Jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Umur kelompok Jenis Kelamin di desa Supenuh

No.	Usia (tahun)	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	0 – 5	90	160	190	9,94
2	6 – 15	170	180	350	18,30
3	16 – 25	160	162	322	16,85
4	26 – 35	183	187	370	19,35
5	36 – 50	220	224	444	23,22
6	50 keatas	115	121	236	12,34
Total		718	1034	1912	100,00

Sumber : Data Monografi Desa 2010

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa populasi penduduk menurut umur kelompok jenis kelamin di desa Supenuh yang paling banyak adalah penduduk pada usia 36 – 50 tahun yaitu sebesar 444 jiwa atau sekitar 23,34% dari keseluruhan penduduk usia kelompok jenis kelamin. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadikan penduduk di desa Supenuh dapat dengan mudah menerima hal-hal baru, mudah untuk diajak berkomunikasi dan memiliki kemauan serta kemauan untuk turut serta dalam pembangunan wilayahnya. Sedangkan populasi penduduk menurut umur kelompok jenis kelamin yang paling sedikit adalah penduduk pada usia 0 – 5 tahun yaitu sebesar 190 jiwa atau sebesar 9,94% dari keseluruhan usia kelompok jenis kelamin.

5.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat penduduk di Desa Supenuh dapat dikatakan sedang, hal ini dikarenakan di Desa Supenuh terdapat 187 jiwa penduduk yang tidak tamat SD. tingkat sosial ekonomi yang beragam menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menempuh pendidikan formal. Pada tabel berikut ini akan dijelaskan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Supenuh.

Tabel 6. Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Desa Supenuh

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak tamat SD	187	9,78
2	SD/MI	737	38,55
3	SMP/MTs	412	21,55
4	SMU/MA	510	26,67
5	S1/DIPLOMA	66	3,45
Total		1912	100,00

Sumber : Data Monografi Desa 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Supenuh yang paling banyak adalah SD/MI yaitu sebesar 737 jiwa atau sebesar 38,55 % dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan penduduk yang tidak tamat SD sebesar 187 jiwa atau 9,78% . Lulus SMP/MTs sebesar 412 jiwa atau sebesar 21,55%. Lulus SMU/MA sebesar 510 jiwa atau sebesar 26,67% dan yang lulus DIPLOMA dan S1 sebesar 66 jiwa atau sebesar 3,45% dari total jumlah penduduk.

5.2.4 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian yang dimaksud disini adalah semua kegiatan yang memberikan pendapatan dalam rumah tangga. di Desa Supenuh terdapat berbagai mata pencaharian seperti petani, buruh tani, PNS, tukang, TNI, pedagang, buruh pabrik, dll. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian ini berguna untuk mengetahui jenis pekerjaan apa yang ditekuni oleh penduduk setempat. Selain itu juga berguna untuk mengetahui gambaran aktivitas penduduk dan peranan usaha-usaha ekonomi di daerah tersebut yang menunjang kehidupan masyarakat setempat.

Distribusi penduduk Desa Supenuh berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Supenuh

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	705	72,23
2	Buruh tani	78	7,99
3	PNS	46	4,71
4	Tukang	27	2,77
5	TNI	8	0,82
6	Pedagang	81	8,30
7	Buruh pabrik	25	2,57
9	Lain – lain	6	0,61
Total		976	100,00

Sumber : Data Monografi Desa 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Supenuh bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebesar 705 jiwa atau sebesar 72,23%, sebagai buruh tani sebesar 78 jiwa atau sebesar 7,99%, sebagai PNS sebesar 46 jiwa atau sebesar 4,71%, sebagai tukang sebesar 27 jiwa atau sebesar 2,77%, sebagai TNI sebesar 8 jiwa atau sebesar 0,82%, sebagai pedagang sebesar 81 jiwa atau sebesar 8,30%, sebagai buruh pabrik sebesar 25 jiwa atau sebesar 2,57%, dan lain – lain sebesar 6 jiwa atau sebesar 0,61%.

Dalam data terdapat 936 jiwa penduduk yang tidak diketahui mata pencahariannya, hal ini dimungkinkan bahwa jumlah tersebut meliputi anak – anak yang belum memasuki usia sekolah, pelajar, lajut usia dan penduduk yang mendapat pekerjaan (pengangguran).

5.3 Keadaan Lahan Pertanian

5.3.1 Distribusi Lahan

Lahan atau tanah merupakan salah satu faktor produksi dalam suatu usaha tani dan luas lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi petani. Penggunaan lahan di desa Supenuh dibedakan atas tanah sawah (sawah tadah hujan), dan perkampungan. Distribusi penggunaan lahan pertanian di desa Supenuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Distribusi Penggunaan Lahan Pertanian di Desa Supenuh

No.	Distribusi Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Perkampungan	26,3	15,58
2	Sawah	142,5	84,42
Total		168,8	100,00

Sumber : Data Monografi Desa 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat distribusi lahan pertanian di desa Supenuh bahwa mayoritas lahan adalah tanah sawah dengan luas 142,5 Ha atau 84,42% dan sisanya adalah tanah perkampungan dengan luas 26,3 Ha atau 25,58% dari total keseluruhan tanah pertanian yang ada.

5.3.2 Jenis Komoditi dan Produksi

Jenis komoditi pertanian yang dihasilkan di Desa Supenuh sebagian besar adalah tanaman padi sedangkan tanaman pekarangan yang banyak dihasilkan adalah tanaman ketela pohon. Tabel berikut ini menjelaskan tentang jenis komoditi dan produksi pertanian di Desa Supenuh :

Tabel 9. Jenis komoditi dan produksi pertanian di Desa Supenuh tahun 2010

No.	Jenis Komoditi	Produktivitas (Ton/tahun)
1	Padi	1.839
2	Jagung	312
3	Kedelai	7
4	Ketela Pohon	18,90

Sumber : UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sugio tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tanaman terbanyak yang dihasilkan di Desa Supenuh adalah tanaman padi dengan total produksi sebanyak 1.839 ton/tahun, tanaman jagung dengan total produksi sebanyak 312 ton/tahun, tanaman kedelai dengan total produksi sebanyak 7 ton/tahun, dan tanaman ketela pohon dengan total produksi sebanyak 18,90 ton/tahun.

5.4 Keadaan Kelembagaan

5.4.1 Kelembagaan Sosial

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan lembaga tingkat desa yang mempunyai peran sebagai perencana pembangunan desa. cara pemilihan anggota BPD adalah ditunjuk oleh kepala desa. diantara agenda kegiatan BPD adalah pertemuan rutin tiap bulan diantaranya adalah mengentaskan kemiskinan dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kegiatan PKK dilaksanakan oleh ibu – ibu, kegiatannya diantaranya adalah arisan dan berbagai penyuluhan baik kesehatan maupun yang lain yang diadakan rutin sebulan sekali.

3. Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian yang dilaksanakan oleh petani di desa Supenuh. Kegiatannya antara lain : penyuluhayang terkait dengan kegiatan pertanian (penyuluhan bibit baru,dll), dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) daerah setempat. Selain itu ada pertemuan rutin yang dilakukan sebulan sekali pada tanggal 15 dan dilakukan secara bergiliran dirumah kelompok tani.

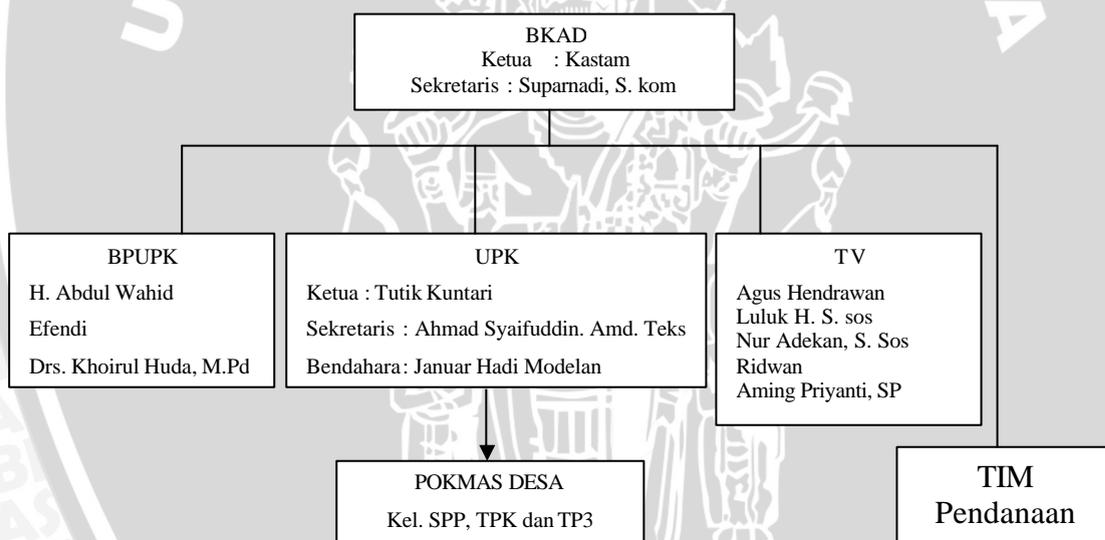
4. Badan kerja sama antar Desa

BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana-prasarana, dan perguliran dana. BKAD kemudian berkembang sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program/ proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa .

BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat.

Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang *pengelolaan dana bergulir*, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.

Berikut adalah stuktur organisasi BKAD di kecamatan Sugio :



Gambar 6. Struktur BKAD kecamatan Sugio

BKAD dibentuk berdasarkan UU 32/2004, PP 72 dan 73/2005, pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil PPK (Program Pengembangan Kecamatan), sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada Agustus 2006. Sesuai PP 72 tahun 2005, bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan,

pendidikan, pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, serta sosial budaya. Bidang-bidang ini selaras dengan kegiatan yang selama ini telah dilakukan melalui PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKAD di atas dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Pengalaman tersebut tidak hanya aset produktif yang dikelola UPK, tetapi meliputi sistem perencanaan, kegiatan antar desa, pengembangan aset produktif, serta kemampuan mengelola program-program pembangunan di masyarakat.

BKAD memiliki potensi untuk menjadi organisasi kerja yang mengkoordinasikan fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat komunitas. Konsep pengakaran lembaga yang sudah menjadi komitmen, harus dapat diwujudkan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dengan memadukan pola hubungan fungsional dan bertumpu pada akar lembaga komunitas. Lembaga komunitas sebagai basis kekuatan BKAD ke depan dapat terdiri dari RT/RW/dusun. Dalam kaitan inilah maka BKAD dapat berfungsi untuk menggerakkan kembali semangat revitalisasi lembaga lokal/adat. Penguatan modal sosial dan solidaritas sosial akan menggerakkan kegiatan kerja sama, akses dan jaringan sosial, menggerakkan fungsi produksi dan reproduksi sosial dan sebagainya. Pada konteks inilah maka menumbuhkan kembali semangat budaya lokal menjadi tugas strategis BKAD.

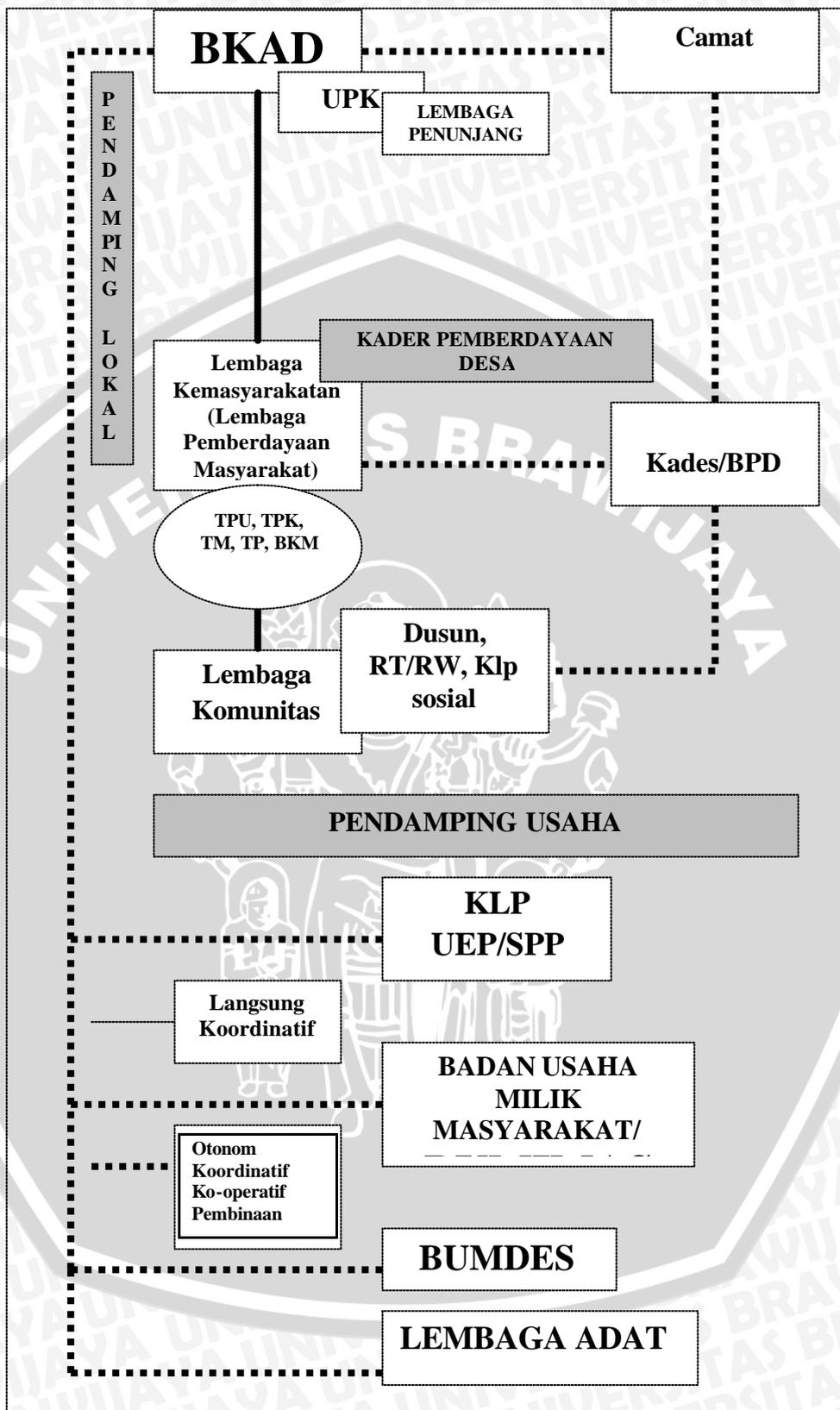
Beberapa fungsi yang dijalankan oleh lembaga seperti Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Monitoring (TM), Tim Pemelihara (TP), adalah fungsi-fungsi yang berjalan dengan relatif baik selama ada program. Pemikiran untuk menjaga keberlanjutan fungsi didasarkan pada dua peluang. Peluang pertama dari aspek keberlanjutan kelembagaan dan peluang kedua, berasal dari potensi kerja sama antar program. Keberlanjutan kelembagaan dipengaruhi antara lain oleh ketersediaan perangkat peraturan yang relevan. PP 72/2005 mengamankan tentang penetapan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mewakili ciri utama untuk

mengidentifikasi lembaga lokal yang pada umumnya dibentuk melalui proses mobilisasi. Fungsi-fungsi yang termasuk dalam lingkup lembaga kemasyarakatan beberapa di antaranya adalah fungsi yang melekat pada lembaga bentukan program.

Dalam pengertian inilah maka fungsi-fungsi TPU, TPK, TM, TP, akan dikuatkan secara kelembagaan baik secara fungsional maupun legitimasi dalam kerangka lembaga kemasyarakatan desa. Secara fungsi keberadaan lembaga-lembaga ini dapat tetap bersifat sementara, justru untuk mengoptimalkan peran dan fungsi sesuai kebutuhan, tetapi secara legitimasi melekat ke dalam lembaga permanen yang ada.

Uraian di atas dapat dijelaskan dalam gambar (skema) sebagai berikut :





Gambar 7. Skema Optimalisasi Peran dan Fungsi BKAD

5.5 Pelayanan Umum

5.5.1 Fasilitas Pendidikan

Guna mewujudkan pembangunan sektor pendidikan diperlukan sarana atau fasilitas seperti gedung yang cukup, tenaga edukatif yang memadai dan penduduk yang menganal sekolah. Fasilitas pendidikan yang ada di desa Supenuh seperti pada tabel berikut :

Tabel 10. Fasilitas Pendidikan di desa Supenuh

No.	Nama Gedung Sekolah	Jumlah (Unit)
1	TK	1
2	MI Muhammadiyah	1
3	SD Islam	1
4	SDN 1 Supenuh	1

Sumber : Data Monografi Desa 2010

5.5.2 Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang ada di desa Supenuh. Fasilitas kesehatan yang ada di desa Supenuh cukup memadai, hal ini ditunjukkan dengan ada hanya bidan desa yang berjumlah 1 orang dan 1 unit apotek. Meskipun demikian fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sehat.

5.6 Gambaran Umum PNPM di Lokasi Penelitian

Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa diluncurkannya PNPM, dalam pelaksanaannya BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) digunakan sebagai lembaga untuk menangani masalah tersebut, lembaga ini dibentuk oleh masyarakat sendiri secara demokratis dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator. Alur kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan yang akan menjadi sasaran program.

Kegiatan awal yang dilakukan oleh pengurus UPK Kecamatan Sugio adalah sosialisasi dan penyebaran informasi program kepada masyarakat baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan seperti kegiatan PKK dan lain-lain. Kegiatan selanjutnya yaitu Pemetaan Sosial. Dalam kegiatan ini masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Dalam hal ini jika masyarakat tidak mengikuti forum kegiatan maka pelaku PNPM bisa melakukan musyawarah kembali dengan kepala desa/kepala dusun setempat guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penentuan RTM.

Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD di Desa Supenuh dipegang oleh seorang perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan rencana kegiatan meliputi kegiatan pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan fisik dan pada tahun ketiga saat penelitian dilakukn kegiatan program sudah pada tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2010 – 2014.

Penyaluran dan Pencairan Dana

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk

membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi sebagai dana usaha bergulir. Mekanisme pencairan dana yang pertama membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK, TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB(Rencana Anggaran Biaya), dan lampirannya) dan dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD).

Pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yakni usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP), bantuan bersifat pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- untuk 20 anggota. Ketua UPK sebagai pihak kedua (penerima bantuan) sepakat dan berjanji akan mengembalikan dana bantuan yang bersifat pinjaman tersebut kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam jangka waktu 10 bulan terhitung sejak penyerahan dana kepada pihak kedua oleh pihak pertama. pengembalian oleh pihak kedua disertai jasa pinjaman sebesar 15% per sepuluh bulan. Jumlah keseluruhan dana yang harus dikembalikan pihak kedua sampai selesai jangka waktu pinjaman adalah sebesar Rp. 23.000.000,-. Jika pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, kesempatan pihak kedua untuk mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di masa yang akan datang akan hilang. Sedangkan pada kegiatan pemberdayaan lingkungan (perbaikan pembangunan sarana prasarana) bantuan bersifat lepas berupa perbaikan jalan poros rabat beton dengan jumlah dana sebesar Rp. 78.844.000,- dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 bulan. Disini pihak kedua sepakat dan berjanji akan memelihara prasarana dan sarana melalui swadaya masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya masyarakat melaksanakan kegiatan mereka dengan membentuk forum musyawarah. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam merancang kegiatan pembangunan sarana prasarana, penganggaran kegiatan, kemudian dilakukan verifikasi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat program. Dan selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan

laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).

Pada tahap selanjutnya yaitu pelestarian program, Pelestarian program/kegiatan ini merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Hasil-hasil kegiatan PNPM berupa kegiatan pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan merupakan asset milik desa yang dikelola secara lestari dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya sasaran PNPM. Dimana tujuan dari pada pelestarian program ini sendiri adalah untuk mengembangkan dan melestarikan kegiatan program demi kesejahteraan dan kemajuan desa.

Dengan melihat pelaksanaan siklus pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Supenuh saat ini maka sebenarnya masyarakat telah siap untuk melanjutkan program pemberdayaan di desanya. Kesimpulan ini didukung dengan telah adanya proses pengembangan dalam kelembagaan BKM kepada orang-orang muda yang belum pernah terlibat sebelumnya serta adanya motivasi untuk mendapatkan pencapaian yang lebih besar yaitu keinginan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di desa juga terkait dengan adanya dukungan dan kerjasama antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga tingkat desa lainnya. Selama ini dukungan Kepala Desa Supenuh terhadap pelaksanaan PNPM MP cukup baik, sehingga hal tersebut memberikan dorongan untuk keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Supenuh.

VI. HASIL DAN PEMBAHASANN

6.1 Karakteristik Responden

6.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan RTM responden dalam menerapkan hasil pembinaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah umur. Hal ini dikarenakan umur adalah faktor demografi penting dalam mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, selain itu umur juga mempengaruhi tingkat aktivitas dan daya serap terhadap pengetahuan dan informasi. Umur merupakan lamanya hidup responden yang terhitung sejak lahirnya sampai dilakukannya penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Indikator ini dipilih karena diduga umur mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Semakin muda umur biasanya mempunyai semangat dan keingin tahaun yang besar dan semamkin tua umur maka semangat dan keingin tahuannya menurun. Pengelompokan keadaan penduduk berdasarkan umur ini dilakukan yaitu untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang berada dalam kelompok usia produktif dan lanjut usia dengan kata lain masyarakat yang sudah tidak produktif lagi. Karakteristik responden berdasarkan umur disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur Responden	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	< 30 tahun	2	6,67
2	30 – 50 tahun	23	76,67
3	> 50 tahun	5	16,66
Total		30	100,00

Sumber : Analisis data primer 2011

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden yang mempunyai umur produktif yaitu yang berumur < 50 tahun sebanyak 25 jiwa atau sebesar 83,4%. Umur tersebut merupakan umur produktif yang sangat mudah menerima hal-hal baru, mudah di ajak berkomunikasi dan mempunyai kemauan yang kuat untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. sedangkan responden yang berumur > 50 tahun sebanyak 5 jiwa atau sebesar 26,6%.

6.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan tolak ukur yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau daya tangkap untuk dapat menginterpretasikan setiap informasi yang diterimanya (Soekertawi, 1998). Pendidikan merupakan sarana belajar. Pengambilan keputusan yang tepat dan ketajaman berfikir dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pemikiran serta mendorong orang itu untuk menjadi yang lebih baik. Dengan melihat tingkat pendidikan responden, diharapkan dapat diketahui sejauh mana perilaku dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Tingkat pendidikan responden sangat beragam yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan (Lulusan)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	SD	2	6,67
2	SMP	15	50
3	SMA	9	30
4	S1	4	13,33
Total		30	100,00

Sumber : Analisis Data Primer 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden relative cukup tinggi, hal itu dapat dilihat bahwa pendidikan SMP yang paling tinggi, yaitu sebesar 15 jiwa atau sebesar 50%. Untuk responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang atau sebesar 6,66%, responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 9 orang atau sebesar 30%, dan responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 4 orang atau sebesar 13,33%. Pendidikan yang dimiliki oleh responden akan mempengaruhi dalam menerima suatu informasi baru. Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa responden rata-rata memiliki cukup kemampuan untuk membaca, menulis, serta menghitung sehingga memudahkan mereka untuk menerima sebuah informasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan responden sudah tinggi. Walaupun mereka sebagian besar hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, tetapi niat mereka untuk mengikuti perkembangan cukup besar.

6.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu. Jenis kelamin dikaitkan pula dengan aspek gender, karena terjadi diferensiasi peran sosial yang dilekatkan pada masing-masing jenis kelamin. Pada masyarakat yang mengenal "machoisme", umpamanya, seorang laki-laki diharuskan berperan secara maskulin dan perempuan berperan secara feminin. Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 13. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	6	20
2.	Perempuan	24	80
Total		30	100

Sumber : Analisis Data Primer 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki mempunyai Persentase 20% sedangkan untuk perempuan berpersentase 80%. Hal ini dikarenakan PNPM dalam implementasinya di lapangan menjadikan keterlibatan perempuan dalam proses/siklus pemberdayaannya sebagai indikator pencapaian. Secara kuantitas, ada standar minimal capaian lapang bahwa keterlibatan masyarakat perempuan dalam proses pelaksanaan lapang minimal 30%. Pada tabel tersebut peran perempuan lebih lebih banyak dilibatkan dalam hal perencanaan pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

6.2 Faktor Internal dan Eksternal yang Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan

6.2.1 Faktor Internal dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan

Kesuksesan dan tercapainya tujuan kegiatan pemberdayaan tidak bisa lepas dari faktor internal dan eksternal pada kegiatan itu sendiri. Berikut ini akan disajikan tabel tentang faktor internal dan eksternal dalam kegiatan pemberdayaan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 14. Faktor Internal dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan

No	Faktor Internal	Skor rata-rata dilapang	%	Kategori
1	Umur	1,9	63	Sedang
2	Jenis Kelamin	Laki-laki 6, Perempuan 24	80	Tinggi
3	Tingkat pendidikan	2,3	76,67	Sedang
4	Jumlah keluarga	2,2	73	Sedang
5	Pengalaman berusaha	2,5	84	Tinggi
Rata-rata			75	Sedang

Sumber : Analisis data primer 2011

Secara rinci faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dijelaskan dibawah ini :

1. Umur Responden

Umur mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan perilakunya dalam berpartisipasi pada aktivitas kelompok serta minat untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan usahanya. Umur adalah faktor demografi penting dalam mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, selain itu umur juga mempengaruhi tingkat aktivitas dan daya serap terhadap pengetahuan dan informasi. Seseorang yang berusia lanjut menunjukkan sikap kurang berpartisipasi dalam aktivitas kelompok dan minat yang rendah untuk meningkatkan usahanya yang disebabkan oleh kemampuan fisik yang sudah mulai menurun. Selain itu terdapat keengganan menanggung resiko menjadikan seseorang dengan usia lanjut tidak mudah untuk menerima informasi dan kebanyakan menyerahkan atau tepatnya memberikan kesempatan tersebut kepada yang lebih muda.

Berikut disajikan tabel tentang distribusi umur responden di Desa Supenuh, Kecamatan Sugio berdasarkan hasil penelitian dilapang :

Tabel 15. Umur responden di desa supenuh

No	Golongan Umur (tahun)	N	%	Skor rata-rata di lapang	%	Kategori
1	< 30	2	6,67	1,9	63	Sedang
2	30 – 50	23	76,67			
3	> 50	5	16,66			
Jumlah		30	100,00	1,9	63	

Sumber : Analisis data primer 2011

Dari hasil penelitian dilapang didapatkan data bahwa responden yang berumur 30 – 50 tahun berjumlah 23 orang atau sebesar 76,67 % dan responden yang berumur < 30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 6,67 % serta responden

yang berumur > 50 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 16.66 % dari total jumlah responden. Dari data di atas dapat diketahui bahwa rata – rata responden penelitian pada Program Nasioal Pemberdayaan Masyarakat adalah penduduk dengan usia produktif yang siap menerima informasi baru.

Pada kegiatan pemberdayaan Program Nasioal Pemberdayaan Masyarakat faktor umur mempunyai Persentase 63 % dan tergolong kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa umur merupakan faktor internal yang penting terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada Program Nasioal Pemberdayaan Masyarakat yang mana penduduk dengan usia produktif akan sangat mendukung dalam proses kegiatan-kegiatan yang berlangsung.

2. Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki mempunyai Persentase 20% atau 6 responden sedangkan untuk perempuan berpersentase 80% atau 24 responden. Hal ini dikarenakan PNPM dalam implementasinya di lapangan menjadikan keterlibatan perempuan dalam proses/siklus pemberdayaannya sebagai indikator pencapaian keberhasilan kegiatan. Peranan laki-laki dalam kegiatan pemberdayaan dalam PNPM lebih banyak didominasi oleh pelaku-pelaku PNPM baik pelaku yang ada di kecamatan maupun pelaku-pelaku di desa seperti kepala desa, dimana kepala desa mempunyai peran sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM di tingkat desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PNPM sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM yang telah ada di tingkat desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau kerjasama antar desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa beserta pelaku PNPM lainnya tidak lepas dari bantuan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), dimana KPMD di desa Supenuh ini merupakan warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM di tingkat desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan, dimana KPMD di desa

Supenuh dipegang oleh pihak perempuan, hal ini dilakukan mengingat setiap tahap yang ada di PNPM mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian sangat memerlukan keterlibatan peran perempuan di dalamnya, sehingga dapat mempermudah mengkoordinir ketika kegiatan berlangsung.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik secara formal maupun informal. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal terakhir yang pernah diikuti oleh responden. Tingkat pendidikan ini meliputi jenjang pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pendidikan pada umumnya akan mempengaruhi cara-cara berfikir petani dan juga mempengaruhi kemampuan dalam berusaha, pengelolaan, dan menciptakan akses usaha. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kecepatan petani dalam mengadopsi suatu inovasi. Menurut Soekartawi (1988) bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka agak sulit untuk dapat melaksanakan hal-hal baru dengan cepat. Berikut ini disajikan tabel yang memperkuat pengaruh pendidikan terhadap pelaksanaan Program Nasioal Pemberdayaan Masyarakat dilapang.

Tabel 16. Tingkat pendidikan responden di desa Supenuh

No	Golongan Umur	N	%	Skor rata-rata di lapang	%	Kategori
1	SMA keatas	13	43,33			
2	SMP	15	50	2,3	67,67	Tinggi
3	SD	2	6,67			
Jumlah		30	100,00	2,6		

Sumber : Analisis data primer 2011

Dari data penelitian dapat diketahui bahwa 2 orang mengenyam pendidikan hingga tingkat SD atau sebesar 6,67 %, 15 orang mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP atau sebesar 50 %, dan 13 orang mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA dan perguruan tinggi atau sebesar 43,33% dari jumlah keseluruhan. Pada kegiatan pemberdayaan Program Nasioal Pemberdayaan Masyarakat faktor pendidikan mempunyai Persentase 67,67 % dan tergolong kategori sedang. Dapat

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden berdasarkan penelitian dan skor rata-rata dilapang 2,3 adalah 67,67% dan tergolong kategori tinggi. Pendidikan yang dimiliki oleh responden akan mempunyai peran tersendiri dalam menerima suatu informasi baru. Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa responden rata-rata memiliki cukup kemampuan untuk membaca, menulis, serta menghitung sehingga memudahkan mereka untuk menerima sebuah informasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan responden sudah tinggi. Walaupun mereka sebagian besar hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, tetapi niat mereka untuk mengikuti perkembangan cukup besar.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan seseorang dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

4. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga di ukur dari bayaknya orang yang tinggal serumah dengan responden, menetap dan biaya hidupnya menjadi tanggungan responden. Faktor jumlah anggota keluarga menjadi bahan pertimbangan responden dalam pengambilan keputusan untuk menerima informasi baru dan menerapkannya. Tuntutan akan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan pemenuhan kebutuhan usahanya menjadikan responden yang memiliki jumlah keluarga yang lebih besar cenderung lebih berhati – hati dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya. Rasa takut akan kegagalan akan selalu menjadi keraguan responden dengan jumlah anggota yang lebih besar. Dengan demikian responden dengan jumlah anggota rumah tangga besar dapat dimungkinkan menolak untuk mencoba suatu teknologi dan informasi baru untuk

menerapkannya. Akan beda jika jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan jumlahnya lebih sedikit.

Berikut ini akan disajikan tabel tentang tanggungan responden yang diperoleh dari hasil penelitian dilapang.

Tabel 17. Jumlah anggota keluarga responden di Desa Supenuh

No	Jumlah Anggota Keluarga	n	%	Skor rata-rata di lapang	%	Kategori
1	< 3 orang	6	10	2,2	73	Sedang
2	3– 5 orang	24	80			
3	> 5 orang	0	0			
Jumlah		30	100	2,2	73	

Sumber : Analisis data primer 2011

Dari data di atas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki jumlah anggota keluarga < 3 orang adalah sebanyak 6 responden atau sebesar 10%, yang memiliki jumlah anggota keluarga 3 – 5 orang adalah sebanyak 24 responden atau sebesar 80% dan yang memiliki jumlah anggota keluarga > 5 orang adalah sebanyak 0 responden dari jumlah keseluruhan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota keluarga memiliki skor rata-rata 2,2 dan Persentase 73 % dan termasuk dalam kategori Sedang. Hal inilah yang menyebabkan rata-rata responden di desa Supenuh dengan jumlah anggota rata-rata 3-5 orang termasuk agak sulit untuk menerapkan sesuatu yang baru dengan alasan takut gagal dan untuk memulai usaha baru memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jumlah anggota keluarga menjadi tanggungan bagi keluarga terutama bagi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan seluruh anggota keluarganya. Sedangkan kendala yang dihadapi responden selama ini adalah modal yang minim.

5. Pengalaman Berusaha

Pengalaman dalam berusaha diukur dari awal responden melakukan usaha sampai dilakukannya penelitian. Semakin lama seseorang dalam berusaha, maka responden tersebut akan belajar dari pengalamannya untuk menerima usaha baru yang dimungkinkan akan lebih rasional dalam menerima resiko kegagalan. Sehingga dengan banyaknya pengalaman dalam berusaha diharapkan responden

akan memberikan respon positif terhadap adanya program baru. Berikut ini akan disajikan tabel tentang pengalaman berusaha.

Tabel 18. Pengalaman berusaha responden di Desa Supenuh

No	Pengalaman Berusaha (tahun)	N	%	Skor rata-rata di lapang	%	Kategori
1	> 2	22	73,34	2,5	84	Tinggi
2	1-2	3	10			
3	< 1	5	16,66			
Jumlah		30	100,00	2,5	84	

Sumber : Analisis data primer 2011

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki pengalaman berusaha > 2 tahun adalah 22 responden atau sebesar 73,34 % responden yang memiliki pengalaman berusaha 1 – 2 tahun adalah 3 responden atau sebesar 10% dan responden yang memiliki pengalaman berusaha < 1 tahun adalah 5 responden atau sebesar 16,66 %. Berdasarkan data tersebut di atas diharapkan semakin banyaknya pengalaman berusaha responden maka akan semakin mudah bagi responden untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan Persentase dilapang, pengalaman berusaha yang tinggi sangat sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, hal ini dikeranakan jika pengalaman berusaha masih rendah maka dalam pelaksanaan pemberdayaan juga kurang maksimal. Pengalaman berusaha termasuk dalam kategori tinggi dengan Persentase 84 % dan skor rata-rata dilapang 2,5.

6.2.2 Faktor Eksternal yang Terkait dalam Kegiatan Pemberdayaan

Faktor eksternal dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan disini meliputi modal dan jaminan hasil pemasaran. Berikut ini akan disajikan faktor eksternal dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Faktor eksternal dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19. Faktor eksternal yang Terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

No.	Faktor Eksternal	Skor rata-rata dilapang	%	Kategori
1	Modal	1,3	43	Rendah
2	Jaminan pemasaran hasil	2,1	70	Sedang

Sumber : Analisis data primer 2011

Secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Modal

Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Modal dapat diartikan sebagai kekuasaan menggunakan barang-barang modal yang belum digunakan, untuk memenuhi harapan yang akan dicapainya. Di mana modal itu bisa dalam bentuk uang (material), non material atau dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, maupun modal dalam bentuk barang dan lain sebagainya. Pengalaman modal dianggap penting dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Hal ini dikarenakan dalam setiap usaha diperlukan cukup modal. Pada kenyataannya, menurut hasil observasi dilapang modal responden di Desa Supenuh tergolong rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Modal responden di Desa Supenuh

No	Modal	N	%	Skor rata-rata di lapang	%	Kategori
1	Kredit	2	6,66			
2	Tabungan	7	23,34	1,3	43	Rendah
3	Tidak ada modal	21	70			
Jumlah		30	100	1,3	43	

Sumber : Analisis data primer 2011

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa 2 responden atau 6,66% mendapatkan modal dari kredit, 7 responden atau 23,34% mendapatkan modal dari tabungan dan 21 responden atau 70% tidak ada modal untuk memulai usaha baru.

Dari data di atas maka didapatkan bahwa modal mendapatkan skor rata-rata dilapang sebesar 1,3 atau sebesar 43% dan tergolong kategori rendah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 2 responden memiliki modal dari kredit, hal ini dilakukan karena pemilihan alternatif penambahan modal yang berasal dari kreditur (hutang) pada umumnya didasarkan pada pertimbangan

karena murah. Dapat dikatakan murah, karena biaya bunga yang harus ditanggung lebih kecil dari laba yang diperoleh dari pemanfaatan hutang tersebut. Dalam jangka 1 tahun pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- dengan bunga 1,25% pinjaman tersebut menjadi Rp. 1.149.996,- Rata-rata masyarakat baik responden maupu non responden masih ada yang memilih alternatif penambahan modal yang berasal dari kreditur karena modal yang dipinjam dapat diangsur secara musiman (bagi petani), jadi mereka lebih mengandalkan hasil panen untuk membayar hutang tersebut. Selain hasil panen responden tersebut bisa memanfaatkan hasil laba dari toko atau warung yang mereka punya untuk membayar hutang, dalam hal ini biasanya dilakukan orang yang mempunyai usaha kecil-kecilan yang biasanya mengangsur cicilan tiap bulan.

Terdapat 7 responden yang memiliki modal dari tabungan mereka sendiri yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit, besar tabungan tidak diketahui pasti karena responden tidak pasti berapa mereka menabung, dan tidak pasti per bulan atau per musim. Sumber modal yang mereka dapatkan bisa dari pekerjaan sehari-hari yang tidak tetap atau modal tersebut bisa bersumber dari hasil usaha tani yang mereka dapatkan. Sedangkan 21 responden mengatakan tidak ada modal untuk kebutuhan sehari-hari. Responden yang tidak memiliki modal bisa dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada mulai dari skill, kemauan untuk bekerja keras dan semua kelebihan yang mereka punyai. misalnya waktu, tenaga, fikiran, tanggung jawab, bisa dipercaya juga merupakan modal yang sangat penting untuk bisa dipercaya dalam melakukan kegiatan pemberdayaan.

2. Jaminan pemasaran hasil

Jaminan Pemasaran hasil adalah kejelasan tujuan dari produksi yang dihasilkan oleh responden dari usahanya, dimana dengan adanya jaminan pada pemasaran hasil produksinya maka responden akan segera sesuatu inovasi yang baru. Resiko akan munculnya kegagalan kemungkinan tidak akan berpengaruh besar terhadap usaha responden, karena sekalipun usaha produksinya sedikit namun sudah ada kepastian tentang pendistribusian hasil sehingga pasti terjual dan terdistribusi sampai ke konsumen meskipun mengurangi jumlah pendapatannya namun ada kepastian akan sejumlah uang yang diterima. Berikut

ini akan disajikan data tentang jaminan pemasaran hasil produksi responden pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 21. Jaminan pemasaran hasil Responden di Desa Supenuh

No	Jaminan Pemasaran Hasil	N	%	Skor rata-rata di lapang	%	Kategori
1	Dijual sendiri	16	53,33	2,1	70	Sedang
2	Dijual ke tengkulak	0	0			
3	Di konsumsi	14	46,67			
Jumlah		30	100,00	2,1	70	

Sumber : Analisis data primer 2011

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 16 (53.33%) responden menyatakan bahwa hasil produksi usahanya dijual sendiri ke pasar atau ke distributor lainnya, dan 14 (46,67%) responden menyatakan bahwa hasil produksinya habis dikonsumsi sendiri. Dari prosentase pada jaminan pemasaran dapat diketahui bahwa jaminan pemasaran memiliki skor rata-rata 2,1 dan Persentase 70% dan tergolong kategori sedang. Hal ini sesuai dengan kondisi lapang responden yang memiliki hasil pertanian tetapi tidak memiliki jaminan pemasaran sulit untuk meningkatkan usaha, menambah modal dan mengembalikan modal awal RTM. Selain itu mengingat jalan sebagai sarana transportasi sudah tidak layak digunakan, sementara cukup banyak responden yang menjual sendiri pemasaran hasil pertaniannya, maka semakin meningkat keinginan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh PNPM.

6.3 Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

6.3.1 Pelaksanaan Kegiatan

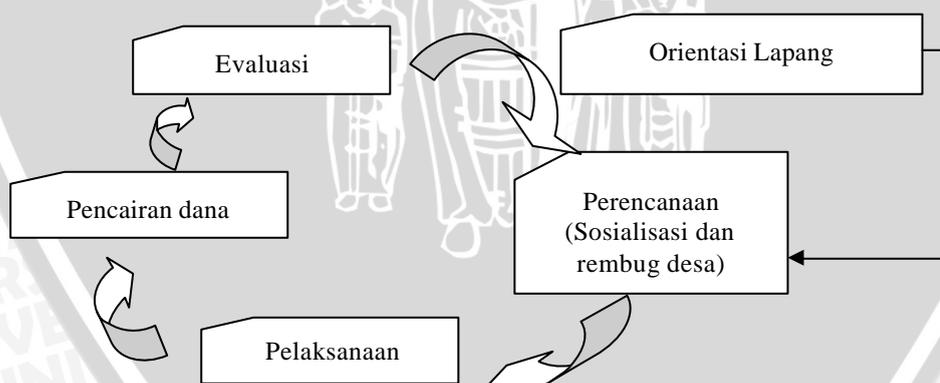
Konsep pemberdayaan yang digagas PNPM bukanlah sekedar konsepsi atau teori saja. Namun benar-benar diwujudkan dengan penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan. Di desa Supenuh merupakan salah satu desa diluncurkannya PNPM, dibentuk lembaga untuk menangani masalah tersebut, Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat sendiri secara demokratis. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator.

Alur kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan hal

penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan.

Pelaksanaan PNPM diwilayah sasaran dilakukan melalui beberapa rangkaian kegiatan (siklus). Siklus ini merupakan rangkaian pembelajaran kepada masyarakat untuk membangaun kesadaran bahwa penanggulangan kemiskinan akan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan akan bisa membangun dan melahirkan kepedulian dari masyarakat terhadap permasalahan yang dialami warga miskin di daerah wilayahnya. Masing-masing siklus tersebut mempunyai tujuan tertentu dan dilakukan dengan urutan pelaksanaanya.

Keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tergantung pada tahap perencanaan yang baik, dimana pada tahap ini adalah awal dari berjalannya program sebelum memulai tahap pelaksanaan, dst. Dalam kegiatan perencanaan terdapat agenda sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan tujuan, prosedur dan mekanisme kegiatan, sehingga diperoleh kesepakatan-kesepakatan yang sama oleh pengelola program dan pihak terkait serta kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri perdesaan. Berikut merupakan proses tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan :



Gambar 8. Proses pelaksanaan PNPM

Adapun mekanisme dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan evaluasi PNPM disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 22. Mekanisme dalam tahap pelaksanaan PNPM tahun 2010

No	Tahap yang dilaksanakan	Skor maksimal	Skor rata-rata di lapang	%	Kategori
	PERENCANAAN				
1	Sosialisasi di desa	3	1.70	56.7	Sedang
2	Klarifikasi RTM	3	1.72	57.33	Sedang
3	Klasifikasi RTM	3	1.83	61	Sedang
4	Identifikasi kebutuhan				
	Pemberdayaan Usaha	3	1.86	62	Sedang
	Pemberdayaan Lingkungan	3	1.92	64	Sedang
5	Musdes perencanaan	3	2.56	85.3	Tinggi
6	Penulisan usulan desa	3	2	66.67	Sedang
7	Verifikasi usulan	3	3	100	Tinggi
8	Pengesahan dokumen SPPB	3	3	100	Tinggi
	PELAKSANAAN				
1	Pencairan dana	3	1.97	65.67	Sedang
2	Lokakarya pra pelaksanaan	3	1.92	64	Tinggi
3	Musdes pra pelaksanaan	3	1.42	80.67	Tinggi
4	Pelaksanaan kegiatan				
	Pemberdayaan Usaha	3	2.75	91.67	Tinggi
	Pemberdayaan Lingkungan	3	2.44	81.33	Tinggi
	EVALUASI				
1	Pelaporan jalur struktural	3	3	100	Tinggi
2	Pelaporan jalur fungsional	3	3	100	Tinggi
	PELESTARIAN KEGIATAN	3	2	66.67	Sedang
Jumlah		51	38,09		
Rata-rata		3	2,24	74,67	Sedang

Sumber : Analisis data primer 2011

Keterangan : Tinggi apabila dengan skor = 39,7 – 51 atau 77,84% - 100%

Sedang apabila dengan skor = 28,3 – 39,6 atau 55,50% - 77,64%

Rendah apabila dengan skor = 17 – 28,3 atau 33,33% – 55,49 %

Tahap perencanaan bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan secara partisipatif dan menetapkan alokasi anggarannya. berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tahap perencanaan yang dilakukan memperoleh presentase sebesar 84,31% dari skor yang didapatkan dari skor standar yang diharapkan dan termasuk dalam kategori tinggi. Tahap yang dilakukan dalam proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Supenuh adalah sebagai berikut :

I. Perencanaan

1. Sosialisasi di desa

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Dari data penelitian yang tersaji pada tabel 22 dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan UPK mendapatkan skor rata-rata dilapang 1,70 atau sebesar 56,7% dan tergolong kategori sedang. Hal ini dikarenakan dari 3 agenda yang ditetapkan diantaranya adalah a) Penjelasan program oleh kepala desa, b) Kegiatan sosialisasi melalui papan informasi, media hiburan, pamflet, dan pameran, dan c) TPK bersama-sama UPK melakukan sosialisasi kepada RTM sasaran program, hanya 2 agenda yang dilaksanakan dilapang adalah poin a dan b saja yaitu pada tahap sosialisasi di desa program dijelaskan oleh kepala desa dan kegiatan sosialisasi diinformasikan melalui papan media. Pada poin c TPK bersama-sama UPK melakukan sosialisasi tidak langsung kepada RTM tetapi melalui perangkat desa baik kepala desa maupun kepala dusun atau RT/RW. UPK dan TPK melakukan sosialisasi dalam bentuk musyawarah desa yang diikuti oleh kepala dusun, RT/RW, unsur perempuan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme kegiatan, sehingga diperoleh kesepakatan-kesepakatan yang sama oleh pengelola program dan pihak terkait serta kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri perdesaan. Sosialisasi program juga bertujuan untuk membangun komitmen semua pihak untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam upaya menaggulagi kemiskinan, dimana permasalahan utama yaitu kurangnya modal bagi RTM dan jalan yang rusak perlu diperbaiki sebagai infrastruktur utama sarana melakukan aktivitas.

Sebelum Sosialisasi dilaksanakan dilakukan terlebih dahulu orientasi dan pengamatan lapang. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengenalan desa, kegiatannya meliputi: 1) mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sebelumnya. Karena sebelumnya belum terdapat kegiatan pemberdayaan maka orientasi dan pengamatan lapang cukup dengan mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, 2) melihat kondisi jalan yang akan dibiayai oleh PNPM.

Setelah melakukan orientasi dan pengamatan lapang, selanjutnya yaitu dilakukan sosialisasi dan rembug desa. Kegiatan ini juga masih merupakan tahap perencanaan/penyiapan masyarakat yang dilakukan karena PNPM merupakan upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga masyarakat diberi kesempatan untuk mengambil keputusan berkehendak menerima atau menolak PNPM sebagai alternative pemecahan masalah dalam kemiskinan. Oleh karena itu sosialisasi dan rembug desa merupakan proses awal dari pembangunan partisipatif, karena masyarakat yang berhak untuk menentukan apakah mereka akan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara partisipatif. Apabila masyarakat memutuskan untuk menerima PNPM, maka masyarakat harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah dikembangkan oleh PNPM.

2. Klarifikasi RTM

Klarifikasi pada data penelitian didapatkan skor rata-rata dilapang 1,72 atau sebesar 57,33% dan tergolong kategori sedang. Klarifikasi dilakukan untuk mengecek kesesuaian data RTM secara obyektif di lapangan. Terdapat 3 poin kegiatan yang dilakukan pada tahap klarifikasi yaitu : a) Kegiatan diskusi kelompok terfokus, b) Musyawarah ditingkat RT/RW/Dusun, c) Melakukan pengamatan secara langsung dan menayakan kepada RTM. Dari ketiga kegiatan yang direncanakan hanya 2 poin kegiatan yang dilaksanakan yaitu pada saat klarifikasi diadakan

Musyawarah ditingkat RT/RW/Dusun dan melakukan pengamatan secara langsung dan menayakan kepada RTM. Klarifikasi dilakukan oleh UPK untuk mengetahui kondisi masyarakat setempat dan data-data mengenai masyarakat tersebut dari kepala dusun terkait masalah kemiskinan.

3. Klasifikasi RTM

Klasifikasi RTM dilakukan setelah kegiatan klarifikasi. Klasifikasi dilakukan untuk mengelompokkan RTM hasil klarifikasi kedalam 2 kategori yaitu RTM rentan dan RTM berpotensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi : a) Kegiatan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif, b) Kegiatan membuka usaha baru, dan c) Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana. Dari data penelitian diketahui bahwa pelaksanaan klasifikasi RTM yang dilaksanakan UPK mendapatkan skor rata-rata dilapang 1,83 atau sebesar 61% dan tergolong kategori sedang. Hal ini dikarenakan dari 3 agenda yang ditetapkan di atas hanya 2 yang dilakukan yaitu a) Kegiatan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif, b) Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana. Untuk pembukaan usaha baru belum terealisasi karena pada saat program berlangsung kegiatan hanya difokuskan untuk perbaikan jalan dan sisanya untuk SPP. Hal ini dituturkan oleh bu Id yang merupakan salah satu pengurus UPK sebagai berikut :

“ Dana yang diterima difokuskan untuk perbaikan jalan rabat beton dan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP), SPP digunakan oleh RTM untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan seperti warung atau took, Hal ini juga dilakukan atas perintah dan persetujuan dari kepala desa Supenuh”.

Tujuan penentuan klasifikasi ini adalah mengelompokkan rumah tangga di desa dalam kategori kaya, menengah dan miskin menurut istilah setempat.

4. Identifikasi kebutuhan

Identifikasi kebutuhan adalah aktivitas menggali usulan kegiatan (penggalan gagasan), penggalan gagasan merupakan proses untuk menemukan dan mengenali gagasan-gagasan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi dan

mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat tersebut. Dalam proses identifikasi kebutuhan masyarakat, metode yang digunakan adalah pemetaan sosial/pemetaan swadaya. Dalam siklus ini masyarakat melakukan proses belajar untuk :

- a. Menggali informasi ; bagaimana kondisi nyata dari masalah-masalah yang dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi kemiskinan. Masalah-masalah tersebut harus didukung oleh data dan fakta, sehingga diperlukan proses untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.
- b. Mengkaji ; informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikaji bersama. Proses ini merupakan analisa terhadap berbagai kondisi yang ada berdasarkan informasi dan fakta tadi untuk dicari sebab dan akibatnya termasuk kolompok-kelompok yang terkena dampak dari masalah yang ada (kelompok sasaran). Setiap informasi yang muncul dianalisa apakah hal tersebut merupakan masalah yang sebenarnya atau hanya merupakan gejala saja.

Pada pelaksanaannya proses penggalian informasi, analisa masalah, dan perumusan masalah seringkali tidak berdiri sendiri melainkan merupakan proses yang dilaksanakan sekaligus. Metode yang digunakan untuk pemetaan swadaya merupakan metode yang lebih menekankan pada proses diskusi masyarakat dengan menggunakan alat kajian yang digunakan yaitu untuk mengajak masyarakat ikut terlibat dalam proses penggalan informasi, analisa dan perumusan/kebutuhan, sehingga melalui proses tersebut sebetulnya masyarakat yang terlibat menjadi peneliti bagi dirinya dan kehidupan lingkungannya sendiri.

Pada pelaksanaan PNPM di Desa Supenuh Identifikasi kebutuhan berupa kegiatan yang meliputi pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terutama RTM. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Usaha

Kegiatan pemberdayaan usaha difokuskan pada usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bagi RTM berpotensi atau yang sudah

memiliki usaha. Adapun rencana kegiatan yang dilakukan adalah : a) Penjelasan tata cara peminjaman melalui forum perwakilan RTM, b) Pembentukan pokmas secara sukarela dari kalangan RTM, dan c) Pembahasan pengelolaan usaha. Dari data penelitian diketahui bahwa pelaksanaan identifikasi kebutuhan pemberdayaan usaha yang dilaksanakan UPK mendapatkan skor rata-rata dilapang 1,86 atau sebesar 62% dan tergolong kategori sedang. Hal ini dikarenakan dari 3 agenda yang rencanakan pembahasan pengelolaan usaha tidak dilaksanakan oleh UPK, karena tidak ada usaha baru yang dilaksanakan. UPK hanya melaksanakan penjelasan tata cara peminjaman melalui forum perwakilan RTM dan Pembentukan pokmas secara sukarela.

b. Pemberdayaan Lingkungan

Kegiatan pemberdayaan lingkungan difokuskan pada : a) Perbaikan rumah tangga RTM dan penyediaan sarana air bersih, b) Pengembangan fasilitas umum, dan c) Penyediaan sarana yang menunjang ekonomi desa, seperti SPP. Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 1,92 atau sebesar 64% dan tergolong kategori sedang. Dari kegiatan yang difokuskan di atas hanya 2 kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengembangan fasilitas umum dan penyediaan sarana yang menunjang ekonomi desa, seperti perbaikan jalan dan Simpan Pinjam Perempuan. Untuk kegiatan penyediaan sarana air bersih tidak dilaksanakan karena masyarakat sudah mendapatkan air bersih yang diperolehnya dari sumur. Hal ini sesuai yang dituturkan oleh Hn salah satu pengurus UPK yaitu :

“ Penduduk desa Supenuh sebagian besar sudah memiliki sumur sebagai penyedia air bersih, jadi kegiatan dipemberdayaan lingkungan lebih diarahkan pada pembangunan fasilitas lain yang lebih mendukung perkembangan desa”.

5. Musdes perencanaan

Musyawah desa perencanaan memiliki agenda : a) Kegiatan pemaparan hasil identifikasi kebutuhan masing – masing Dusun/kelompok, b) Kegiatan musyawah dalam penetapan usulan

kegiatan, c) Kegiatan pembentukan TPK. Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 2,56 atau sebesar 85,3% dan tergolong kategori tinggi. Musyawarah desa perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil penggalan usulan kegiatan. Peserta musyawarah desa perencanaan meliputi : kepala desa dan aparat desa, BPD, wakil RTM desa, wakil perempuan, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Hasil dari musyawarah desa adalah terumuskannya rencana yang dibuat berdasarkan proses penggalan gagasan, meliputi usulan kegiatan sarana prasarana dasar dan peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi. Ditetapkannya daftar usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya melalui sumber dana lainnya seperti swadaya masyarakat, pendapatan desa, dan lain lain. Usulan ini dapat disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah antar desa tahap selanjutnya. Musyawarah perencanaan juga menetapkan Tim Penulis Usulan yang dipegang oleh Bagong Yanuar, terpilihnya sekurang kurangnya satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus UPK (Unit Pengelola Keuangan).

6. Penulisan usulan desa

Penulisan usaha merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan yang sudah dsetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan. Terdapat 3 agenda yang direncanakan yaitu : a) Kegiatan penulisan usulan pemberdayaan usaha, b) Kegiatan penulisan usulan pemberdayaan manusia, dan c) Kegiatan penulisan usulan pemberdayaan lingkungan. Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 2 atau sebesar 66,67% dan tergolong kategori sedang. Hal ini dikarenakan hanya kegiatan penulisan usulan pemberdayaan lingkungan dan penulisan usulan pemberdayaan usaha. Proses ini dilakukan oleh Tim Penulis Usulan (TPU) yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan penulisan usulan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dahulu dari Fasilitator

Kecamatan (FK). Hasil dari penulisan usulan adalah proposal kegiatan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa Perencanaan yang akan diajukan ke Musyawarah Antar Desa prioritas usulan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musyawarah perencanaan pembangunan termasuk RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang masih dalam proses saat penelitian berlangsung. Dalam penyusunan dokumen-dokumen, TPU merujuk kepada hasil perencanaan partisipatif yang telah dilakukan dan bekerjasama dengan perangkat pemerintahan desa/kelurahan. Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar dari usulan kegiatan secara umum dengan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

7. Verifikasi usulan

Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 3 atau sebesar 100% dan tergolong kategori tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah : a) Jenis kegiatan, b) Kesesuaian anggaran, dan c) Jadwal pelaksanaan. Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. Sebelum menjalankan tugasnya TV akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan terlebih dulu dari Fasilitator Kecamatan.

8. Pengesahan dokumen SPPB

Pada kegiatan pengesahan dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) mendapatkan skor rata-rata dilapang 3 atau sebesar 100% dan tergolong kategori tinggi. Kegiatan yang dilakukan meliputi : a) Musyawarah sebelum melakukan pengesahan dokumen, b) Pengesahan SPPB dilakukan oleh ketua TPK, PjOK, Ketua UPK, kades, dan camat, c) Melampirkan dokumen SPPB. Kelengkapan lampiran dokumen meliputi usulan kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), jadwal pelaksanaan, dan foto 0% dari kegiatan yang akan dibangun.

II. Pelaksanaan

Siklus ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat yang mampu mengambil keputusan yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jawaban dari hasil analisa pemetaan swadaya. Organisasi yang dimaksud adalah Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD). BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat. Organisasi ini dipimpin oleh pemimpin kolektif, yang beranggotakan antara 6 sampai 10 orang. Kriteria kolektif ini ditentukan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan PNPM, kegiatan ini meliputi :

1. Lokakarya pra pelaksanaan

Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 1,92 atau sebesar 64% dan tergolong kategori tinggi. kegiatan yang dilaksanakan meliputi penjelasan persiapan pelaksanaan, tukar pendapat, dan koordinasi engan berbagai pengurus.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

2. Musdes pra pelaksanaan

Pada pelaksanaan di desa, pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di desa sebelum

memulai pelaksanaan kegiatan. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya.

Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 1,42 atau sebesar 80,67% dan tergolong kategori tinggi. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

a) Penjelasan alokasi penggunaan dana yang diterima Desa oleh pemerintah desa, b) Penjelasan mekanisme pelayanan pinjaman modal usaha kepada kelompok masyarakat, dan c) Pembentukan TPK dan rencana realisasi masyarakat. Hasil dari Musyawarah Desa pra Pelaksanaan adalah : Dibahas dan disepakati tentang peran dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, menyusun rencana kerja (penjadwalnya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, dsb)

3. Pencairan dana

Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di di desa. Mekanisme pencairan dana sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK
- b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB(Rencana Anggaran Biaya), dan lampirannya)
- c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah

Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 1,97 atau sebesar 65,67% dan tergolong kategori sedang. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a) Pinjaman modal kepada Pokmas, b) Kegiatan pemberdayaan usaha, dan
- c) Kegiatan pemberdayaan lingkungan. Dimana sumber dana PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Pelaksanaan kegiatan

a. Pemberdayaan Usaha

Kegiatan Pemberdayaan usaha difokuskan untuk : a) Pelayanan permohonan pinjaman, b) Analisis kelayakan usaha dan peminjaman, c) Penetapan pinjaman pokmas yang layak didanai dan penandatanganan pinjaman. Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 2,75 atau sebesar 91,67% dan tergolong kategori tinggi. Dalam kegiatan usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP), bantuan bersifat pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- untuk 20 anggota. Ketua UPK sebagai pihak kedua (penerima bantuan) sepakat dan berjanji akan mengembalikan dana bantuan yang bersifat pinjaman tersebut kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam jangka waktu 10 bulan terhitung sejak penyerahan dana kepada pihak kedua oleh pihak pertama. pengembalian oleh pihak kedua disertai jasa pinjaman sebesar 15% per sepuluh bulan. Jumlah keseluruhan dana yang harus dikembalikan pihak kedua sampai selesai jangka waktu pinjaman adalah sebesar Rp. 23.000.000,-. Jika pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, kesempatan pihak kedua untuk mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di masa yang akan datang akan hilang.

b. Pemberdayaan Lingkungan

Kegiatan Pemberdayaan lingkungan difokuskan untuk : a) Mengoptimalkan partisipasi dan pendayagunaan potensi swadaya masyarakat, b) Kegiatan diharapkan mampu menyerap pengangguran yang ada di desa/kelurahan, dan c) Kegiatan dilakukan secara swakelola oleh TPK. Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 2,44 atau sebesar 81,33% dan tergolong kategori tinggi. Dalam kegiatan pemberdayaan lingkungan bantuan bersifat lepas berupa perbaikan jalan poros rabat beton dengan jumlah dana sebesar Rp. 78.844.000,- dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 bulan. Disini pihak kedua sepakat dan berjanji akan memelihara prasarana dan sarana melalui swadaya masyarakat dengan sebaik-baiknya.

III. Evaluasi

Kegiatan siklus PNPM Mandiri di desa Supenuh bisa dikatakan telah terlaksana semua, karena sampai saat ini telah memasuki siklus tahun-tahun ketiga atau tahap RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Kegiatan pemberdayaan lingkungan pada PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di desa Supenuh adalah perbaikan jalan lingkungan dan pembuatan saluran drainase. Sedangkan kegiatan pemberdayaan usaha dalam bidang ekonomi yaitu pengelolaan dana bergulir untuk kepentingan usaha kecil dan mikro dan untuk kepentingan warga miskin.

Evaluasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan pada ada tahap evaluasi PNPM meliputi pelaporan jalur struktural dan pelaporan jalur fungsional. Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai upaya mempercepat proses pencapaian data atau informasi dari lapangan ke tingkat kecamatan, kabupaten, dst. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan jalur struktural

Pelaporan jalur struktural mendapatkan skor rata-rata dilapang 3 atau sebesar 100% dan tergolong kategori tinggi. Kegiatan yang dilakukan adalah : a) Membuat laporan proses pelaksanaan program, b) Membuat laporan hasil kegiatan program, dan c) Realisasi penggunaan dana program.

Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti Ketua TPK, PjOK, Camat. Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan oleh Ketua TPK dengan bimbingan dari fasilitator kecamatan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada PjOK.

2. Pelaporan jalur fungsional

Pelaporan jalur fungsional mendapatkan skor rata-rata dilapang 3 atau sebesar 100% dan tergolong kategori tinggi. Kegiatan yang dilakukan adalah : a) Penyampaian dan pembashasan laporan pelaksanaan program dalam musdes pertanggungjawaban, b) Hasil musdes pertanggungjawaban dituangkan dalam berita acara, c) Hasil musdes pertanggungjawaban dilaporkan UPK kepada kabupaten/kota.

Pelaporan jalur fungsional akan melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti fasilitator kecamatan. Mekanisme pelaporan jalur fungsional dilaksanakan oleh Fasilitator Kecamatan/Fasilitator Tennik (FK/FT) yaitu dengan membuat satu laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatannya yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. Laporan ditujukan kepada KF-Kab setiap bulan pada setiap tanggal 1 dengan tembusan kepada PjOK dan arsip.

IV. Pelestarian Program

Indikator untuk sebuah komunitas atau masyarakat bisa dianggap berdaya adalah apabila mereka memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengatasi permasalahan dalam komunitasnya sendiri berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan mampu melestarikan dan mengelola pembangunan dalam komunitasnya secara berkelanjutan. Indikator tersebut sebenarnya lebih mengacu kepada kapasitas masyarakatnya daripada capaian hasil pembangunan yang telah didapatkan, karena dengan kapasitas masyarakat yang memadai, maka jaminan untuk keberlanjutan pemberdayaan masyarakat bisa lebih dapat diandalkan.

Melihat partisipasi masyarakat Desa Supenuh untuk turut andil dalam memberikan swadaya baik berupa finansial, material maupun tenaga yang cukup besar maka bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Supenuh telah mampu mandiri dalam hal pembangunan di lingkungannya. Namun apabila dilihat dari aspek kepentingan umum yang lebih luas maka partisipasi masyarakat tersebut lebih dimotivasi oleh nilai manfaat yang akan mereka

dapatkan sendiri. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya seharusnya lebih termotivasi untuk memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum, utamanya masyarakat miskin sasaran utama dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Hasil-hasil kegiatan PNPM berupa kegiatan pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan merupakan asset milik desa yang dikelola secara lestari dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun pelestarian program dilaksanakan dengan kegiatan : a) Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan, b) Mewujudkan profesionalisme kinerja organisasi dan manajemen UPK, dan c) Penguatan UPK pasca program diarahkan untuk terwujudnya Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 2 atau sebesar 66,67% dan tergolong kategori sedang. Untuk poin ketiga masih dalam tahap perencanaan.

“Dalam beberapa tahun kedepan apabila dana kas yang dimiliki sudah terkumpul dan dirasa cukup akan mendirikan badan usaha milik kelompok SPP desa Supenuh”.

Tujuan pelestarian program ini sendiri adalah mengembangkan dan melestarikan kegiatan program demi kesejahteraan dan kemajuan desa.

Melihat pelaksanaan siklus pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Supenuh saat ini maka sebenarnya masyarakat telah siap untuk melanjutkan program pemberdayaan di desanya. Kesimpulan ini didukung dengan telah adanya proses pengembangan dalam kelembagaan BKM kepada orang-orang muda yang belum pernah terlibat sebelumnya serta adanya motivasi untuk mendapatkan pencapaian yang lebih besar yaitu keinginan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.

Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di desa juga terkait adanya dukungan dan kerjasama antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga tingkat desa lainnya. Selama ini dukungan Kepala Desa Supenuh terhadap pelaksanaan PNPM MP cukup baik, sehingga hal tersebut memberikan dorongan untuk keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Supenuh.

Setelah aspek pemberdayaan masyarakat, aspek berikutnya yang juga menentukan keberlanjutan pelaksanaan suatu program adalah aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan ini terkait erat dengan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Selama ini sumber pembiayaan pembangunan di Desa Supenuh selain berasal dari dana bantuan langsung masyarakat PNPM adalah berasal dari APBN, APBD, juga berasal dari swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha setempat.

6.3.2 Output Kegiatan

Program atau proyek bertujuan untuk mengubah seperangkat sumber-sumber daya menjadi hasil yang diinginkan melalui serangkaian kegiatan atau proses. Sumber-sumber daya yang diubah disebut input (masukan) sedangkan hasil yang dicapai yaitu output (hasil). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan program pemberdayaan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkesinambungan. Sehingga dengan adanya percepatan penanggulangan kemiskinan ini diharapkan hasilnya nanti akan membantu masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan, kelancaran infrastruktur yang akhirnya akan terjadi peningkatan kesejahteraan desa.

Hasil adalah keluaran yang akan dicapai atau yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu kegiatan dari input yang tersedia untuk terlaksananya suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu proyek/program. Hasil kegiatan pemberdayaan lebih mengarah pada pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dalam program PNPM Mandiri Perdesaan yang pada dasarnya adalah untuk mendorong masyarakat mempunyai sikap mental yang positif yang mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari pemecahan masalah yang dilakukan.

Sasaran dari pelaksanaan pelatihan pada intinya terjadinya perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat, untuk itu proses evaluasi yang dilaksanakan juga dengan cara menilai sikap dan cara pandang masyarakat tersebut, bukan melalui kegiatan-kegiatan evaluatif yang bersifat formal. Dalam penelitian ini dilakukan upaya untuk mengetahui sejauh mana keluaran atau output kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, apakah dapat mempengaruhi sikap

dan cara pandang masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, melalui pengisian kuesioner yang berisi tanggapan masyarakat pada masing-masing aspek pemberdayaan masyarakat, yang didukung pula dengan penjelasan-penjelasan yang lebih detail dari masyarakat yang didapatkan melalui wawancara atau tidak.

Hasil adalah keluaran yang akan dicapai atau yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu kegiatan dari input yang tersedia untuk terlaksananya suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu proyek/program.

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini, hasil yang akan diteliti adalah keluaran program, apakah program yang dijalankan sesuai dengan harapan atau tidak. Hasil tersebut antara lain : 1) Kemampuan menyusun rencana, 2) Mengetahui peraturan kelompok, 3) Mengetahui tempat&waktu pertemuan, 4) Kemampuan kerjasama kelompok, 5) Memanfaatkan sarana prasarana, 6) Peningkatan kelembagaan di desa, 7) Memfasilitasi pembangunan partisipatif (Kepala desa, Badan Permusyawarahan Desa (PBD), Tim pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan, 8) Berfungsi dan bermanfaatnya PNPM, 9) Terlembaganya pengelolaan dana bergulir, 10) Berkembangnya kerjasama antar desa, dan 11) Peningkatan para pemangku dalam penanggulangan kemiskinan. Dari hasil penelitian, hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mendapatkan skor rata-rata dilapang sebesar 2,51 dan Persentase sebesar 89,31 dengan kategori Tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hasil kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dapat dilihat pada tabel 23 berikut :

Tabel 23. Output Pelaksanaan PNPM di desa Supenuh Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan

No	Tahap yang dilaksanakan	Skor Maksimal	Skor rata-rata di lapang	%	Kategori
1	Kemampuan menyusun rencana	3	2,23	74,33	Sedang
2	Mengetahui peraturan kelompok	3	1,97	65,67	Sedang
3	Mengetahui tempat&waktu pertemuan	3	3	100	Tinggi
4	Kemampuan kerjasama kelompok	3	1,17	59	Sedang
5	Memfaatkan sarana prasarana	3	2,83	94,33	Tinggi
6	Peningkatan kelembagaan di desa	3	2,73	91	Tinggi
7	Memfasilitasi pembangunan partisipatif	3	2,43	81	Tinggi
	Kepala desa	3	3	100	Tinggi
	Badan Permusyawarahan Desa (PBD)	3	2	66,67	Sedang
	Tim pengelola Kegiatan (TPK)	3	3	100	Tinggi
	Tim Penulis Usulan	3	2	66,67	Sedang
8	Berfungsi dan bermanfaatnya PNPM	3	3	100	Tinggi
9	Terlembaganya pengelolaan dana bergulir	3	2,73	91	Tinggi
10	Berkembangnya kerjasama antar desa	3	2,83	94,33	Tinggi
11	Peningkatan para pemangku dalam penanggulangan kemiskinan	3	2,67	89	Tinggi
Jumlah		45	37,59	1303,01	
Rata-rata		3	2,51	89,31	Tinggi

Sumber : Analisis data primer 2011

Hasil dari kegiatan PNPM di desa Supenuh kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan menyusun rencana

Tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan tergolong sedang. Setelah adanya kegiatan PNPM terjadi peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai dari perencanaan sampai dengan pelestarian. Anggota PNPM mengetahui penyusunan rencana kerja PNPM dengan skor rata-rata dilapang sebesar 2,23, Dimana anggota mengetahui rencana yang disusun tetapi tidak dikatehui apa

rencana tersebut. Hal ini disebabkan karena pada saat penyusunan rencana kegiatan anggota kurang fokus hal tersebut sehingga mereka tidak mengetahui apa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PNPM. Kegiatan ini mendapatkan Persentase sebesar 74,33% dan termasuk dalam kategori sedang. Selain itu tingkat keberanian masyarakat dalam memberikan masukan atau usulan dalam kegiatan pertemuan penyusunan rencana yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan tergolong cukup sedang, dimana pada umumnya warga yang aktif dalam berpendapat hanya orang-orang tertentu saja, dan kebanyakan warga selalu mengikut pendapat-pendapat yang disampaikan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Mengetahui peraturan kelompok

Kedua yaitu menyusun dan mengetahui peraturan kelompok. Sama halnya pada tahap pertama pada tahap ini anggota PNPM ikut menyusun peraturan kelompok dengan skor rata-rata dilapang sebesar 1,97, dimana anggota kelompok ikut menyusun peraturan kelompok akan tetapi tidak mengetahui peraturan kelompok yang telah disepakati. Kegiatan ini mendapatkan Persentase sebesar 65,67% dan termasuk dalam kategori sedang.

3. Mengetahui tempat dan waktu pertemuan

Ketiga yaitu mengetahui waktu dan tempat pertemuan kelompok, dimana semua anggota PNPM mengetahui waktu dan tempat pertemuan kelompok yaitu bertempat di balai desa Supenuh. Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang sebesar 3, Persentase sebesar 100% dan tergolong dalam kategori tinggi.

Dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat pada pengetahuan tentang tempat dan waktu pelaksanaan terhadap persoalan kemiskinan dalam komunitasnya tidak memiliki hubungan dengan peran responden, tingkat pendidikan responden dan usia responden, maupun kelamin responden. Hal ini dapat diartikan bahwa apapun perannya dalam PNPM MP, apapun tingkat pendidikannya, maupun usianya tidak mempengaruhi kesadarannya terhadap persoalan kemiskinan dalam komunitasnya, karena semua responden mengetahui dimana tempat dan waktu

pertemuan yang dilakukan dalam membahas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

4. Kemampuan kerjasama kelompok

Keempat yaitu tingkat kerjasama kelompok dalam PNPM. Tingkat kerjasama Kelompok atau pelaku PNPM di Desa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM MP tergolong sedang dengan skor rata-rata dilapang 1,77. Pada poin ini masyarakat merasa kurang adanya kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata, sehingga tugas yang diberikan kurang memberikan hasil yang maksimal. Kegiatan ini mendapatkan Persentase sebesar 59% dan termasuk dalam kategori sedang.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapang, kerjasama dalam proses pembangunan sangat terlihat. Hal ini dikarenakan adanya modal sosial yang kuat antar masyarakat dalam proses pembangunan. Dimana modal sosial merupakan modal dasar dari adanya ikatan sosial yang kuat yaitu adanya kerjasama di antara anggota kelompok atau organisasi yang akan terbangun apabila ada kerjasama di antara semua warga masyarakat. Kerjasama akan terbangun dengan baik apabila berlandaskan kepercayaan di antara para anggotanya.

5. Memanfaatkan sarana prasarana

Pemanfaatan sarana prasarana dan pengembangan kegiatan simpan pinjam yang mendapatkan skor rata-rata dilapang sebesar 2,83. Dimana sebagian besar masyarakat, khususnya anggota PNPM memanfaatkan sarana prasarana yang telah dibangun dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dengan baik. Terdapat pula beberapa orang yang kurang mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dikarenakan bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk modal usaha akan tetapi digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari.

Pemanfaatan pada aspek pembangunan saluran drainase dan perbaikan jalan sangat dirasakan oleh masyarakat, terbukti dengan adanya kegiatan kerja bakti yang dilakukan setiap bulan. Masyarakat sangat merasakan manfaat kegiatan pembangunan tersebut karena warga masyarakat menjadi lebih mudah dalam menjalankan transportasi, sehingga dapat

mempercepat aktivitas mereka dan mempermudah dalam hal penjualan hasil panen. Kegiatan ini mendapatkan Persentase sebesar 94,33% dan termasuk dalam kategori tinggi.

6. Peningkatan kelembagaan di desa

Dengan adanya kegiatan PNPM maka masyarakat ikut merasakan adanya peningkatan kelembagaan di desa antar desa. Mereka mengatakan dengan adanya kegiatan PNPM maka koordinasi di desa dan lembaga-lembaga desa semakin terlihat kerjasamanya, selain itu juga terdapat pemberdayaan masyarakat desa dalam hal pengembangan usaha karena disediakannya modal dari PNPM. Dalam hal ini peningkatan kelembagaan di desa mendapatkan skor rata-rata dilapang sebesar 2,73, Persentase sebesar 91% dan termasuk dalam kategori tinggi.

Sesuai konsep kelembagaan PNPM mandiri Perdesaan, semua jenjang pemerintahan dari pusat sampai ke tingkat desa berfungsi memberikan fasilitasi pelaksanaan program dalam bentuk pendanaan dan penyediaan fasilitator. Peran perangkat kecamatan adalah sebagai fasilitator, camat merupakan pembina pelaksanaan program dan terdapat seorang Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) yang berfungsi memberikan fasilitasi secara administratif. Masyarakat di tingkat kecamatan membentuk BKAD yang berwenang merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan. Anggota BKAD berasal dari tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah antar desa. Semua keputusan yang ditetapkan dalam forum MAD yang dihadiri perwakilan perangkat desa, kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat.

Untuk pelaksanaan teknis kegiatan, BKAD memiliki Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan tim verifikasi (TV). UPK ini merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan yang meliputi fisik, sosial dan perguliran yang telah disediakan. Badan Pengawas UPK melakukan pemeriksaan dalam aspek pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. Tim Verifikasi adalah lembaga yang berperan melakukan verifikasi terhadap kelayakan usulan masyarakat dan membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai

dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Di desa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang anggotanya dipilih melalui musyawarah desa. TPK berfungsi sebagai pelaksana teknis program dengan melibatkan kelompok masyarakat yang ada di desa. Untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat desa, diperlukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berasal dari masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan sosial, dan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan. Kepala desa beserta perangkatnya menyusun peraturan desa untuk mendukung terlaksananya PNPM Mandiri Perdesaan yang partisipatif. BPD juga berperan sebagai pengawas terhadap seluruh proses PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa.

7. Memfasilitasi pembangunan partisipatif

Dengan adanya kegiatan PNPM, terjadi peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif tidak lepas dari pelaku utama PNPM (masyarakat). Selain masyarakat, terdapat pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam pelaksanaan PNPM di desa, diantaranya adalah Kepala desa yang memfasilitasi dalam hal pembinaan dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, khususnya di desa Supenuh. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memfasilitasi dalam hal pengawasan proses dari tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) memfasilitasi dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. dan Tim Penulis Usulan (TPU) memfasilitasi dalam hal menyiapkan gagasan – gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan dan dengan adanya lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Sugio khususnya di Desa Supenuh dapat digunakan sebagai media perubahan menjadi lebih baik. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini merupakan lembaga yang dibentuk dari Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan fungsi sebagai pengelola dana

bergulir dan memberdayakan masyarakat lokasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan program kemandirian masyarakat berupa lembaga menyediakan modal sosial (*Social Capital*) bagi masyarakat, khususnya RTM dan dimasa yang akan datang. PNPM-Mandiri Perdesaan di desa Supenuh menyiapkan program pembangunan berikutnya dalam kurun waktu 5 tahun atau yang disebut dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Dari hasil laporan fasilitator kleurahan dan dokumen berita acara pelaksanaan kegiatan dipaparkan data mengenai siklus ini. Peyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dilakukan setelah terbentuknya BKAD beberapa waktu silam. Kegiatan siklus ini dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Supenuh dilaksanakan selama 3 bulan tepatnya tanggal 15 Desember 2009 sampai 15 Maret 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Supenuh harus dilakukan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, meskipun demikian setiap tahunnya akan diadakan evaluasi oleh pemerintah Desa dengan seluruh warga, apabila dipandang perlu dan mendesak untuk diadakan revisi, maka RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) tersebut akan melakukan revisi berdasarkan informasi dan data lapangan dengan perhitungan yang matang.

8. Berfungsi dan bermanfaatnya PNPM

PNPM Mandiri secara nyata berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 3 atau sebesar 100% dan tergolong kategori tinggi. Kegiatan PNPM berfungsi sebagai kelancaran perekonomian dalam bentuk perbaikan infrastruktur desa. Selain itu, program PNPM tersebut juga memberikan manfaat bagi perkembangan usaha kecil masyarakat. Manfaat lain adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan PNPM dengan besarnya dana swadaya masyarakat. Kesadaran dan partisipasi masyarakat

juga semakin meningkat terhadap program yang dijalankan, karena sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan mereka.

9. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir

Program dana bergulir yang berbasis masyarakat tersedia sebagai upaya mempermudah masyarakat, khususnya RTM yang tidak memiliki atau memiliki keterbatasan pada akses sumber-sumber kredit. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM. Seperti yang dikatakan salah satu anggota PNPM Mandiri Perdesaan, HW, yaitu :

“Dengan adanya dana perguliran dapat membantu modal bagi pedagang kecil, karena tanpa jaminan, akan tetapi sebaiknya dana bergulir ini bisa digunakan juga untuk kebutuhan dalam hal pertanian, menginagat harga pupuk mahal dan kurangnya dana maka saya harap PNPM juga meminjamkan dana untuk kelompok tani, sehingga bisa dijadikan modal awal untuk kebutuhan pupuk masyarakat setempat ”.

10. Berkembangnya kerjasama antar desa

Hasil kegiatan PNPM juga terlihat pada terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini terjadi dengan adanya kegiatan PNPM hubungan kerjasama dalam pengelolaan pembanagan di desa dan antar desa semakin baik karena antar desa bisa kerja sama dalam berbagai bidang usaha. Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 2,83 atau sebesar 94,33% dan tergolong kategori tinggi.

BKAD, sebagai dewan pimpinan kolektif , yang bertanggung jawab untuk menggerakkan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan, bertugas untuk membangun modal sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal (potensi) yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjaringan dan bekerjasama di antara sesama warga, maupun dengan pihak luar. Modal sosial yang dibangun BKAD membentuk kerjasama yang baik antara lain : 1) dapat menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKAD di berbagai kecamatan, 2) dapat menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan

antara BKM dengan warga masyarakat, 3) dapat menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antar kelompok masyarakat, dan 4) dapat menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKAD, masyarakat dan pihak luar. sehingga dengan keterbukaan dan kejujuran di antara anggota BKAD, yang merupakan unsur yang paling penting untuk bekerjasama, maka kerjasama yang antar desa akan berjalan dengan baik.

11. Peningkatan para pemangku dalam penanggulangan kemiskinan

Hasil kegiatan PNPM dapat meningkatkan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. Peningkatan yang terjadi dalam bentuk swadaya masyarakat demi peningkatan kemajuan dan kesejahteraan desa. Kegiatan ini mendapatkan skor rata-rata dilapang 2,67 atau sebesar 89% dan tergolong kategori tinggi.

Swadaya ini merupakan kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki dan ikut berpartisipasi terhadap adanya program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelestarian program. Swadaya bisa berupa sumbangan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan ini adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan tidak merasa dipaksa oleh pelaku PNPM.

Kemiskinan akibat dari pengaruh faktor pendidikan yang rendah; alokasi anggaran kredit yang terbatas; terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar; rendahnya produktivitas dan pembentukan modal; serta rendahnya jaminan kesehatan mengingatkan para pemangku aparat desa betapa pentingnya peningkatan penanggulangan kemiskinan. Dari dari beberapa masalah tersebut diperlukan adanya upaya penanggulangan kemiskinan. Dimana di daerah Supenuh ini upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan meliputi :

- a. Membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh kredit usaha yang mudah. Sistem kredit yang ada saat ini, belum memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa disebabkan bunga yang terlalu besar. Karena itu, diperlukan kebijakan baru yang

memberikan jaminan kredit usaha yang memadai bagi masyarakat desa, dalam hal ini dilaksanakan dalam program PNPM melalui kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

- b. Memberikan ruang yang cukup luas bagi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Memberikan sarana transportasi yang menunjang akses menuju pasar dan mempermudah untuk mendapatkan informasi.
- d. Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai dan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit-unit layanan kesehatan kepada masyarakat desa yang miskin yang mana rencana program ini akan dilaksanakan dalam RPJMDes.



VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian maka faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah sebagai berikut:

- Faktor internal terdiri dari umur, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, dan pengalaman berusaha.
- Faktor eksternal terdiri dari modal dan jaminan pemasaran hasil.

2. Proses pelaksanaan PNPM terdiri dari : *Perencanaan*, kegiatannya meliputi : sosialisasi, klarifikasi, klasifikasi, identifikasi kebutuhan, musyawarah desa, penulisan usaha dan verifikasi usulan. *Pelaksanaan*, kegiatannya meliputi : lokakarya pra pelaksanaan, Musdes Pra pelaksanaan, dan pencairan dana. *Evaluasi* Kegiatan pada ada tahap evaluasi PNPM meliputi pelaporan jalur structural dan pelaporan jalur fungsional. *Pelestarian kegiatan*, dapat dilihat dari proses pengembangan dalam kelembagaan BKM kepada orang-orang muda yang belum pernah terlibat sebelumnya serta adanya motivasi untuk mendapatkan pencapaian yang lebih besar yaitu keinginan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah terkait masalah kemiskinan. *Output*, sebagai berikut :1) Anggota PNPM mempunyai kemampuan menyusun rencana, mengetahui peraturan kelompok, mengetahui tempat dan waktu pertemuan, memiliki kemampuan kerjasama kelompok, dapat memanfaatkan sarana prasarana dari PNPM dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan, 2) Terjadi peningkatan kelembagaan di desa, 3) Memfasilitasi pembangunan partisipatif, 4) Terlembaganya pengelolaan dana bergulir , 5) Berkembangnya kerjasama antar desa, 6) Berfungsi dan bermanfaatnya PNPM ,7) Terjadi peningkatan para pemangku dalam penanggulangan kemiskinan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapang serta kesimpulan, maka kami menyampaikan beberapa saran yang terdiri dari saran akademis dan saran praktis, sebagai berikut:

1. Saran akademis
 - a. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berkelanjutan sehingga evaluasi pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari sebelum program dilaksanakan, awal pelaksanaan program, dan evaluasi periodik setelah pelaksanaan program, untuk itu diperlukan studi lebih lanjut mengenai evaluasi pemberdayaan pada tiap-tiap tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.
 - b. Lingkup kajian mengenai evaluasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam sebuah komunitas, sedangkan program pemberdayaan yang dilaksanakan adalah sebuah program dalam skala nasional, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan padamasing-masing tingkatan, baik di tingkat regional, wilayah, maupun nasional.
2. Saran Praktis
 - a. Masyarakat selaku pelaksana program pemberdayaan belum sepenuhnya mempunyai keberdayaan dan tingkat kemandirian yang cukup untuk mengelola pembangunan dalam komunitasnya, untuk itu peran dan keberadaan fasilitator pendamping masih diperlukan dan harus tetap dipertahankan sampai masyarakat benar-benar terbiasa dengan proses-proses pemberdayaan yang dijalankan.
 - b. Perlu adanya penambahan kegiatan-kegiatan dan porsi pembelajaran yang lebih banyak bagi kaum perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran dan keterlibatannya dalam pembangunan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
 - c. Untuk PNPM agar dapat terus melanjutkan kinerjanya, agar manfaatnya dapat terus dirasakan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002).
- Adimihardja, Kusnaka, *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2001).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Putra.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Kecamatan Sugio dalam Angka Tahun 2010*. BPS Lamongan.
- BAPPENAS, 1997. *Gerakan Nasional Penanggulangan Keiskinan : Kajian Bersama Pengembangna Kebijakan*. Ringkasan Eksekutif.
- BPD Supenuh. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*. Desa Supenuh.
- Cousins, J. Bradley, 2005, *Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up?: A Critical Friend Perspective*, *Empowerment Evaluation: Principles in Practice*, New York: The Gulford Press
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007, *Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow*, *American Journal of Evaluation* 2007; 28; 179
- Guijt, Irene, 2000, *Methodological Issues in Participation Monitoring and Evaluation, Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation*, Canada: ITDG Publishing
- Hidayat, Hamid. 1989. *Diklat Kuliah Metode Penelitian Sosial*. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya: Malang.
- Hikmat, R. Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001)

- Ife, James. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Longman, Australia,
- Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administratif, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada FIA*. Universitas Brawijaya. Malang
- Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administratif, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada FIA*. Universitas Brawijaya. Malang
- Mardikanto, Totok. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. LPP dan UPT UNS (UNS Press). Surakarta
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Mubarok, Zaki. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Di desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*.
- Mubyarto. 1999. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Laporan Tindak program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, 1994. *The Integration of Social Work Practice*. Wadsworth, Inc., California
- pemberdayan_masyarakat_htm
- Poerwadarminta, W.J.S, 1986. *Kamus Umum basaha Indonesia*. Balai Pustaka. Surabaya.
- Rusianah, Arik. 2008. *Evaluasi Kinerja Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai Pengelola Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin)*. Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang
- Sayogyo, 1997. *Garis kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Jakarta: Penerbit HJPIS.

- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta
- Soedarmanto, 1992 . *Dasar – dasar dan Pengelolaan Penyuluhan Pertanian*. FP. Unibraw.
- Soedarmanto. 2000. *Penyuluhan Pertanian; Teori dan Aplikasinya*. Program Studi Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suhardiyono. L. 1989. *Petunjuk Bagi Penyuluh Pertanian*. Erlangga. Jakarta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutisna, Oteng. 2000. *Administrasi Pendidikan Dasar Teoretis untuk Praktek Profesional*. Bandung. Angkasa.
- Sutrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tampubolon, Mangatas. 2001. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah Jakarta*.
- Tim Pengendali PNPM Mandiri. (2007). *Pedoman Umum. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial.

Lampiran 1. Kuisisioner untuk pengurus kelompok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Supenuh, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan

Dengan hormat.

Saya mahasiswi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu dalam pengisian kuisisioner berikut ini. Kuisisioner ini merupakan sumber data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian guna menyelesaikan skripsi saya dengan judul “Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Pedesaan Di Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)”

Besar harapan saya agar Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan jawaban yang sebenarnya. Atas kerjasama yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya.

Hevi Nur Aisyah

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) SEBAGAI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(Studi Pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Pedesaan Di Desa
Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)**

**No. Kuisisioner :
Tanggal wawancara :**

2. Nama :
3. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Umur :
5. Pendidikan :
6. Jabatan :
7. Pekerjaan :

TAHAP PERENCANAAN

- 1) Sosialisasi di desa/kelurahan dilaksanakan dalam bentuk musdes dan diikuti unsur RT/RW, unsur perempuan, unsur LKMD, wakil RTM, pemerintah dan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Agenda musdes sosialisasi meliputi :

1. Penjelasan program oleh kepala desa.
2. Kegiatan sosialisasi melalui papan informasi, media hiburan, pamphlet, dan pameran
3. TPK bersama-sama UPK melakukan sosialisasi kepada RTM sasaran program

Apakah

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

- 2) Klarifikasi RTM, merupakan kegiatan mengecek kesesuaian data RTM secara obyektif di lapangan. Kegiatan ini meliputi :

1. Kegiatan diskusi kelompok terfokus
2. Musyawarah ditingkat RT/RW/Dusun
3. Melakukan pengamatan secara langsung dan menayakan kepada RTM.

Apakah

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

- 3) Klasifikasi RTM

Klasifikasi RTM adalah mengelompokkan RTM hasil klarifikasi kedalam kategori RTM Berpotensi dan RTM Rentan. Kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif
2. Kegiatan membukak usaha baru
3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana.

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas

c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

4) Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan adalah aktivitas menggali usulan kegiatan.

A. Pemberdayaan Usaha (simpan pinjam perempuan), meliputi :

1. Penjelasan tata cara peminjaman melalui forum perwakilan RTM
2. Pembentukan pokmas secara sukarela dari kalangan RTM
3. Pembahasan pengelolaan usaha

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

B. Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan, meliputi :

1. Perbaikan rumah tangga RTM dan penyediaan sarana air bersih
2. Pengembangan fasilitas umum
3. Penyediaan sarana yang menunjang ekonomi desa, seperti SPP.

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

5) Musdes perencanaan

Musdes dihadiri oleh perwakilan RTM, wakil dan tokoh masyarakat lainnya, kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan pemaparan hasil identifikasi kebutuhan masing – masing Dusun/kelompok
2. Kegiatan musyawarah dalam penetapan usulan kegiatan
3. Kegiatan pembentukan TPK

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

6) Penulisan usulan desa/kelurahan

Penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan penulisan usulan pemberdayaan usaha
2. Kegiatan penulisan usulan pemberdayaan manusia
3. Kegiatan penulisan usulan pemberdayaan lingkungan

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

7) Verifikasi usulan

Materi verifikasi membahas usulan kegiatan yang meliputi :

1. Jenis kegiatan
2. Kesesuaian anggaran
3. Jadwal pelaksanaan

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

8) Pengesahan Dokumen SPPB. kegiatannya meliputi :

1. Musyawarah sebelum melakukan pengesahan dokumen.
2. Pengesahan SPPB dilakukan oleh ketua TPK, PjOK, Ketua UPK, kades, dan camat.
3. Melampirkan dokumen SPPB

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

TAHAP PELAKSANAAN

1. Pencairan dana

Dana bantuan PNPM dilakukan oleh UPK dalam Bentuk :

1. Pinjaman modal kepada Pokmas
2. Kegiatan pemberdayaan manusia
3. Kegiatan pemberdayaan lingkungan

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

2. Lokakarya pra pelaksanaan

Lokakarya pra pelaksanaan dilaksanakan dikabupaten dengan agenda :

1. Penjelasan persiapan pelaksanaan
2. Tukar pendapat, pemberian saran pada desa
3. Koordinsai dan konsultasi dengan berbagai dinas.

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

3. Musdes pra pelaksanaan

Agenda Musdes pra pelaksanaan antara lain :

1. Penjelasan alokasi penggunaan dana yang diterima Desa oleh pemerintah desa
2. Penjelasan mekanisme pelayanan pinjaman modal usaha kepada pokmas
3. Pembentukan TPK dan rencana realisasi masyarakat.

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

4. Pelaksanaan kegiatan

C. Kegiatan pemberdayaan usaha (simpan pinjam perempuan), meliputi :

1. Pelayanan permohonan pinjaman
2. Analisis kelayakan usaha dan peminjaman
3. Penetapan pinjaman pokmas yang layak didanai dan penandatanganan pinjaman.

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

D. Kegiatan Pemberdayaan lingkungan (perbaikan sarana prasarana – jalan poros rabat beton), kegiatannya meliputi :

1. Mengoptimalkan partisipasi dan pendayagunaan potensi swadaya masyarakat.
2. Kegiatan diharapkan mampu menyerap pengangguran yang ada di desa/kelurahan
3. Kegiatan dilakukan secara swakelola oleh TPK

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

TAHAP PELESTARIAN KEGIATAN

Pelestarian program dilaksanakan dengan kegiatan :

1. Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan
2. Mewujudkan profesionalisme kinerja organisasi dan manajemen UPK
3. Penguatan UPK pasca program diarahkan untuk terwujudnya Badan Usaha Milik Desa (BUMD)

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

TAHAP EVALUASI

Pertanggungjawaban Program

- i. Pelaporan jalur struktural (pertanggungjawaban administrative), kegiatannya meliputi :

1. Membuat laporan proses pelaksanaan program
2. Membuat laporan hasil kegiatan program
3. Realisasi penggunaan dana program

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan kegiatan diantara 3 butir di atas

- ii. Pelaporan jalur fungsional (pertanggungjawaban publik), kegiatannya meliputi:

1. Penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program dalam musdes pertanggungjawaban.
2. Hasil musdes pertanggungjawaban dituangkan dalam berita acara
3. Hasil musdes pertanggungjawaban dilaporkan UPK kepada kabupaten/kota.

Apakah.....

- a. Melaksanakan ke-3 butir kegiatan di atas
- b. Melaksanakan 2 kegiatan diantara 3 butir di atas
- c. Melaksanakan 1 kegiatan diantara 3 butir di atas

Lampiran 2. Kuisisioner untuk responden / anggota kelompok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Supenuh, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan

Dengan hormat.

Saya mahasiswi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu dalam pengisian kuesioner berikut ini. Kuesioner ini merupakan sumber data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian guna menyelesaikan skripsi saya dengan judul “Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Pedesaan Di Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)”

Besar harapan saya agar Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan jawaban yang sebenarnya. Atas kerjasama yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya.

Hevi Nur Aisyah

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) SEBAGAI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
(Studi Pada Pelaksanaan Program PNPM – Mandiri Pedesaan Di Desa
Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)**

No. Kuesioner :
Tanggal wawancara :

2. Nama :
3. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Umur :
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :

Faktor Internal

7. Berapa umur Bapak/Ibu/Saudara ketika mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ?
 - a. < 30 tahun
 - b. 30 – 50 tahun
 - c. > 50 tahun
8. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Saudara ketika mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ?
 - a. SLTA
 - b. SLTP
 - c. SD
9. Berapa Jumlah Anggota Keluarga Bapak/Ibu/Saudara ketika mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ?
 - a. > 3 orang
 - b. 3 – 5 orang
 - c. > 5 orang
10. Berapa lama Pengalaman Berusaha yang sudah Bapak/Ibu/Saudara lakukan ketika mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ?
 - a. > 2 tahun
 - b. 1 – 2 tahun X
 - c. < 1 tahun

Faktor Eksternal

1. Dari manakah modal yang Bapak/Ibu/Saudara peroleh ketika mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ?
 - a. Kredit
 - b. Tabungan
 - c. Tidak ada modal
2. Kemana Bapak/Ibu/Saudara akan menjual hasil pertanian ?
 - a. Dijual sendiri
 - b. Dijual ke tengkulak
 - c. Dikosumsi sendiri

Variable output Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai dari perencanaan sampai dengan pelestarian.
 - i. Bagaimana tingkat kemampuan bapak/ibu menyusun rencana kerja PNPM?
 - a. Rencana disusun dan diketahui dengan baik
 - b. Rencana disusun dengan baik tetapi tidak diketahui.

- c. Rencana kelompok tidak tersusun dengan baik.
 - ii. Apakah bapak/ibu ikut menyusun dan mengetahui peraturan kelompok yang telah disepakati ?
 - a. Peraturan disusun dan diketahui
 - b. Peraturan disusun tetapi belum diketahui
 - c. Peraturan belum disusun dan tidak diketahui
 - iii. Apakah bapak/ibu mengetahui waktu dan tempat pertemuan kelompok?
 - a. Waktu dan tempat pertemuan diketahui
 - b. Waktu dan tempat pertemuan belum diketahui
 - c. Waktu dan tempat pertemuan tidak diketahui
 - iv. Bagaimana tingkat kemampuan kerjasama kelompok bapak/ibu dalam PNPM ?
 - a. Adanya kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata
 - b. Kurang adanya kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata
 - c. Belum adanya kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata
 - v. Apakah bapak/ibu memanfaatkan sarana prasarana yang telah dibangun dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dengan baik ?
 - a. Memanfaatkan sarana prasarana dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan
 - b. Kurang memanfaatkan sarana prasarana dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan
 - c. Tidak memanfaatkan sarana prasarana dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan
2. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa. Dengan adanya PNPM apakah bapak/ibu merasakan terjadinya peningkatan kelembagaan di desa dan antar desa ?
- a. Ya
 - b. Kurang merasakan

- c. Tidak merasakan

Alasan.....

Poin no 3 di isi oleh Pelaku PNPM

3. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif

- 2) Dengan adanya PNPM apakah bapak/ibu ikut serta dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif di desa?

- a. Ya
 b. Kurang memfasilitasi
 c. Tidak memfasilitasi

Alasan.....

- 2) Jika “IYA” sebagai apa bapak/ibu dalam pelaksanaan PNPM ?

Kepala Desa

- a. Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa
 b. Pembina dan pengendali kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.
 c. Pengendali kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Pengawas proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program di desa
 b. Pengawas proses dari tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan.
 c. Pengawas proses dari tahapan PNPM Mandiri Perdesaan dari perencanaan dan pelaksanaan.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan.

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM di desa

Tim Penulis Usulan (TPU)

- a. Menyiapkan dan menyusun gagasan – gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan.
 - b. Menyiapkan gagasan – gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.
 - c. Menyiapkan gagasan – gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah khusus perempuan saja.
4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat

Menurut bapak/ibu apakah hasil kegiatan PNPM dapat berfungsi dan dirasakan manfaatnya ?

- a. Ya
- b. Kurang berfungsi dan dirasakan manfaatnya
- c. Tidak berfungsi dan dirasakan manfaatnya

Alasan dan contoh manfaatnya

.....

.....

5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM.

Menurut bapak/ibu apakah pengelolaan dana bergulir dapat berjalan dengan baik dan tersedianya akses ekonomi ?

- a. Ya
- b. Kurang dapat berjalan dengan lancar
- c. tidak berjalan dengan lancar

Alasan.....

.....

6. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan pembangunan.



Dengan adanya PNPM menurut bapak/ibu apakah terjadi hubungan kerjasama dalam pengelolaan pembanangunan di desa dan antar desa?

- a. Terjadi hubungan kerjasama dalam pengelolaan pembanangunan di desa dan antar desa
- b. Kurang terjadi kerjasama dalam pengelolaan pembanangunan di desa dan antar desa.
- c. Tidak kerjasama dalam pengelolaan pembanangunan di desa dan antar desa

Alasan.....

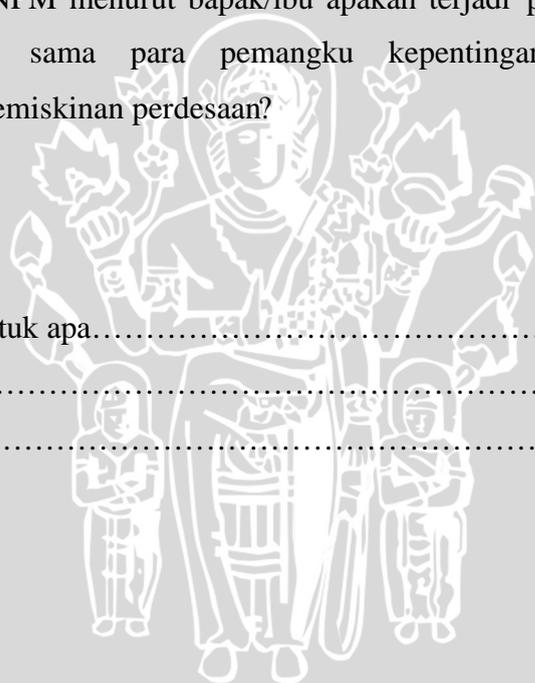
7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Dengan adanya PNPM menurut bapak/ibu apakah terjadi peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan?

- a. Iya
- b. Kurang terjadi
- c. Tidak terjadi

jika iya, dalam bentuk apa.....

Alasan.....



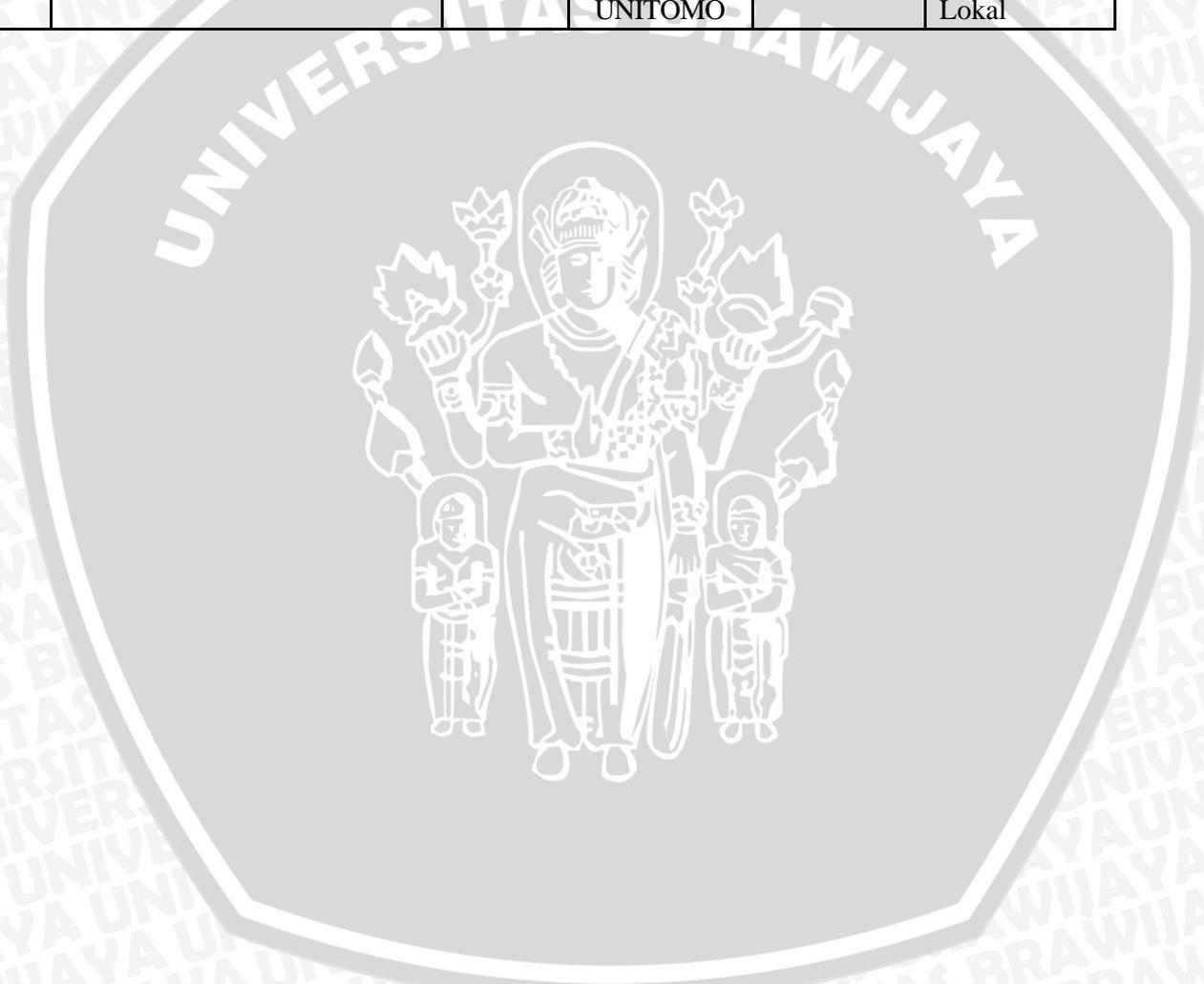
Lampiran 3. Data responden

Data Responden

No	Nama	Umur (Th)	Tingkat pendidikan	Pekerjaan
1	Edy suyitno	35	SMA	Swasta
2	Sutrisno	46	SMA	Swasta
3	Hudi Wiarno	39	SMA	Swasta
4	Bagong Yanuar	28	S1	Swasta
5	Jualikah	43	SMA	Dagang
6	Siti Zaenab	46	SMP	Dagang
7	Rubekti	40	SMP	Warung
8	Samilah	61	SD	Warung
9	Tarminen	35	SMA	Warung
10	Tutik	32	SMP	Dagang
11	Ramini	43	SMP	Warung
12	Marseh	48	SMP	Dagang
13	Kisnah	58	SMP	Pracangan
14	Jamini	46	SMP	Dagang
15	Muayah	48	SMA	Dagang
16	Surati	52	SD	Pracangan
17	Sukaimi	47	SMP	Dagang
18	Sriani	38	SMA	Dagang
19	Endang M	41	SMA	Dagang
20	Sustianingsih	40	SMA	Dagang
21	Nasri	51	S1	Dagang
22	Lilik kurdianingsih	32	SMA	Dagang
23	Elvi laelatifah	35	S1	Dagang
24	Tarmini	44	SMP	Petani
25	Masrap	46	SMA	Petani
26	Jumani	44	SMP	Ibu rumah tangga
27	Suwarni	43	SMP	Toko
28	Mustik	30	SMP	Ibu rumah tangga
29	Heri Subagio	33	SMA	Swasta
30	Ade irma	40	S1	Conter Hp

Lampiran 4. Data Pengurus UPK

No.	Nama Responden	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Jabatan
1	Tutik Kuntari	55	SMA	Swasta	Ketua UPK
2	Ahmad Syaifuddin, Amd, Teks	28	D3	Swasta	Sekretaris UPK
3	Januar Hadi, M	22	D1	Swasta	Bendahara UPK
4	Faisol Ubaidillah, ST	32	S1 UNMER	Swasta	Fasilitator Teknik
5	Indria Puspita, R, S. AB	31	S1, FIA UB	Swasta	Fasilitator Kecamatan
6	Handri Afandi, SE	33	S1, UNITOMO	Swasta	Pendamping Lokal



Lampiran 5. Analisis skala Likert Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

No	Nama	Sosialisasi di desa	Klarifikasi RTM	Klasifikasi RTM	Pemberdayaan Usaha	Pemberdayaan Lingkungan	Musdes perencanaan	Penulisan usulan desa	Verifikasi usulan	Pengesahan dokumen SPPB
1	Tutik	3	3	2	2	2	3	2	3	3
2	Indria	2	3	2	2	2	3	2	3	3
3	Faisol	2	3	2	2	2	3	2	3	3
4	Handri	3	3	2	2	2	3	2	3	3
5	Ahmad S	2	3	2	2	2	3	2	3	3
6	Januar H	2	3	2	2	2	3	2	3	3
7	Hudi	2	2	2	2	2	3	-	-	-
8	Edy S.	3	2	2	2	2	3	-	-	-
9	Sutrisno	2	2	2	2	2	3	-	-	-
10	Bagong	2	2	2	2	2	3	-	-	-
11	Julaikah	2	2	2	2	2	3	-	-	-
12	Siti Z	1	2	2	2	2	3	-	-	-
13	Rubekti	2	1	1	1	2	1	-	-	-
14	Samilah	1	1	1	2	2	1	-	-	-
15	Tarminen	1	1	1	1	2	2	-	-	-
16	Tutik	1	1	2	1	2	1	-	-	-
17	Ramini	1	1	1	2	2	2	-	-	-
18	Marseh	1	1	1	2	1	2	-	-	-

19	Kisnah	1	1	1	2	2	2	-	-	-
20	Jamini	1	1	2	1	2	3	-	-	-
21	Muayah	1	1	2	2	2	3	-	-	-
22	Surati	1	1	2	2	2	3	-	-	-
23	Sukaimi	1	1	2	1	2	3	-	-	-
24	Sriani	1	1	2	2	2	3	-	-	-
25	Endang	1	2	2	2	2	3	-	-	-
26	Sustia N	3	2	2	2	2	3	-	-	-
27	Nasri	2	2	2	2	2	2	-	-	-
28	Lilik K	2	2	2	2	2	3	-	-	-
29	Elvy	1	1	2	2	1	3	-	-	-
30	Tarmini	2	2	2	2	2	3	-	-	-
31	Masrap	2	2	2	2	2	2	-	-	-
32	Jumani	1	1	2	2	2	2	-	-	-
33	Suwarni	3	3	2	2	2	3	-	-	-
34	Mustik	2	1	2	2	1	2	-	-	-
35	Heri	2	1	2	2	2	2	-	-	-
36	Ade I.	1	1	2	2	2	2	-	-	-
Jumlah		61	62	66	67	69	92	12	18	18
Rata lapang		1,70	1,72	1,83	1,86	1,92	2,56	2	3	3
Persentase (%)		56,7	57,33	61	62	64	85,3	66,67	100	100
Kategori		Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi

Lampiran 6. Analisis skala Likert Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

No	Nama	Pelaksanaan					Evaluasi		Pelestarian
		Pencairan dana	Lokakarya pra pelaksanaan	Musdes pra pelaksanaan	Pemberdayaan Usaha	Pemberdayaan Lingkungan	Pelaporan jalur struktural	Pelaporan jalur fungsional	
1	Tutik	3	3	3	3	3	3	3	2
2	Indria	3	3	3	3	3	3	3	2
3	Faisol	3	3	3	3	3	3	3	2
4	Handri	3	3	3	3	3	3	3	2
5	Ahmad S	3	3	3	3	3	3	3	2
6	Januar H	3	3	3	3	3	3	3	2
7	Hudi	2	3	3	3	3	-	-	2
8	Edy S.	2	3	3	3	3	-	-	2
9	Sutrisno	2	3	3	3	3	-	-	2
10	Bagong	2	3	3	3	3	-	-	2
11	Julai kah	2	2	3	3	3	-	-	2
12	Siti Z	1	2	2	3	2	-	-	2
13	Rubekti	1	2	2	2	2	-	-	2
14	Samilah	2	2	2	2	2	-	-	2
15	Tarminen	2	2	2	2	2	-	-	2
16	Tutik	2	1	2	3	2	-	-	2
17	Ramini	2	1	1	3	1	-	-	2

Lampiran 7. Analisis skala Likert Output Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

No	Nama	Peningkatan RTM dalam pelaksanaan PNPM					Peningkatan kelembagaan di desa	Terlembaganya pembangunan partisipatif	Berfungsi dan bermanfaatnya PNPM	Terlembaganya pengelolaan dana bergulir	Berkembangnya kerjasama antar desa	Peningkatan para pemangku dalam penanggulangan kemiskinan
		Kemampuan menyusun rencana	Mengetahui peraturan kelompok	Mengetahui tempat&waktu pertemuan	Kemampuan kerjasama kelompok	Memfaatkan sarana prasarana						
1	Hudi	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	
2	Edy S.	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	Sutrisno	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	Bagong	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	
5	Julaikah	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	
6	Siti Z	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	
7	Rubekti	2	2	3	1	3	3	2	3	3	3	
8	Samilah	2	2	3	1	3	3	2	3	3	3	
9	Tarminen	1	2	3	1	3	2	3	3	3	2	
10	Tutik	1	2	3	2	3	2	3	3	2	2	
11	Ramini	1	1	3	2	3	3	2	3	2	2	
12	Marseh	1	1	3	2	3	3	2	3	3	2	
13	Kisnah	2	1	3	1	3	2	2	3	3	2	
14	Jamini	2	1	3	1	3	2	2	3	3	3	

Lampiran 8. Rencana Angsuran Kelompok ke UPK

RENCANA ANGSURAN KELOMPOK KE UPK

NO	Angsuran ke	Angsuran		Total Angsuran	Sisa Pokok Pinjaman
		Pokok	Jasa Pinjaman		
1	2	3	4	5	6
-		20,000,000	3,000,000	23,000,000	20,000,000
1		2,000,000	300,000	2,300,000	18,000,000
2		2,000,000	300,000	2,300,000	16,000,000
3		2,000,000	300,000	2,300,000	14,000,000
4		2,000,000	300,000	2,300,000	12,000,000
5		2,000,000	300,000	2,300,000	10,000,000
6		2,000,000	300,000	2,300,000	8,000,000
7		2,000,000	300,000	2,300,000	6,000,000
8		2,000,000	300,000	2,300,000	4,000,000
9		2,000,000	300,000	2,300,000	2,000,000
10		2,000,000	300,000	2,300,000	-
Jumlah		20,000,000	3,000,000	23,000,000	

RENCANA ANGSURAN KREDIT ANGGOTA KE KELOMPOK

Tanggal	Nama Anggota		Muayah	Surati	Sukaimi	Sriani	Endang M	Sustianingsih	Nasri	Lilik	Elvi	Tarnini	Jumlah (2)	Total 1+2
	Jumlah Kredit		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	20,000,000
	Angsuran Ke 1	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	Angsuran Ke 2	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	Angsuran Ke 3	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	Angsuran Ke 4	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	Angsuran Ke 5	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	Angsuran Ke 6	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	Angsuran Ke 7	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	Angsuran Ke 8	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	Angsuran Ke 9	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
	Angsuran Ke 10	Pokok	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	2,000,000
		Bunga	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
Jumlah		Pokok	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	20,000,000
		Bunga	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,000,000	4,000,000

Lampiran 10. Rencana Anggaran Biaya SPP

RENCANA ANGGARAN BIAYA SPP

NO	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Sumber Pembiayaan (Rp.)			Grand Total (Rp)
					Swadaya	Sumber Lain	PNPM -MP	
	Modal Awal				200,000			200,000
	Modal Tambahan						20,000,000	20,000,000
	Sub Total (1)				200,000	-	20,000,000	20,200,000
II	Peralatan							-
	Buku Kas, Bank	2	buah	6,000	12,000			12,000
	Buku Angsuran	1	buah	6,000	6,000			6,000
	A T K	1	set	70,000	70,000			70,000
	Sub Total (2)				88,000	-	-	88,000
III	Biaya – biaya							-
	Honor Pengurus	10	bulan	60,000	600,000			600,000
	Transport Angsuran	10	bulan	10,000	100,000			100,000
	Pertemuan Kelompok	10	bulan	20,000	200,000			200,000
	Sub Total (3)				900,000	-	-	900,000
	Total (1 s.d 3)				1,188,000	-	20,000,000	21,188,000
	Adminstrasi TPK 3 %						631,600	
	Administrasi UPK 2 %						421,100	
	Toatal Dana PNPM -MP						21,052,700	
	Sumber Pebiayaan				1,188,000			
	Dari Swadaya (Rp.)							
	Dari PNPM -MP						21,052,700	

No	Uraian	Bulan										Jumlah(Rp)		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1	Honor pengurus		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	600,000
2	Transport angsuran		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
3	Pertemuan bulanan		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000
4	Pencairan simpanan												200,000	200,000
5	lain-lain													
	Sub Total	20,313,000	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,590,000	2,590,000	44,413,000
	Jumlah (1-2)	-88,000	38,125	-161,875	93,250									
	Jumlah Kumulatif	-88,000	-49,875	-11,750	26,375	64,500	102,625	140,750	178,875	217,000	255,125	93,250		

Lampiran 12. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan

RENCANA ANGGARAN BIAYA JALAN POROS RABAT BETON

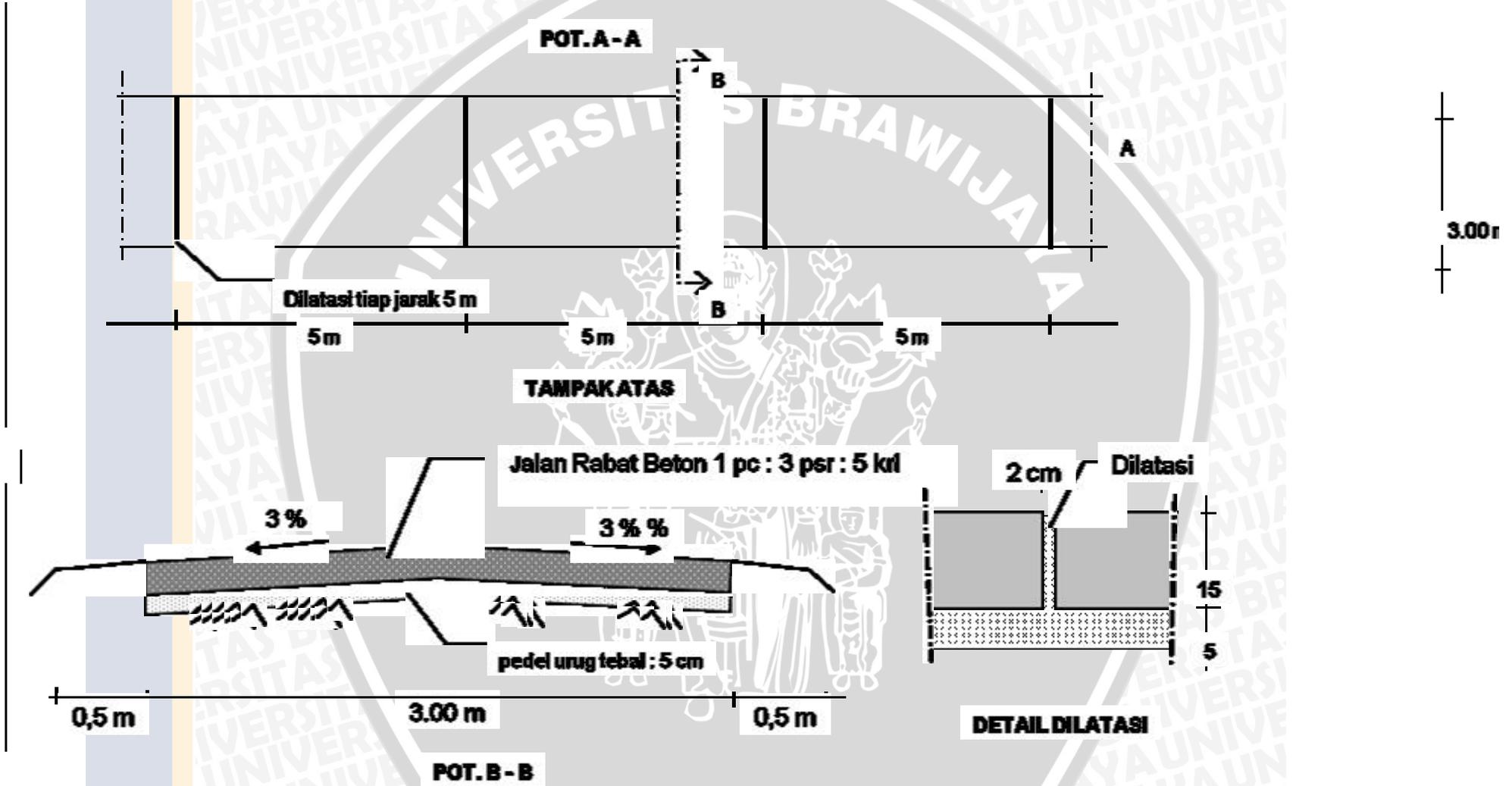
No	Uraian	Satuan	Volume			Harga Satuan	Kategori Biaya	Jumlah Harga Total	Biaya Swadaya (Rp.)		Jumlah Harga PNPMP	
			Total	Swadaya	PNPM-MP				Uang	Lainnya		
a	b	c	d	e	f = d-e	g	h	i = d x g	j	k	l = i - (i+k)	
I.	BAHAN											
1	Semen @40 kg	Zak	736.00	8.00	728.00	45,000	1.b.	33,120,000		360,000	32,760,000	
2	Pasir Cor	m ³	70.00		70.00	150,000	1.b.	10,500,000		0	10,500,000	
3	Batu pecah 2/3	m ³	117.00		117.00	175,000	1.b.	20,475,000		0	20,475,000	
4	Pedel	m ³	54.000	-	54.00	75,000	1.b.	4,050,000		0	4,050,000	
5	Plastik	m ²	900.00		900.00	750	1.b.	675,000		0	675,000	
			Subtotal I						68,820,000	0	360,000	68,460,000
II.	ALAT											
1	Molen	Hari	15		15	150,000	II.b.	2,250,000		0	2,250,000	
2	Alat bantu	ls	1		1	500,000	II.b.	500,000		0	500,000	
3	Papan 2/20	Lbr	14		14	14,000	II.b.	196,000		0	196,000	
4	Papan Proyek	Ls	1		1	150,000	II.c	150,000		0	150,000	
5	Prasasti	Ls	1		1	250,000	II.c	250,000		0	250,000	
			Subtotal II						3,346,000	0	0	3,346,000
III	UPAH											
1	Tukang	HOK	34.00		34.00	31,250	III.a	1,063,000		0	1,063,000	
2	Pekerja biasa	HOK	239.00		239.00	25,000	III.a	5,975,000		0	5,975,000	
			Subtotal III						7,038,000	0	0	7,038,000
	TOTAL BIAYA								79,204,000	0	360,000	78,844,000

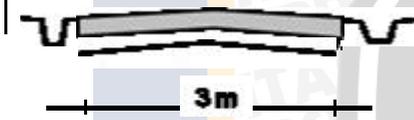
Lampiran 13. Rekapitulasi Anggaran Biaya

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA

No	Uraian	Kegiatan : Jl. Rabat Beton		Bobot %	Kegiatan :		Bobot %	Kegiatan :		Bobot %	Jumlah Total		Bobot %
		Ukuran : 300 x 3 x 0,15	Jumlah : 1		Ukuran :	Jumlah :		Ukuran :	Jumlah :		PNPM-MP	Swadaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l = c + f + i	m = d + g + j	n
I	BAHAN	68,460,000	360,000	87	-	-	-	-	-	-	68,460,000	360,000	82.49
II	PERALATAN	3,346,000	0	4	-	-	-	-	-	-	3,346,000	-	4.03
III	UPAH	7,038,000	0	9	-	-	-	-	-	-	7,038,000	-	8.48
	JUMLAH	78,844,000	360,000	100	-	-	-	-	-	-	78,844,000	360,000	95.00
IV	Operasional UPK 2%				-	-	-	-	-	-	1,659,000		2.00
V	Operasional TPK 3%				-	-	-	-	-	-	2,489,000		3.00
	JUMLAH TOTAL		79,204,000.00		-	0.00		-	-		82,992,000	79,204,000	100.00
	Jumlah Biaya Upah		0		-	-		-	-		7,038,000	-	
	Jumlah HOK Konstruksi	273.00	0.00	HOK	-	-	HOK	-	-	HOK	273.00	-	HOK

Lampiran 14. Sketsa Jalan



<p>Kabupaten : Lamongan Kecamatan : Sugio Desa : Supenuh</p>	<p>Take OF Sheet</p>	<p>Jenis Prasarana : Jalan Rabat Beton Lokasi : Sumampir Volume : 300 x 3 x 0,15</p>
<p>JALAN RABAT BETON</p> 	<p>Lebar (A) : 3 m Panjang (B) : 300 m Tebal Rabat (C) : 0.15 m Pedel (D) : 0.05 m</p> <p>Volume Rabat Beton (V.1)= : 135 m³ (A)x(B)x(C)</p> <p>Volume Pasir Urug/pedel (V.2)a : 45 m³ (A)x(B)x(D)</p> <p>Lebar (A).1 : m Panjang (B).1 : m Tebal Rabat (C).1 : m</p>	<p>Anl. G 42 1 m3 Beton 1 pc : 3 psr : 5 krl</p> <p>BAHAN :</p> <p>1. Semen 40 kg : (Vr) x 218 kg = 29,430 kg = <u>736</u> zak</p> <p>2. Pasir Cor : (Vr) x 0,520 = 70.00 m³</p> <p>3. Batu pecah 2/3 : (Vr) x 0,87 = 117.0 m³</p> <p>4. Pedel : (Vpsr) x 1.20 = <u>54.00</u> m³</p> <p>UPAH PEKERJA :</p> <p>Untuk Penghamparan pedel : 1. Pekerja : (Vp) x 0.3 = <u>16.0</u> HOK</p>

	<p>Volume Rabat Beton (V.2)=</p> <p>(A).1x(B).1x(C).1</p> <p>Volume Pasir Urug/pedel (V.2)= : m³</p> <p>Volume Rabat Beton Total (Vr) : 135 m³</p> <p>= (V.1) + (V.2)</p> <p>Volume pedel Total (Vr) 45.00 m³</p> <p>= (V.2)a + (V 2)b</p>	<p>Untuk Pengecoran :</p> <p>1. Tukang : (Vr) x 0,25 = <u>34.00</u> HOK</p> <p>2. Pekerja : (Vr) x 1,65 = <u>223.0</u> HOK</p> <p>Total Pekerja = 239.0 HOK</p> <p>Total Tukang = 34.00 HOK</p> <p>Sewa Molen : Kapasitas molen 0,3 m3 Produktiftas molen per hari (8 jam) = 8 m3 Sewa Molen : (Vr) / 9,6 = <u>15</u> Hari</p> <p>PAPAN BEKISTING : - Dilatasi dibuat tiap <u>5 meter</u> - Pemakaian papan sampai selesai pekerjaan - Asumsi Jika sehari pengecoran dapat <u>20 m'</u> - Kebutuhan papan : (20 m x 2 sisi)+(5 x 3.00 m)</p> <p>40 + 15 = 55 m 14 Lbr</p>
--	--	--